

IMPLEMENTASI PROGRAM GERAKAN TENGOK BAWAH MASALAH KEMISKINAN (GERTAK) DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN

**(Studi Pada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)
Kabupaten Trenggalek)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

RINA NURDIANA

NIM. 145030101111097



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2018**

MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).

Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”

(QS. Al-Insyirah, 6-8)

*“Jangan ambil hak orang lain, dahulukan mereka yang lebih membutuhkan
diantara kita”*

(Motto Program GERTAK)

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Implementasi Program Gerakan Tengok Bawah Masalah
Kemiskinan (GERTAK) dalam Upaya Penanggulangan
Kemiskinan (Studi pada Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Trenggalek)

Disusun Oleh : Rina Nurdiana

NIM : 145030101111097

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Konsentrasi :-

Malang, 04 Juli 2018

Komisi Pembimbing

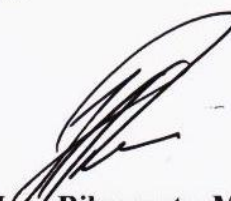
Ketua

Anggota



Dr. Mochammad Rozikin, M.AP

NIP. 19630503 198802 1 001



Drs. Heru Ribawanto, MS

NIP. 19520911 197903 1 002

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya didalam naskah skripsi yang berjudul **“Implementasi Program Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan (GERTAK) dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan (Studi pada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Trenggalek”** tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang sekarang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 04 Juli 2018



Rina Nurdiana

NIM. 145030101111097

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 17 Juli 2018
Waktu : 08.00 – 09.00 WIB
Skripsi Atas Nama : Rina Nurdiana
Judul : Implementasi Program Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan (GERTAK) dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan (Studi pada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPKD) Kabupaten Trenggalek)

Dan dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua



Dr. Mochamad Rozikin, M.AP
NIP. 19630503 198802 1 001

Anggota



Drs. Heru Ribawanto, MS
NIP. 19520911 197903 1 002

Ketua



Dr. Tjahjanulin Domai, MS
NIP. 19531222 198010 1 001

Anggota



Asti Amelia Novita, S.AP, M.AP, Ph.D
NIP. 198511102010122006

LEMBAR PERSEMBAHAN

Karya tulis ini saya persembahkan kepada :

Ayahanda Ilyas dan Ibunda Siti Fatonah, serta Kakak-

kakak saya Fudha, Esty, Tina, dan Husein.

Saudara-saudara saya, Sahabat, Kakak, Adik dan Teman-

teman saya selama di Malang yang telah menjadi

keluarga kedua saya di perantauan.

Serta seluruh civitas akademika Universitas Brawijaya,

khususnya almamater Fakultas Ilmu Administrasi

Universitas Brawijaya....

RINGKASAN

Rina Nurdiana, 2014. **Implementasi Program Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan (GERTAK) dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan (Studi pada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Trenggalek)**
Dr. Mochammad Rozikin, M.AP dan Drs. Heru Ribawanto, MS.

Permasalahan Kemiskinan dan kesenjangan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh setiap pemerintah daerah maupun Negara baik dimanapun, tak terkecuali oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek. Tingginya presentase angka kemiskinan di Kabupaten Trenggalek membuat Pemerintah Kabupaten Trenggalek harus mencari solusi untuk memecahkannya. Sebagai upaya dalam mengatasi kemiskinan, pemerintah memiliki berbagai program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi. Salah satu program itu adalah Program Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan (GERTAK). GERTAK adalah program Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) beserta seluruh *stakeholder* dalam rangka mensinergikan upaya percepatan penanggulangan dan pengentasan kemiskinan lewat lima strategi besar.

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif pendekatan deskriptif. Fokus penelitian yang pertama tentang implementasi Program GERTAK : struktur organisasi, sumber pembiayaan dan kelompok sasaran, implementasi lima strategi Program GERTAK. Kedua, mengenai faktor-faktor pendukung dan penghambat. Lokasi penelitian berada di Kabupaten Trenggalek dan situs penelitian di Posko GERTAK yang juga sebagai Sekretariat TKPKD. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model interaktif Miles, Huberman dan Saldana.

Hasil penelitian implementasi Program GERTAK menunjukkan bahwa adanya perubahan menuju ke arah yang lebih baik pada aspek ekonomi dan kesejahteraan sosial yang dirasakan masyarakat. Pada implementasi Program GERTAK sudah berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan mampu menekan angka kemiskinan dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat rumah tangga miskin. Program GERTAK mempunyai lima strategi implementasi yaitu *Golden standart klasifikasi*, mekanisme mutasi, unit pelayanan terpadu, bina ekonomi rakyat, redifinisi dan evaluasi. Dana yang mencukupi dan koordinasi, komunikasi serta peran *stakeholder* yang terlibat menjadi faktor pendukung dalam implementasi Program GERTAK. Sedangkan pola pikir masyarakat dan keakuratan data menjadi faktor penghambat dalam implemetasi program GERTAK. Saran yang dapat peneliti rekomendasikan adalah perlunya merubah pola pikir masyarakat, sebaiknya menjaga keakuratan data, sebaiknya diperlukan mekanisme pengawasan untuk ketepatan sasaran, sebaiknya penerima bantuan lebih bisa tertib mengikuti aturan yang ditetapkan.

Kata Kunci : Implementasi Program, Program Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan (GERTAK), Penanggulangan Kemiskinan

SUMMARY

Rina Nurdiana, 2014. **Implementation of the Downward Movement to Overcome Poverty Problem (GERTAK) in the Poverty Reduction Effort (Study on Poverty Reduction Coordination Team of the District of Trenggalek)** Dr. Mochammad Rozikin, M.AP and Drs. Heru Ribawanto, MS 151.

Poverty and socio-economic disparities are the classical problems that faced by every country or local government, including the government of Trenggalek Regency. The high percentage of poverty rate in Trenggalek makes Trenggalek Government must find solution to solve it. In an effort to overcome poverty, the government has integrated poverty alleviation programs. One of those programs called Downward Movement to Overcome Poverty Problem (GERTAK). GERTAK is a program of Regional Poverty Reduction Strategy (SPKD) across Regional Device Organizations (OPD) and all stakeholders in order to synergize efforts to accelerate poverty alleviation and poverty through five major strategies.

Qualitative method with descriptive approach used in this research. The first focus on the implementation of GERTAK Program includes organizational structure, financing sources, target groups, and five implementation strategies of the GERTAK Program. Second, focus on the supporting and inhibiting factors. The research located in Trenggalek Regency and GERTAK Command Post which is also as Secretariat of TKPKD. Data analysis used interactive model Miles, Huberman and Saldana.

The results of the implementation of the GERTAK Program show that there is a shift towards a better direction on the economic and social welfare aspects that the public perceives. In the implementation of GERTAK Program has been run in accordance with the established goals and able to suppress the poverty rate and improve the quality of life of poor households. The GERTAK program has five implementation strategies, namely Golden standard classification, mutation mechanism, integrated service unit, community economic development, redefinition and evaluation. Sufficient funding and coordination, communication and the role of stakeholders involved become a supporting factor in the implementation of the GERTAK Program. While the mindset of the community and the accuracy of the data becomes an obstacle factor in the implementation of GERTAK program. Suggestions that researchers can recommend is the need to change the mindset of the community, should maintain the accuracy of the data, should be required monitoring mechanism for the accuracy of the target, should the recipients more orderly follow the rules set.

Keywords: Implementation of Downward Movement to Overcome Poverty Problem (GERTAK), Poverty Reduction

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat, kurnia, serta hidayah-Nya yang dianugerahkan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“Implementasi Program Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan (GERTAK) dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan (Studi pada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Trenggalek)”**.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari akhir nanti. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS. selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA., Ph.D selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik.
3. Bapak Dr. Fadilah Amin, M.AP., Ph.D selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik.

4. Bapak I Gede Eko Putra Sri Sentanu, S.AP., M.AP., Ph.D selaku Sekretaris Program Studi Administrasi Publik.
5. Bapak Dr. Mochammad Rozikin, M.AP selaku Ketua Komisi Pembimbing yang dengan tulus membimbing, mengarahkan dan memberikan ilmunya berupa saran dan masukan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Drs. Heru Ribawanto, MS selaku Anggota Komisi Pembimbing yang dengan tulus membimbing, mengarahkan dan memberikan bimbingan dan masukan mengenai langkah-langkah yang harus diambil penulis kedepannya.
7. Seluruh dosen Administrasi Publik yang pernah mengajar dan mendidik penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
8. Kepala Dinas dan seluruh staf Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Trenggalek, Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek, Staf Posko GERTAK, serta semua pihak yang sudah berkenan memberikan izin, tempat, ilmu dan informasi terkait dat-data yang dibutuhkan selama penelitian berlangsung.
9. Orang tua tercinta, Bapak Ilyas dan Ibu Siti Patonah, terimakasih atas do'a, motivasi, semangat dan didikannya selama ini dengan segenap kasih sayang dan kesabarannya demi memperlancar proses penyelesaian skripsi ini.
10. Kedua Kakak Kandung saya (Prayudha Kurniawan dan Tiyas Esty Kurniawati), Kakak Ipar saya (Septina Mukaromah dan Hussein

Abdurrohman), serta Keponakan-keponakan yang saya sayangi (Syahquita Ayatul Husna, Adyasta Gilang F.R, dan M. Shysauqi Ar-rasyid), terimakasih atas do'a dan menjadi *moodbooster* selama penyusunan skripsi kepada peulis disaat penat.

11. Sahabat-sahabat saya, Astin, Ike, Della, Rahma, May, Dewi, Tika, Mbak Ocha, Mbak Putri, terima kasih atas segala bantuan, pengalaman, dan tidak pernah bosan memberi semangat kepada penulis.
12. Teman-teman saya yang satu dosen pembimbing, Lika, Danang, Neny, Rizal, terima kasih atas kebersamaannya dan bantuannya.
13. Terima kasih saya ucapkan untuk Fajar Rafiki yang tidak berhenti memberikan semangat dan bantuan, serta menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Serta bagi semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis sudah untuk memperoleh hasil yang terbaik. Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 04 Juli 2018

Rina Nurdiana

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSEMBAHAN	ii
MOTTO	iii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vi
RINGKASAN	vii
SUMMARY	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Kontribusi Penelitian.....	13
E. Sistematika Penulisan	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Program	17
1. Definisi Program	17
2. Implementasi Program	19
3. Unsur-unsur Implementasi Program	23
4. Tahap-tahap Implementasi Program	24

5. Penilaian Program	27
6. Fungsi Penilaian Program	28
7. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Program	29
B. Teori Kemiskinan	32
1. Pengertian Kemiskinan	32
2. Ciri-ciri Kemiskinan	33
3. Akar Penyebab Kemiskinan	34
4. Siklus Kemiskinan	38
5. Bentuk dan Jenis Kemiskinan	39
6. Pengertian Penanggulangan Kemiskinan	42
7. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan	43
C. Teori Gerakan Sosial	44
1. Pengertian Gerakan Sosial	44
2. Jenis-jenis Gerakan Sosial	46
3. Siklus Gerakan Sosial	47
4. Tahap-Tahap Gerakan Sosial	50

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	52
B. Fokus Penelitian	53
C. Lokasi dan Situs Penelitian	55
D. Jenis Data dan Sumber Data	55
E. Teknik Pengumpulan Data	58
F. Instrumen Penelitian	61
G. Analisis Data	64
H. Keabsahan Data	67

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	68
--	----

1. Gambaran Umum Kabupaten Trenggalek	68
a. Keadaan Geografis	68
b. Visi dan Misi Kabupaten Trenggalek	70
c. Keadaan Demografi.....	73
d. Tingkat Pendidikan Penduduk	76
e. Mata Pencaharian Penduduk	78
2. Gambaran Umum TKPKD Kabupaten Trenggalek	80
a. TKPK Tingkat Provinsi.....	81
b. TKPK Kabupaten/Kota	86
c. TKPK Tingkat Kecamatan	89
d. TPK Desa	90
B. Penyajian Data Fokus Penelitian	93
1. Program Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan (GERTAK) Pemerintah Kabupaten Trenggalek	93
2. Implementasi Program GERTAK dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Trenggalek	97
a. Organisasi Pelaksana	99
b. Sumber Pembiayaan	107
c. Kelompok Sasaran.....	110
d. Implementasi Lima Strategi Program GERTAK	115
1) Golden Standart Klasifikasi	116
2) Mekanisme Mutasi.....	128
3) Sistem Rujukan Terpadu	131
4) Bina Ekonomi Rakyat	135
5) Redefinisi dan Evaluasi	137
2. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi Program GERTAK dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Trenggalek	138
a. Faktor yang mendukung Program GERTAK.....	138
b. Faktor yang menghambat Program GERTAK.....	141

C. Analisis Data	144
1. Implementasi Program GERTAK dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Trenggalek	144
a. Organisasi Pelaksana	149
b. Sumber Pembiayaan	150
c. Kelompok Sasaran.....	153
d. Implementasi Lima Strategi Program GERTAK	155
1) Golden Standart Klasifikasi	155
2) Mekanisme Mutasi.....	157
3) Sistem Rujukan Terpadu	159
4) Bina Ekonomi Rakyat	161
5) Redefinisi dan Evaluasi	163
2. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi Program GERTAK dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Trenggalek	165
a. Faktor yang mendukung Program GERTAK.....	165
b. Faktor yang menghambat Program GERTAK.....	168
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	171
B. Saran	172
 DAFTAR PUSTAKA	175

DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
1.	Jumlah, Presentase dan Garis Kemiskinan Penduduk Miskin Indonesia Tahun 2011-2017	3
2.	Urutan Presentase dan Jumlah Penduduk Miskin Kab. Trenggalek se-Jawa Timur Tahun 2015 dan Tahun 2016	4
3.	Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin di Kabupaten Trenggalek Tahun 2012-2016	6
4.	Jumlah Rumah Tangga dan Individu, Menurut Kecamatan di Kab/Kota Trenggalek Provinsi Jawa Timur Tahun 2017	7
5.	Persebaran Desa/Kelurahan, RT dan RW pada tiap Kecamatan di Kabupaten Trenggalek	79
6.	Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Trenggalek	105
7.	Anggaran Dana Program GERTAK dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Trenggalek	112
8.	Rekap Hasil Musdes per Kecamatan Tahun 2017	128

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Halaman
1.	<i>Basic Logic Model</i>	23
2.	Alur Pelaksanaan Program	24
3.	<i>Vicious Circle of Poverty</i>	38
4.	Siklus Kemiskinan	41
5.	Siklus Gerakan Sosial	52
6.	Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif	70
7.	Peta Kabupaten Trenggalek	73
8.	Jumlah Penduduk Tiap Kecamatan Bulan Februari 2018	77
9.	Presentase Tingkat Pendidikan Penduduk Kabupaten Trenggalek Tahun 2017	81
10.	Bagan Struktur Organisasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Trenggalek	92
11.	Bagan Struktur Organisasi TKPKD Tingkat Kecamatan	94
12.	Bagan Struktur Organisasi TPK Desa/Kelurahan	96
13.	Dana BAZNAS Kabupaten Trenggalek	113
14.	Alur Pendanaan Program GERTAK	110
14.	Pelaksanaan Musdes verifikasi dan validasi data kemiskinan	124
15.	Foto Muyawarah Desa (musdes)	125
16.	GERTAK Apps yang berbasis android	133
17.	Posko GERTAK Kabupaten Trenggalek	137
18.	<i>Task force</i> Posko GERTAK (Pasukan Pink)	138
19.	Forum KISS ME	141
20.	Foto Rapat Koordinasi TKPK Kabupaten Trenggalek Tahun 2017	144

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul	Halaman
1.	Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 188.45/271/35.03.001.3/2017	179



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan menuju ke arah yang lebih baik dan terus menerus untuk mencapai tujuan yakni mewujudkan masyarakat yang berkeadilan, berdaya saing, maju dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan sesuai prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah dengan akar dan sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan melalui pembangunan jangka panjang dan jangka pendek. Dengan demikian, kemiskinan menjadi salah satu tema utama dalam pembangunan. Keberhasilan dan kegagalan pembangunan acapkali diukur berdasarkan perubahan pada tingkat kemiskinan, karena kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang ditandai dengan pengangguran, keterbelakangan dan keterpurukan. Masyarakat miskin sangat lemah dalam kemampuan berusaha dan mempunyai akses yang terbatas kepada kegiatan sosial ekonomi. Dalam konteks demikian, kemiskinan erat kaitannya dengan kapasitas dan jumlah penduduk dalam suatu daerah itu sendiri.

Logika berfikir yang dikemukakan Johnson and Schwartz dalam Assegaf (2015:34), kemiskinan dapat didefinisikan dari sudut pandang

ekonomi sebagai kurangnya pendapatan setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka yaitu makanan, tempat tinggal, transportasi, dan perawatan medis. Dikatakannya “*a lack of the necessary income for people to meet their basic needs for food, clothing, shelter, transportation, and medical care*”. Ketersediaan sumber penghasilan dinilai sebagai kunci dari persoalan kemiskinan dan kesejahteraan. Selain itu, kemiskinan dapat pula didefinisikan secara individual dan kelompok. Secara individual, kemiskinan menuntut pengukuran yang tergantung pada masing-masing individu dalam menilai dirinya. Secara kelompok, kemiskinan merupakan pola suatu kelompok terhadap kelompok lain di bagian tertentu sebuah kota. Pemerintah sendiri selalu mencanangkan upaya penanggulangan kemiskinan dari tahun ke tahun.

Namun jumlah penduduk miskin Indonesia tidak juga mengalami penurunan yang signifikan, walaupun data di BPS menunjukkan kecenderungan penurunan jumlah penduduk miskin, secara kualitatif belum menampakkan dampak perubahan yang nyata malahan kondisinya memprihatinkan tiap tahunnya. Menurut BPS, kemiskinan dikonseptualisasikan sebagai ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar dan diukur dari sisi pengeluaran perkapita atau dengan kata lain kemiskinan dipandang dari sisi ketidakmampuan ekonomi. Berdasarkan data BPS tahun 2011-2017 Pemerintah Indonesia telah menurunkan jumlah penduduk miskin dapat pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah, Presentase dan Garis Kemiskinan Penduduk Miskin Indonesia Tahun 2011-2017

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Juta Orang)	Persentase Penduduk Miskin (%)	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	
			Kota	Desa
Maret 2011	30,02	12,49	253.594	213.395
September 2011	29,89	12,36	263.594	223.181
Maret 2012	29,13	11,96	267.408	229.226
September 2012	28,59	11,66	277.382	240.441
Maret 2013	28,07	11,37	289.042	253.273
September 2013	28,55	11,47	308.826	275.779
Maret 2014	28,28	11,25	318.514	286.097
September 2014	27,73	10,96	326.853	296.681
Maret 2015	28,59	11,22	342.541	317.881
September 2015	28,51	11,13	356.378	333.034
Maret 2016	28,01	10,86	364.527	343.647
September 2016	27,76	10,70	372.114	350.420
Maret 2017	27,77	10,64	385.621	361.496

Sumber : *Badan Pusat Statistik Indonesia, 2017*

Pada awal tahun 2011 sampai dengan 2014 akhir, jumlah penduduk miskin di Indonesia secara bertahap telah mengalami penurunan yaitu pada tahun 2011 sebanyak 30,02 juta jiwa (12,49 persen), pada akhir tahun 2014 menjadi 27,73 juta jiwa (10,96 persen). Upaya pemerintah untuk menurunkan jumlah penduduk miskin telah tercapai pada tahun 2014, namun pada tahun 2015 jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan 0,86 juta jiwa (0,26 persen). Sementara itu pada Maret 2015 sampai dengan Maret 2017 terjadi penurunan yaitu dari 28,59 juta jiwa (11,22 persen) menjadi 27,77 juta jiwa (10,64 persen) pada periode Maret 2017.

Emil Salim (1976: 82) mengemukakan lebih lanjut, terdapat lima karakteristik penduduk miskin yaitu: 1) Tidak memiliki faktor produksi sendiri; 2) Tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh asset produksi dengan kekuatan sendiri; 3) Tingkat pendidikan pada umumnya rendah; 4) Banyak di antara mereka yang tidak mempunyai fasilitas dan 5) Diantara mereka berusia relatif muda dan tidak mempunyai keterampilan atau pendidikan yang memadai.

Seperti yang diungkapkan diatas karakteristik penduduk miskin tersebut bisa ditemui di wilayah pedesaan. Salah satunya adalah Kabupaten Trenggalek yang mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan. Meskipun Kabupaten Trenggalek bukan sebagai kabupaten termiskin di Jawa Timur namun masih jauh tertinggal di Kabupaten/Kota di Jawa Timur lainnya. Adapun data penduduk miskin di Kabupaten/Kota di Jawa Timur dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2. Urutan Presentase dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Trenggalek se-Jawa Timur Tahun 2015 dan Tahun 2016

No. Urut Th. 2015	Kabupaten / Kota	Presentase Penduduk Miskin (P0)	Jumlah Penduduk Miskin (000)	No. Urut Th. 2016	Kabupaten / Kota	Presentase Penduduk Miskin (P0)	Jumlah Penduduk Miskin (000)
1.	Sampang	25,69	240,35	1.	Sampang	24,11	227,80
2.	Bangkalan	22,57	216,23	2.	Bangkalan	21,41	205,71

3.	Probolinggo	20,82	236,96	3.	Probolinggo	20,98	240,47
4.	Sumenep	20,20	216,23	4.	Sumenep	20,09	216,14
5.	Pamekasan	17,41	146,92	5.	Tuban	17,14	198,35
6.	Tuban	17,08	196,59	6.	Pamekasan	16,70	142,32
7.	Pacitan	16,68	92,08	7.	Pacitan	15,49	85,33
8.	Bojonegoro	15,71	193,99	8.	Ngawi	15,27	126,65
9.	Ngawi	15,61	129,32	9.	Bondowoso	15,00	114,63
10.	Lamongan	15,38	182,64	10.	Lamongan	14,89	176,92
11.	Bondowoso	14,96	113,72	11.	Bojonegoro	14,60	198,35
12.	Gresik	13,63	170,76	12.	Situbondo	13,34	89,68
13.	Situbondo	13,63	91,17	13.	Trenggalek	13,24	91,49
14.	Trenggalek	13,39	92,17	14.	Gresik	13,19	167,12
15.	Kab. Kediri	12,91	199,38	15.	Kab. Kediri	12,72	197,43

Sumber : BPS Kabupaten Trenggalek, 2017

Pada tabel diatas dapat diketahui tentang angka kemiskinan Kabupaten Trenggalek dalam tahun 2015 dan tahun 2016. Pada tahun 2015, Kabupaten Trenggalek terdapat pada posisi nomor urut ke 14 dari seluruh kabupaten/kota Se-Jawa Timur. Hal ini dengan perolehan presentase penduduk miskin sejumlah 13,39 dan jumlah penduduk miskin sekitar 92,17. Dan pada tahun 2016 angka kemiskinan di Kabupaten Trenggalek mengalami penurunan sekitar 0,15% dari tahun sebelumnya. Hal ini dapat diperoleh presentase penduduk miskin sejumlah 13,24 dan jumlah penduduk miskin sekitar 91,49. Tetapi peringkat Kabupaten Trenggalek pada tahun 2016 mengalami kenaikan satu tingkat menjadi nomor urut ke 13 dari seluruh kabupaten/kota Se-Jawa Timur. Hal ini artinya bahwa Pemerintah Kabupaten Trenggalek telah berhasil menurunkan angka kemiskinan yang menjadi tugas dari pembangunan di daerah.

Berhasilnya pembangunan disuatu daerah juga tercermin dalam laju penurunan jumlah penduduk miskin. Perkembangan penduduk miskin di Kabupaten Trenggalek dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3. Terlihat hasil dari upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Trenggalek memperlihatkan hasil positif ditandai dengan persentase penduduk miskin mengalami penurunan, meskipun sempat mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin pada tahun 2015 tetapi kembali mengalami penurunan di tahun 2016. Namun keberhasilan di Kabupaten Trenggalek belum sepenuhnya berhasil karena persentase kemiskinan di Kabupaten Trenggalek masih diatas 10 persen.

Tabel 3. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Trenggalek Tahun 2012-2016

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (000)	Persentase Penduduk Miskin (%)
2012	96,90	14,21
2013	92,80	13,56
2014	90,00	13,10
2015	92,17	13,39
2016	91,49	13,24

Sumber : *Badan Pusat Statistik Kabupaten Trenggalek, 2016*

Kabupaten Trenggalek merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang mempunyai jumlah rumah tangga miskin yang cukup tinggi

yaitu sebanyak 83.078 Kepala Keluarga atau sebanyak 261.554 jiwa dari jumlah penduduk secara keseluruhan yang berjumlah 689.200 jiwa di 14 kecamatan di Kabupaten Trenggalek seperti terlihat dalam Tabel 3.

Tabel 4. Jumlah Rumah Tangga dan Individu, Menurut Kecamatan di Kab/Kota Trenggalek Provinsi Jawa Timur Tahun 2017

Nama Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Individu
Kecamatan Panggul	10.843	37.384
Kecamatan Munjungan	6.963	23.268
Kecamatan Watulimo	3.708	10.926
Kecamatan Kampak	4.927	15.426
Kecamatan Dongko	9.686	32.026
Kecamatan Pule	7.865	26.641
Kecamatan Karangan	4.399	12.862
Kecamatan Suruh	3.847	11.843
Kecamatan Gandusari	5.764	16.272
Kecamatan Durenan	4.870	13.546
Kecamatan Pogalan	5.093	15.153
Kecamatan Trenggalek	3.987	11.551
Kecamatan Tugu	6.397	19.243
Kecamatan Bendungan	4.729	15.413
Total	83.078	261.554

Sumber : Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin, 2017

Gambaran tersebut menunjukkan bahwa kesejahteraan sosial penduduk di Kabupaten Trenggalek merupakan masalah yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah dan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Trenggalek mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk

menuntaskan masalah kemiskinan di Kabupaten Trenggalek dalam mengatasi kesenjangan sosial.

Permasalahan kemiskinan di Kabupaten Trenggalek disebabkan oleh berbagai faktor. Dimulai dari rendahnya tingkat pendidikan di Kabupaten Trenggalek serta meningkatnya jumlah pengangguran. Selain itu, banyaknya angka kemiskinan disebabkan oleh tidak tersalurnya bantuan-bantuan kemiskinan secara tidak tepat sasaran. Hal ini rupanya disebabkan oleh data yang dipakai sebagai acuan dalam memberikan program-program kemiskinan tidak valid atau akurat. Sehingga bukan menyelesaikan dan mengurangi angka kemiskinan justru memperparah adanya kemiskinan di Kabupaten Trenggalek. Selain itu masyarakat berlomba-lomba untuk menggantungkan hidupnya melalui bantuan-bantuan kemiskinan dari pemerintah walaupun mereka berada pada situasi atau keadaan yang lebih baik dibandingkan dengan mereka yang lebih membutuhkan. Akibatnya banyak terjadi alokasi bantuan bagi masyarakat miskin yang tidak terdistribusi secara tepat.

Berangkat dari masalah kemiskinan diatas, pemerintah Kabupaten Trenggalek juga mengeluarkan sebuah program dalam pengentasan kemiskinan yang tertuang dalam Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Trenggalek tahun 2016-2021 melalui program Lintas Perangkat Daerah poin 17 yaitu Program GERTAK (Gerakan Tengok Bawah Masyarakat Miskin). Program

ini ditujukan untuk manajemen masalah-masalah kemiskinan di Kabupaten Trenggalek menjadi terpadu dan satu dalam Program GERTAK.

Program GERTAK mempunyai 5 strategi implementasi yaitu, *pertama* *Golden Standart* dan klasifikasi kemiskinan. Pada tahap ini pemerintah akan memberikan *standart* atau membuat klasifikasi bagi masyarakat miskin yang dianggap berhak menerima bantuan. *Kedua* adalah mekanisme mutasi, dimana tahap ini data masyarakat miskin akan di *update* dalam 3 bulan sekali sehingga pemerintah bisa menyalurkan bantuan secara tepat sasaran. *Ketiga* adalah Unit Unit pelayanan terpadu ini nanti diharapkan akan menjadi rujukan segala pelayanan bentuk kemiskinan. *Keempat* adalah Bina Ekonomi Rakyat, masyarakat yang masih produktif akan dibina dengan program berkelanjutan, unit usaha untuk masyarakat kurang mampu atau miskin. *Kelima* adalah Redefinisi dan Evaluasi, sehingga setelah proses berjalan Bappeda harus terus mengkoreksi dan berkoordinasi dengan TKPK yang lain. Apabila kelima tahap ini dilaksanakan dengan baik dan sinergi Pemerintah dengan beberapa elemen masyarakat terjalin dengan lancar maka cita-cita Program GERTAK dalam mengentas atau mengatasi permasalahan kemiskinan akan terwujud.

Dalam program ini Bupati Emil Dardak juga menyampaikan bahwa senjata ampuh dalam pengentasan kemiskinan yaitu dengan memberantas mental miskin dan meningkatkan upaya kolektif masyarakat untuk melepaskan diri dari kemiskinan. Dengan mental anti miskin, orang akan mengukur apakah perlu diberi bantuan atau tidak. Sehingga masyarakat yang

selama ini menerima bantuan akan mengalihkan kepada masyarakat-masyarakat lain yang sangat kurang mampu. Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek membuat terobosan program baru, yang bukan hanya sekedar program melainkan ada *soft campaign*-nya.

Program GERTAK ini dijalankan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) sesuai amanat Peraturan Presiden No.15 tahun 2010 tentang Keanggotaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota) terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan di tingkat daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota). Dari susunan keanggotaan diatas bisa diketahui apabila pemerintah benar-benar serius dalam penanganan masalah kemiskinan karena melibatkan berbagai elemen masyarakat yang ada. Tim ini nantinya akan bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya dibawah kepemimpinan Wakil Bupati Trenggalek.

Program GERTAK ini diharapkan mampu menjadi terobosan baru dalam pemecahan permasalahan kemiskinan di era sekarang. Program ini akan berbeda dari program-program pengentasan kemiskinan yang kebanyakan salah sasaran dan menciptakan ketergantungan masyarakat pada pusat ataupun bantuan pihak luar. Dengan melibatkan semua elemen yang ada termasuk masyarakat miskin, program GERTAK diharapkan mampu

mengurangi angka kemiskinan juga mengubah perilaku masyarakat miskin untuk mempunyai semangat kemandirian, kebersamaan dan kepedulian dalam mengatasi persoalan secara bersama atau musyawarah dan keadilan yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat miskin atau kurang mampu.

GERTAK bisa menjadi suatu fenomena dalam mengatasi permasalahan kemiskinan yang bisa menghasilkan peluang maupun tantangan. Keberadaan GERTAK semestinya mampu membawa implikasi yang baik dalam mengatasi permasalahan kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Trenggalek. Untuk itu diperlukan sebuah upaya yang senantiasa harus dilakukan secara optimal agar memaksimalkan peluang yang ada serta mengubah tantangan yang nantinya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Trenggalek itu sendiri. Pemerintah juga harus bekerja keras menanamkan pemikiran terhadap masyarakat untuk memberantas mental miskin yang selama ini ada di Kabupaten Trenggalek karena kemiskinan merupakan penghambat masyarakat dalam mencapai kesejahteraan sosial seperti yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1995. Untuk itu perlu sebuah upaya penanganan masalah-masalah kemiskinan yang tepat sasaran. Sehingga permasalahan kemiskinan bisa diatasi secara bersama serta melibatkan elemen masyarakat yang ada.

Berdasarkan hal diatas, penulis mengasumsikan bahwa pelaksanaan program GERTAK yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek

ini berpengaruh pada penanggulangan kemiskinan dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat agar terciptanya kesejahteraan sosial bagi masyarakat Kabupaten Trenggalek. Sehubungan dengan fenomena diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Program Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan (GERTAK) dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan (Studi pada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Trenggalek)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka urusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Program Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan (GERTAK) dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Trenggalek ?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang mendukung dan menghambat Program Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan (GERTAK) dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Trenggalek?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat dirinci tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, mendiskripsikan dan menganalisis implementasi Program Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan (GERTAK) dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Trenggalek.
2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat Program Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Trenggalek.

D. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai (*value*) dan kontribusi yang dapat diterima oleh semua pihak yang terkait. Adapun kontribusi penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Akademik
 - a. Bagi Mahasiswa
 - 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan analisis program Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan

(GERTAK) dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Trenggalek.

- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain sebagai bahan penelitian selanjutnya, serta dapat dijadikan acuan bagi pihak yang melakukan penelitian.

b. Bagi Perguruan Tinggi

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dalam rangka menambah wawasan.
- 2) Penelitian ini dapat dijadikan bahan pustaka untuk melakukan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Trenggalek tentang program Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan (GERTAK) dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Trenggalek.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat digunakan sebagai media sosialisasi kebijakan-kebijakan pemerintah sehingga masyarakat dapat memahami dan menyikapi secara baik.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui secara garis besar deskripsi dalam penulisan skripsi ini, maka dapat dilihat sistematika penulisan skripsi ini yang merupakan pemadatan keseluruhan isi skripsi secara singkat dan disajikan dalam lima bab yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika penulisan pada skripsi ini adalah :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi latar belakang penelitian yang mengemukakan permasalahan yang berkaitan dengan judul. Rumusan masalah yang merupakan kajian yang akan dibahas dan diteliti dalam rangka membatasi penelitian, serta dijelaskan tujuan penelitian, manfaat dari penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini merupakan landasan teori yang digunakan dalam penyusunan skripsi. Konsep-konsep, pendapat-pendapat atau teori yang digunakan digunakan sebagai acuan atau pedoman dalam penulisan skripsi

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menguraikan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yang terdiri dari : jenis penelitian, fokus

penelitian, pemilihan lokasi dan situs penelitian, jenis sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian dan analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan mengenai data yang diperoleh selama penelitian berlangsung sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan dimuat pembahasan untuk membahas hasil penelitian berdasarkan fokus penelitian.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari semua yang telah diuraikan dan dibahas, serta berisi saran yang dianggap perlu untuk menuju keadaan yang lebih baik dari obyek atau instansi yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Program

1. Definisi Program

Kebijakan sebagai suatu program pada umumnya yang dimaksud adalah suatu lingkup kegiatan pemerintah yang relatif khusus dan cukup jelas batas-batasnya. Dalam konteks program itu sendiri biasanya akan mencakup serangkaian kegiatan yang menyangkut pengesahan/legalisasi, pengorganisasian dan penghargaan atau penyediaan sumber-sumber daya yang diperlukan (Wahab, 2012:25). Dapat diartikan program sebagai aplikasi sistematis dari sumber daya yang didasarkan pada logika, keyakinan, dan asumsi identifikasi kebutuhan manusia dan faktor-faktor yang berhubungan dengan hal-hal yang sudah disebutkan. Program juga disebut sebagai hal yang termasuk di dalamnya serangkaian kegiatan sistematis yang direncanakan, adanya sumber daya yang dikelola, adanya sasaran target atau tujuan, adanya kebutuhan yang spesifik yang diidentifikasi, adanya partisipasi individu atas kelompok, adanya konteks tertentu, menghasilkan *output* terdokumentasi, hasil dan dampak adanya sistem keyakinan yang terlaksana dengan program kerja dan memiliki manfaat (Ashiong, 2015:4-5).

Menurut Westra, dkk dalam Putra (2003: 50), Program merupakan rumusan yang memuat gambaran pekerjaan yang akan dilaksanakan beserta petunjuk cara pelaksanaannya. Memperkuat hal tersebut Kayatomo

(1985:162) yang mengatakan bahwasannya program merupakan rangkaian aktivitas yang mempunyai saat permulaan yang harus dilaksanakan serta diselesaikan untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian definisi program yang tercantum dalam Undang-undang RI No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/ lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau masyarakat dikoordinasikan oleh instansi.

Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya program merupakan tindak lanjut dari kebijakan yang dilakukan oleh subjek tertentu dalam jangka waktu yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Program juga merupakan serangkaian kegiatan yang memiliki acuan yang sama. Subjek pelaksana program dilakukan oleh instansi pemerintah, lembaga, atau masyarakat. Tujuan dan sasaran ditentukan sehingga terlaksananya program lebih terfokus.

Sedangkan menurut Arikunto (1998:38) ada dua pengertian untuk istilah program yaitu:

“Program dapat diartikan dalam arti khusus dan program dalam arti umum. Secara umum, program adalah sebuah bentuk rencana yang akan dilakukan. Selanjutnya Arikunto mengatakan bahwa ada tiga pengertian penting dan perlu ditekankan dalam menentukan program, yaitu (1) realisasi atau pelaksanaan suatu program, (2) terjadi dalam waktu relatif lama bukan kegiatan tunggal tetapi jamak berkeseimbangan, dan (3) terjadi dalam organisasi yang melibatkan sekelompok orang”.

Dari berbagai pendapat tersebut, maka program dapat diartikan sebagai suatu unit atau kesatuan kegiatan yang terencana serta dapat disebut sebagai sistem yang didalamnya terdapat rangkaian kegiatan yang dilakukan bukan hanya satu kali tetapi berkesinambungan dan melibatkan banyak orang di dalamnya.

Mengutip dari United Nations dalam Zauhar, (1993:16) bahwa suatu program dapat terlaksana dengan baik apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

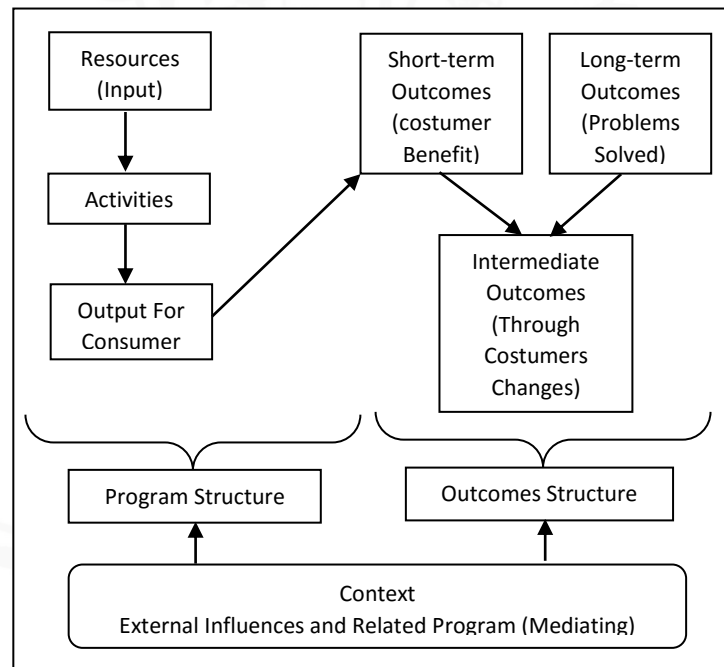
- a. Tujuan yang dirumuskan jelas.
- b. Penentuan dari peralatan yang terbaik untuk mencapai tujuan.
- c. Suatu kerangka kebijaksanaan yang konsisten dan atau proyek-proyek yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan program secara selektif.
- d. Pengukuran dengan ongkos-ongkos yang diperkirakan dan keuntungan-keuntungan yang diharapkan akan hasil dari program tersebut.
- e. Hubungan dengan kegiatan lain dalam usaha pembangunan tidak berdiri sendiri.
- f. Berbagai upaya di bidang manajemen termasuk penyediaan tenaga, pembiayaan dan lain-lain untuk melaksanakan program tersebut.

Kutipan tersebut pun menjelaskan bahwasannya sebuah program harus didukung dengan peralatan, sumber anggaran dan relasi dengan instansi lain serta sumberdaya pelaksana yang mendukung.

2. Implementasi Program

Dalam implementasi program, terdapat berbagai model yang dikemukakan para ahli untuk mempermudah dalam memahami proses analisis

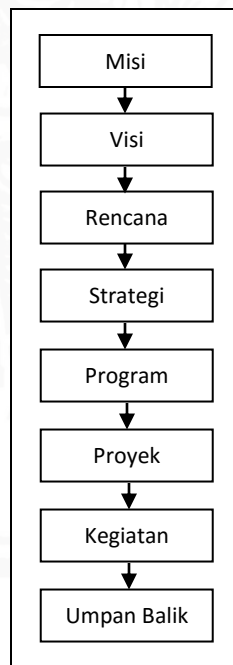
implementasinya, salah satunya yang dikenal dengan *logic models* (model logika dasar). Model ini merupakan salah satu model yang tepat untuk melakukan evaluasi terhadap suatu kebijakan atau program. Model logika dasar telah muncul pada tahun 1960-an, namun pemakaiannya mulai banyak dilakukan sejak beberapa dekade ini dikarenakan model logika dasar lebih fokus pada kerangka evaluasi dan ukuran kerja sebuah program. Elemen-elemen dalam model ini meliputi sumberdaya, proses, *output* yang hendak dicapai, sasaran serta *outcomes*. Berikut adalah gambar kerangka analisis melalui logika dasar :



Gambar 1. Basic Logic Model

Sumber : Wholey, dkk, 2010:57

Program sebagai kajian kebijakan dapat ditinjau dari pelaksanaan program. Pelaksanaan program pada prinsipnya adalah cara agar sebuah program dapat mencapai tujuannya. Untuk melaksanakan program ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung dilaksanakan dalam bentuk program-program atau turunan dari program tersebut. Program dalam bentuk Undang-undang atau perda adalah jenis program yang memerlukan penjelasan atau sering diistilahkan dengan peraturan pelaksanaan. Program yang bisa langsung beroperasi antara lain: Keppres, Inpres, Kepmen, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas. Berikut merupakan bagian alur pelaksanaan program menurut Dwidjowijoto (2006:142):



Gambar 2. Alur Pelaksanaan Program

Sumber : Dwidjiwijoto, 2006:142

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses program sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlak, menurut Abdullah (1987:17) antara lain sebagai berikut :

- a. Adanya program yang dilaksanakan, jadi ada tujuan yang ingin dicapai dari program tersebut.
- b. *Target group*, yaitu kelompok yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut dalam bentuk perubahan dan peningkatan. Jadi dari pelaksanaan program yang telah dibuat tersebut diharuskan memberi dampak positif pada masyarakat yang menjadi target program tersebut.
- c. Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang bertanggungjawab dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan dari proses pelaksanaan tersebut.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Abdullah, dapat dipahami bahwa kinerja program tidak akan berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan kalau tidak terdapat kesesuaian antara tiga unsur penting implementasi program. Hal ini disebabkan apabila program yang dilaksanakan tidak memiliki tujuan atau jika *output* program tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran, maka jelas *output* program tersebut tidak dapat dimanfaatkan. Jika unsur atau organisasi pelaksana program tidak memiliki kemampuan melaksanakan tugas yang disyaratkan oleh program, maka organisasinya tidak dapat menyampaikan *output* program dengan tepat. Atau jika syarat yang ditetapkan organisasi pelaksana program tidak dapat dipenuhi oleh kelompok sasaran, maka kelompok sasaran tidak mendapatkan *output* program. Oleh karena itu, kesesuaian antara tiga unsur implementasi

kebijakan mutlak diperlukan agar program berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

3. Unsur-unsur Implementasi Program

Implementasi program selalu berhubungan dengan suatu kejadian, karena tindakan dari suatu kejadian dilakukan dengan adanya suatu program dikarenakan program merupakan salah satu komponen dari suatu kebijakan. Adapun unsur-unsur program harus didukung dengan wujud yang bermacam-macam ditinjau dari berbagai aspek yakni tujuan, jenis, jangka waktu, luas, pelaksana, sifatnya dan sebagainya seperti yang dikemukakan Arikunto (1998:29) sebagai berikut :

- a. Ditinjau dari segi tujuan, terdapat program yang kegiatannya bertujuan mencari keuntungan (kegiatan yang bersifat komersial) dan ada yang bertujuan sukarela (kegiatan sosial). Jika programnya bertujuan komersial, ukurannya adalah seberapa banyak program tersebut telah memberikan keuntungan.
- b. Ditinjau dari segi jenis, ada program pendidikan, program koperasi, program kemasyarakatan, program pertanian dan sebagainya yang pengklarifikasiannya didasarkan atas isi kegiatan program tersebut. Jenis program cenderung memberikan variasi atas penilaiannya.
- c. Ditinjau dari segi jangka waktu, ada program berjangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Untuk ukuran jangka waktu bagi sesuatu program sebenarnya agak relatif sesuai beberapa tahun program ditentukan.
- d. Ditinjau dari segi keleluasaannya, ada program sempit yang menyangkut variabel terbatas dan program luas yang menyangkut banyak variabel.

- e. Ditinjau dari segi pelaksana, maka ada program kecil yang hanya dilaksanakan oleh beberapa orang dan program besar yang dilaksanakan oleh puluhan sampai ratusan orang.
- f. Ditinjau dari segi sifatnya, terdapat program penting dan program yang kurang penting. Program penting adalah program yang dampaknya menyangkut nasib banyak orang mengenai hal yang vital, sedangkan program yang kurang penting adalah sebaliknya.

Dengan adanya uraian diatas, dapat dikatakan bahwa unsur-unsur program diatas merupakan interpretasi dari sebuah kebijakan pemerintah yang berisi kumpulan intruksi, yang dibuat untuk memperbaiki permasalahan yang sedang berkembang. Unsur-unsur program harus ada dalam mengimplementasikan suatu kebijakan agar hal tersebut dapat berjalan dengan tersistematik dan sesuai dengan tujuan awal dari program tersebut.

4. Tahap-Tahap Implementasi Program

Menurut Tachjan (2006:35) implementasi program dalam konteks kebijakan publik terdiri dari beberapa tahap sebagai berikut :

- a. Merancang bangun (*design*) program beserta perincian tugas dan perumusan tujuan yang jelas, penentuan ukuran prestasi yang jelas serta biaya dan waktu.
- b. Melaksanakan (*application*) program dengan mendayagunakan struktur-struktur dan personalia, dan serta sumber-sumber lainnya, prosedur dan metode yang tepat.
- c. Membangun sistem penjadwalan, *monitoring* dan sarana-sarana pengawasan yang tepat guna serta evaluasi (hasil) pelaksanaan program.

Dengan adanya program maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan terarah dalam penerapannya. Unsur kedua yang harus dipenuhi dalam proses implementasi program yaitu adanya kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program sehingga masyarakat tersebut merasa ikut dilibatkan dan membawa hasil dari program yang dijalankan dan adanya perubahan dan peningkatan dalam kehidupannya. Tanpa memberikan manfaat kepada masyarakat maka boleh dikatakan program itu telah gagal dilaksanakan. Berhasil tidaknya suatu program di implementasikan tergantung dari unsur pelaksanaanya, unsur pelaksana merupakan unsur ketiga dalam proses implementasi suatu program.

Dalam penjelasan diatas dapat disimpulkan, apakah suatu program terimplementasikan dengan efektif atau tidak dapat diukur dengan standar penelitian yaitu pengorganisasian, interpretasi dan penerapan hal tersebut seperti yang dikatakan oleh Jones dalam Hessel Nogi (2003:32):

- a. Interpretasi yang dimaksud sebagai usaha untuk mengerti apa yang dimaksud oleh pembentuk kebijaksanaan dan mengetahui betul apa dan bagaimana tujuan akhir itu harus diwujudkan. Tahap ini yaitu bagaimana menafsirkan agar program dapat menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima sehingga dapat dilaksanakan dengan baik.
- b. Pengorganisasian ini lebih mengarah pada proses kegiatan pengaturan dan penetapan siapa yang menjadi pelaksana kebijakan dan program (penentuan lembaga organisasi) mana yang akan melaksanakan dan siapa pelakunya); penetapan anggaran (berapa besarnya anggaran yang diperlukan, dari mana sumbernya, bagaimana menggunakan dan mempertanggungjawabkan); penetapan prasarana dan sarana apa yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, penetapan tata kerja (juklak dan juknis);

dan penetapan manajemen pelaksanaan (Wahab, 2012:91). Hal ini dapat dilihat melalui :

- a) Struktur organisasi, yang berkaitan dengan interaksi, hierarki, tujuan dan sifat-sifat.
 - b) Sumber daya manusia, yaitu berkaitan dengan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
 - c) Sumber sarana dan prasarana, berkaitan dengan fasilitas yang mendukung agar pekerjaan yang dihasilkan berkualitas dan bermanfaat secara efisien dan efektif.
 - d) Metode kerja/prosedur kerja, yaitu berhubungan atau berkoordinasi dengan system dan prosedur kerja yang sudah baku sehingga dapat bekerjasama secara terpadu dan tidak tumpang tindih serta sudah memahami tugas dan tanggungjawab masing-masing, sehingga memudahkan untuk melaksanakan tugas masing-masing dengan efektif.
 - e) Perangkat hukum, yaitu berkaitan dengan suatu undang-undang, peraturan-peraturan yang mendukung suatu organisasi menjalankan aktivitasnya secara formal. Dalam hal ini organisasi harus memiliki kekuatan hukum.
 - f) Anggaran dana
- c. Penerapan merupakan segala keputusan dengan melakukan kegiatan-kegiatan untuk terealisasinya tujuan dari program.

Dari penjelasan mengenai tahapan implementasi diatas, peneliti menarik kesimpulan bahwa tahap implementasi merupakan sebuah proses pelaksanaan dari suatu program, baik itu di lingkungan pemerintah, masyarakat, organisasi atau sekolah yang hasilnya dapat dilihat dari pencapaian target dengan tujuan awal, sehingga dalam tahap-tahap implementasi ini sangat dimungkinkan banyak hal yang sifatnya teknis sebagai upaya dari pencapaian tujuan program tersebut.

5. Penilaian Program

Menurut T. Raka Joni (1980) dalam Arikunto (1998:34) perbedaan antara penilaian dan penelitian terletak pada segi tujuannya. Penelitian pada dasarnya dilakukan untuk memperoleh pemahaman atas fenomena dalam arti yang seluas-luasnya, sedangkan penilaian ditujukan untuk dapat mengambil tindakan tertentu. Selanjutnya dikatakan bahwa penelitian bersifat *conclusion-oriented* dimana keputusan-keputusan yang diambil berdasarkan pada data. Tetapi dalam metode, langkah dan instrumen yang digunakan dalam penelitian dan penilaian adalah sama.

Menurut *Encyclopedia of Educational Evaluation* Anderson (1976) dalam Arikunto (1998:4-5) disebutkan ciri-ciri umum penelitian, yaitu :

- a. Tujuan utama penilaian adalah menyiapkan informasi untuk keperluan pengambilan keputusan tentang suatu program. Jadi, penelitian penilaian hendaknya dirancang dalam hubungan dengan alternatif pengambilan keputusan.
- b. Hasil-hasil penilaian hendaknya bermanfaat bagi pengembangan program.
- c. Informasi sebagai hasil penilaian hendaknya tersedia pada waktu yang tepat dalam pengambilan keputusan (tidak terlalu awal atau terlambat).
- d. Penilaian adalah sesuatu yang menyangkut proses pertimbangan manusia tentang hasil suatu program.
- e. Usaha-usaha penilaian hendaknya mempertimbangkan tujuan program, baik tujuan jangka panjang maupun tujuan jangka pendek.
- f. Tidakkah penting terlalu mempertimbangkan hasil-hasil yang kecil. Oleh karena itu sebelum mulai melangkah untuk mengevaluasi hendaknya betul-betul diadakan pembatasan mengenai apa yang akan diperhatikan.

- g. Bukanlah hal yang mudah menentukan model penilaian mana yang cocok untuk program tertentu yang dinilai, terutama disebabkan karena manusia merupakan hal yang sangat kompleks.

Proses untuk memperoleh informasi untuk penilaian hendaknya memenuhi kriteria objektivitas, reabilitas, validitas, praktibilitas, utilitas dan pertanggungjawaban etis. Walaupun data yang masuk berasal dari dan terkumpul oleh seseorang namun titik pusat penilaian harus tetap pada keseluruhan program.

6. Fungsi Penilaian Program

Arikunto (1998:10) menjelaskan bahwa tujuan penelitian program adalah mengukur keberhasilan program. Keberhasilan tersebut bukan hanya tampak dalam bentuk hasil tetapi juga diukur dari segi waktu, kelancaran, dana, tenaga dan sebagainya.

Para perencana pengelola dan pelaksana program perlu mengetahui keberhasilan dari usahanya menyelenggarakan program, terutama pihak pertama, yakni perencana. Oleh karena pada waktu merencanakan sudah dipikirkan bahwa program tersebut akan baik, maka kadang-kadang tidak terasa bahwa yang sedang atau sudah berjalan adalah kurang baik. Lebih-lebih bagi para pelaksana apabila program itu menyenangkan. Dalam keadaan

demikian penilaian ini sangat penting karena telah memberikan informasi mengenai keterlaksanaan program.

Dengan demikian maka penilaian program berfungsi sebagai pembantu, pengontrol pelaksana program agar dapat diketahui tindak lanjut dari pelaksanaan program tersebut.

7. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Program

Adapun syarat-syarat untuk dapat melaksanakan program secara sempurna menurut Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gun dalam Wahab (2012:71-78), yaitu :

- a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan mengalami gangguan atau kendala yang serius. Hambatan-hambatan tersebut mungkin sifatnya fisik, politis dan sebagainya.
- b. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai.
- c. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia.
- d. Program yang akan dilaksanakan didasarkan oleh suatu hubungan kausalitas yang handal.
- e. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya.
- f. Hubungan saling ketergantungan kecil.
- g. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
- h. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.
- i. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
- j. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

Program yang dibuat oleh pemerintah tidak hanya ditujukan dan dilaksanakan untuk intern pemerintah saja, akan tetapi ditujukan dan dilaksanakan pula oleh seluruh masyarakat yang berada di lingkungannya. Menurut James Anderson dalam Sunggono (1994:23), masyarakat mengetahui dan melaksanakan suatu program dikarenakan:

- a. Respek anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan-keputusan badan-badan pemerintah;
- b. Adanya kesadaran untuk menerima program pemerintah;
- c. Adanya keyakinan bahwa program tersebut dibuat secara sah, konstitusional dan dibuat oleh para pejabat pemerintah yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan;
- d. Sikap menerima dan melaksanakan program karena program itu lebih sesuai dengan kepentingan pribadi;
- e. Adanya sanksi-sanksi tertentu yang akan dikenakan apabila tidak melaksanakan suatu program;

Berdasarkan teori diatas bahwa faktor pendukung implementasi program harus didukung dan diterima oleh masyarakat, apabila anggota masyarakat mengikuti dan mentaati sebuah program maka sebuah implementasi program akan berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan tanpa ada hambatan-hambatan yang mengakibatkan sebuah program tidak berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Sunggono (1994: 149-153), pelaksanaan program mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu :

a. Isi Program

Pertama, pelaksanaan program gagal karena masih samanya isi program, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program terlalu umum atau sama sekali tidak ada. Kedua, karena kurangnya ketepatan intern maupun ekstern dari program yang akan dilaksanakan. Ketiga, program yang akan dilaksanakan dapat

juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. Keempat, penyebab lain dari timbulnya kegagalan pelaksanaan suatu program dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumberdaya-sumberdaya pembantu, misalnya yang menyangku waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.

b. Informasi

Pelaksanaan program mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.

c. Dukungan

Pelaksanaan suatu program akan sangat sulit apabila pada pelaksanaannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan program tersebut.

d. Pembagian Potensi

Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya pelaksanaan suatu program juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggungjawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas.

Suatu program akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan mempunyai manfaat positif bagi anggota-anggota masyarakat. Dengan kata lain, tindakan atau perbuatan manusia sebagai anggota masyarakat harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau negara. Sehingga apabila perilaku atau perbuatan mereka tidak sesuai dengan keinginan pemerintah atau negara, maka suatu program tidaklah efektif.

B. Teori Kemiskinan

1. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan merupakan fenomena yang nyaris terdapat pada semua golongan Negara. Kemiskinan tidak saja tumbuh dan berkembang dalam sistem Negara miskin tetapi juga menjadi ancaman bagi Negara maju. Ancaman tersebut disebabkan karena kemiskinan bukan faktor otonom yang muncul dengan sendirinya dalam sebuah Negara, tetapi sering kali juga karena dampak atau pengaruh faktor lainnya seperti pilihan kebijakan pembangunan oleh pemerintah. Oleh karena itu, kemiskinan selalu memiliki beragam wajah karena berkaitan dengan berbagai faktor dan sektor kehidupan sosial dan politik pada suatu Negara. Rumitnya mendiskusikan persoalan kemiskinan ini berakibat banyaknya teori atau pandangan yang berkembang dalam studi kemiskinan. Penelitian ini akan mempertengahkan beberapa konsep kunci dalam membicarakan persoalan kemiskinan tersebut dalam berbagai pandangan.

Menurut *Encyclopedia of World Poverty* dalam Nurhayati Ali Assegaf (2015:33) mendefinisikan kemiskinan sebagai keadaan kekurangan dimana individu tidak cukup makanan perumahan, pakaian, perawatan medis dan barang-barang dasar lainnya untuk mempertahankan standar hidup yang layak. Sedangkan menurut UNESCO dalam Assegaf (2015:34) yaitu:

“Kemiskinan adalah sebuah kondisi dengan berbagai dimensi yang saling berkaitan erat dan dapat dibagi menjadi tiga kategori besar

yaitu: (1) minimnya pendapatan tetap, asset-aset produktif, dan akses terhadap jaring pengaman sosial; (2) minimnya akses terhadap layanan seperti pendidikan, kesehatan, informasi, kredit, air bersih dan sanitasi; (3) serta minimnya kekuatan politik, partisipasi, martabat dan kehormatan”.

Dari kedua pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kemiskinan merupakan kondisi secara nyata yang dapat dilihat dalam kehidupan masyarakat. Pada prinsipnya standar hidup disuatu masyarakat tidak sekedar tercukupinya kebutuhan akan pangan, akan tetapi juga tercukupinya kebutuhan akan kesehatan maupun pendidikan. Tempat tinggal ataupun pemukiman yang layak juga merupakan salah satu dari standar hidup atau standar kesejahteraan masyarakat disuatu daerah. Berdasarkan kondisi ini, suatu masyarakat disebut miskin apabila memiliki pendapatan jauh lebih rendah dari rata-rata pendapatan sehingga tidak banyak memiliki kesempatan untuk mensejahterakan dirinya maupun keluarganya.

2. Ciri-ciri Kemiskinan

Melihat banyaknya ukuran yang dapat dipakai untuk menentukan seseorang atau sekelompok orang untuk disebut miskin atau tidak miskin, maka umumnya para ahli akan merasa kesulitan dalam mengklarifikasi masyarakat menurut garis kemiskinan. Menurut Suyanto (2013:5) pada dasarnya ada beberapa ciri dari kemiskinan, yaitu :

- a. Tidak memiliki faktor produksi sendiri, seperti tanah yang cukup, modal, peralatan kerja atau keterampilan yang memadai.
- b. Bekerja dalam lingkup kecil dan modal kecil atau disebut juga bekerja dilingkungan sektor informal sehingga mereka ini terkadang disebut juga setengah menganggur.
- c. Tingkat pendidikan yang relatif rendah.
- d. Berada di kawasan pedesaan atau dikawasan yang jauh dari pusat-pusat pertumbuhan regional atau berada pada kawasan tertentu di perkotaan (*slum area*).
- e. Memiliki kesempatan yang relatif rendah dalam memperoleh bahan kebutuhan pokok yang mencukupi termasuk dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan sesuai dengan standar kesejahteraan pada umumnya.

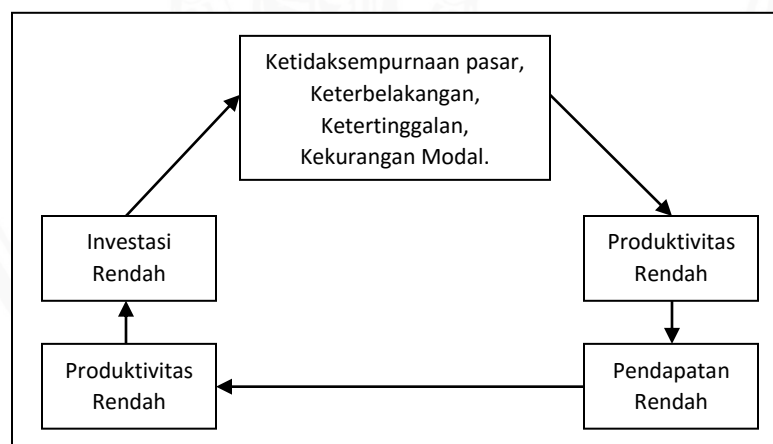
Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa ciri-ciri kemiskinan diatas tidak memiliki sifat mutlak (absolut) untuk dijadikan kebenaran universal terutama dalam menerangkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan. Sifat-sifat kemiskinan diatas hanya merupakan temuan lapangan yang paling banyak diidentifikasi atau diukur.

3. Akar Penyebab Kemiskinan

Tidak sedikit penjelasan mengenai sebab-sebab kemiskinan, kemiskinan massal yang terjadi dibanyak negara yang baru saja merdeka setelah Perang Dunia II memfokuskan pada keterbelakangan dari perekonomian negara tersebut sebagai akar masalahnya. Sharp, et. al dalam Kuncoro (1997:131) mengidentifikasi:

“Penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi, pertama secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib kurang beruntung, adanya diskriminasi atau keturunan. Ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal”.

Ketiga penyebab kemiskinan tersebut bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*) menurut Nurkse dalam Kuncoro (1997:132): adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan dan seterusnya seperti terlihat dalam gambar:



Gambar 3. *Vicious Circle of Poverty*
Sumber : Kuncoro (1997:132)

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Kuncoro diatas bahwa Negara Berkembang sampai kini masih sulit mengelola pasar dalam negerinya menjadi pasar persaingan yang lebih sempurna. Ketika mereka tidak dapat mengelola pembangunan ekonomi maka kecenderungan kapital dapat terjadi, diikuti dengan rendahnya produktivitas, turunnya pendapatan riil, rendahnya tabungan dan investasi mengalami penurunan sehingga melingkar ulang menuju keadaan kurangnya modal, demikian seterusnya melingkar. Oleh karena itu, setiap usaha memerangi kemiskinan seharusnya diarahkan untuk memotong lingkaran dan perangkat kemiskinan ini.

Menurut Dewanta dalam Suryono (2010:237) mengidentifikasi beberapa penyebab orang menjadi miskin, antara lain:

- a. Karena perbedaan akses ekonomi yang dimiliki.
- b. Karena ketidak beruntungan (*lucky*) yang dimiliki oleh kelompok masyarakat miskin.
- c. Karena ketimpangan distribusi.
- d. Karena pembangunan dianalogkan dengan ideologi (partai).
- e. Karena kesalahan strategi pembangunan daan industrialisasi.
- f. Karena adanya intervensi pemerintah yang berlebihan.

Menurut Indra Maipita (2014:14) dalam penyebab dan dampak kemiskinan didesa menyebutkan bahwa kemiskinan didesa disebabkan oleh faktor-faktor diantara lain:

a. Ketidakberdayaan

Kondisi ini muncul karena kurangnya lapangan kerja, rendahnya harga produk yang dihasilkan mereka dan tingginya biaya pendidikan.

b. Keterkucilan

Rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya keahlian, sulitnya transportasi, serta ketiadaan akses terhadap kredit menyebabkan mereka terkucil dan menjadi miskin.

c. Kemiskinan materi

Kondisi ini diakibatkan kurangnya modal dan minimnya lahan pertanian yang dimiliki menyebabkan penghasilan mereka relatif rendah.

d. Kerentanan

Sulitnya mendapatkan pekerjaan, pekerjaan musiman dan bencana alam, membuat mereka menjadi rentan dan miskin.

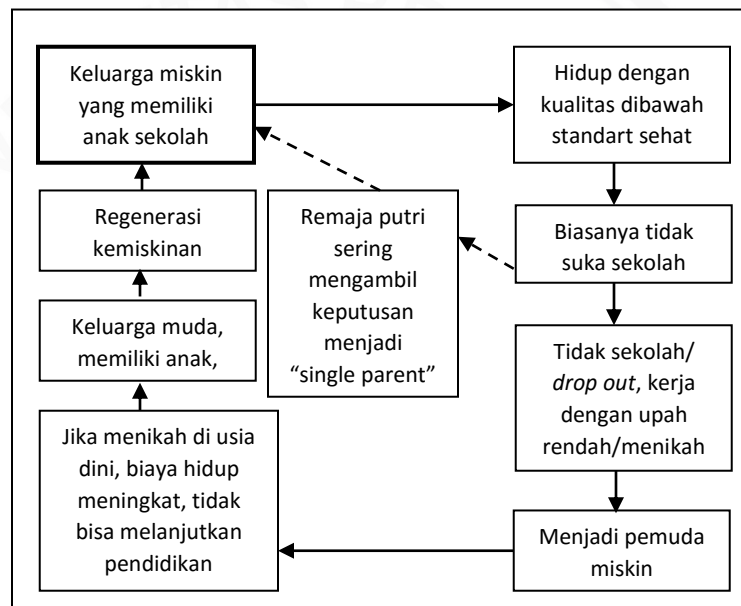
e. Sikap

Sikap yang menerima apa adanya dan kurang termotivasi untuk bekerja keras membuat mereka menjadi miskin.

Dan uraian tersebut diatas menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya kemiskinan adalah adanya faktor internal berupa kebutuhan yang segera harus terpenuhi namun tidak memiliki kemampuan yang cukup dalam berusaha mengelola sumberdaya yang dimiliki (keterampilan tidak memadai, tingkat pendidikan yang minim, dan lain-lain). Sedangkan faktor eksternal berupa bencana alam seperti halnya krisis ekonomi, serta tidak adanya pemihakan berupa kebijakan yang memberikan kesempatan dan peluang bagi masyarakat miskin.

4. Siklus Kemiskinan

Kita memahami bahwa kemiskinan tidak dengan tiba-tiba muncul, kemiskinan sudah diketahui dari mana awalnya, kemana bergerak dan bagaimana solusinya. Kemiskinan muncul karena struktur yang merugikan dan sistem kapitalisme yang memunculkan budaya miskin. Dari hal ini, muncullah siklus kemiskinan sebagaimana bisa dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 4. Siklus Kemiskinan

Sumber: Zastrow, 2007: 448

5. Bentuk dan Jenis Kemiskinan

Dimensi kemiskinan memberikan penjelasan mengenai bentuk persoalan dalam kemiskinan dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kondisi yang disebut kemiskinan. Konsep kemiskinan tersebut memperluas pandangan ilmu sosial terhadap kemiskinan yang tidak hanya sekedar kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok, akan tetapi kondisi ketidakberdayaan sebagai akibat rendahnya kualitas kesehatan dan pendidikan, rendahnya kualitas kesehatan dan pendidikan, rendahnya perlakuan hukum, kerentanan terhadap tindak kejahatan (kriminal), resiko mendapatkan perlakuan negatif secara politik, dan terutama ketidakberdayaan dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan sendiri.

Berdasarkan kondisi kemiskinan yang dipandang sebagai bentuk permasalahan multidimensial, kemiskinan memiliki 4 bentuk. Adapun keempat bentuk kemiskinan tersebut adalah:

1) Kemiskinan Absolut

Menurut Baldock et.al (2009:45) kemiskinan absolut adalah suatu kondisi dimana pendapatan seseorang atau kelompok orang berada dibawah garis kemiskinan sehingga kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sekunder untuk pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan

kualitas hidup. Garis kemiskinan diartikan sebagai pengeluaran rata-rata atau konsumsi rata-rata untuk kebutuhan pokok berkaitan dengan pemenuhan standar kesejahteraan. Bentuk kemiskinan absolut ini paling banyak dipakai sebagai konsep untuk menentukan atau mendefinisikan kriteria seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin.

2) Kemiskinan Relatif (*Relative Poverty*)

Menurut Haughton et.al., (2009:45), kemiskinan relatif diartikan sebagai bentuk kemiskinan yang terjadi karena adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau keseluruhan lapisan masyarakat sehingga menyebabkan adanya ketimpangan pendapatan atau ketimpangan standar kesejahteraan. Daerah-daerah yang belum terjangkau oleh program-program pembangunan seperti ini umumnya dikenal dengan istilah daerah tertinggal.

3) Kemiskinan Kultural (*The Culture of Poverty*)

Haughton et.al. (2009:43), kemiskinan kultural adalah bentuk kemiskinan yang terjadi sebagai akibat adanya sikap dan kebiasaan seseorang atau masyarakat yang umumnya berasal dari budaya atau adat istiadat yang relatif tidak mau untuk memperbaiki taraf hidup dengan tata cara modern. Kebiasaan seperti ini dapat berupa sikap

malas, pemboros atau tidak pernah hemat, kurang kreatif dan relatif pula bergantung pada pihak lain.

4) Kemiskinan Struktural

Menurut Haughton et.al., (2009:45), kemiskinan struktural adalah bentuk kemiskinan yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang pada umumnya terjadi pada suatu tatanan sosial ataupun sosial politik yang kurang mendukung adanya pembebasan kemiskinan. Bentuk kemiskinan seperti ini juga terkadang memiliki unsur diskriminatif.

Bentuk kemiskinan struktural adalah bentuk kemiskinan yang paling banyak mendapatkan perhatian dibidang ilmu sosial terutama dikalangan negara-negara pemberi bantuan seperti Bank Dunia, IMF dan Bank Pembangunan Asia. Setelah dikenal bentuk kemiskinan, dikenal pula dengan jenis kemiskinan berdasarkan sifatnya. Adapun jenis kemiskinan berdasarkan sifatnya menurut Jarnasy (2004:8-9) adalah:

a. Kemiskinan Alamiah

Kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang terbentuk sebagai akibat adanya kelangkaan sumber daya alam dan minimnya atau ketiadaan prasarana umum (jalan raya listrik dan air bersih) dan keadaan tanah yang kurang subur. Daerah-daerah dengan karakteristik tersebut pada umumnya adalah daerah yang belum terjangkau oleh kebijakan pembangunan sehingga menjadi daerah tertinggal.

b. Kemiskinan Buatan

Kemiskinan buatan adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh sistem modernisasi atau pembangunan yang menyebabkan masyarakat tidak memiliki banyak kesempatan untuk menguasai sumber daya, sarana dan fasilitas ekonomi secara merata. Kemiskinan seperti ini adalah dampak negatif dari pelaksanaan konsep pembangunan yang umumnya dijalankan di negara-negara sedang berkembang. Sasaran untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi tinggi mengakibatkan tidak meratanya pembagian hasil-hasil pembangunan dimana sektor industri misalnya lebih menikmati tingkat keuntungan dibandingkan mereka yang bekerja disektor pertanian.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan secara umum bahwa kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang timbul sebagai akibat sumber daya yang langka jumlahnya dan atau karena tingkat perkembangan teknologi yang sangat rendah. Sedangkan kemiskinan buatan yaitu kemiskinan yang terjadi karena struktur sosial yang ada membuat anggota atau kelompok masyarakat tidak menguasai sarana ekonomi dan fasilitas-fasilitas anggota masyarakat dari kemiskinan.

6. Pengertian Penanggulangan Kemiskinan

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah yang dilakukan secara sistematis,

terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Sedangkan program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta pemberdayaan usaha ekonomi mikro/kecil.

7. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

Menurut Suryono (2004: 105) terdapat beberapa kebijakan yang diperlukan dalam upaya penanggulangan kemiskinan, antara lain:

- a. Kebijakan tidak langsung, diarahkan pada penciptaan kondisi yang menjamin kelangsungan setiap upaya penanggulangan kemiskinan.
- b. Kebijakan langsung, ditujukan kepada golongan masyarakat berpenghasilan rendah.
- c. Kebijakan khusus, untuk mempersiapkan masyarakat miskin itu sendiri dan aparat yang bertanggung jawab langsung terhadap kelancaran program, sekaligus memacu dan memperluas upaya untuk menanggulangi kemiskinan.

Berdasarkan dari pendapat Suryono dapat disimpulkan bahwa meskipun kebijakan yang diambil adalah kebijakan langsung, tidak langsung maupun khusus, dalam kaitan ini ketiganya harus dilakukan penyusunan perencanaan, pemilihan prioritas dan perumusan strategi

pelaksanaan penanggulangan kemiskinan harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan didaerahnya serta berbagai kelompok miskin berdasarkan strata sosial ekonominya. Hal ini merupakan tantangan berat bagi para perencana dan pembuat kebijakan dan aspirasi daerah serta untuk memfasilitasi penanggulangan kemiskinan ditingkat daerah.

C. Teori Gerakan Sosial

1. Pengertian Gerakan Sosial

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gerakan sosial adalah tindakan atau agitasi terencana yang dilakukan sekelompok masyarakat yang disertai program dan ditunjukkan pada suatu perubahan atau sebagai gerakan perlawanan untuk melestarikan pola-pola dan lembaga masyarakat yang ada. Dalam sosiologi gerakan tersebut di atas diklarifikasikan sebagai suatu bentuk perilaku kolektif tertentu yang diberi nama gerakan sosial. Sejumlah ahli sosiologi menekankan pada segi kolektif dan gerakan sosial ini, sedangkan diantara mereka ada pula yang menambahkan segi kesengajaan, organisasi dan berkesinambungan.

Seperti menurut Situmorang (2007) yaitu sebagai sebuah aksi kolektif, umur gerakan sosial tentu sama tuanya dengan perkembangan peradapan manusia. Perubahan suatu peradaban ke peradaban lain tidaklah selalu melalui jalan damai bahkan sejarah membuktikan perubahan

peradaban masyarakat kerap terjadi melalui gerakan-gerakan kolektif atau yang lebih dikenal dengan gerakan sosial sekarang ini.

Beragam pendapat yang dilahirkan oleh para ahli tentang gerakan sosial pada dasarnya dapat dipilah dalam klasifikasi tradisi teoristik dari studi tentang gerakan sosial yang meliputi (Mirsal, 2004:7) :

- a. Klasik
Meliputi studi perilaku kolektif dari kerumunan (*crowd*), kerusuhan (*riot*) dan pemberontakan (*rebel*) yang banyak dilakukan oleh teoritis barat yang berorientasi pada ajaran psikologi sosial klasik dan sejarawan sebelum era tahun 1950-an. Beberapa contoh karya alian ini diantaranya *G. Tarde's Laws of Imitation* (1903), *Gustave Le Bons's The Crowd* (1909), *William McDougall's The Group Mind* (1920) dan *E.D. Martin's The Behaviour of Croud* (1929) yang didasarkan pada studi tentang perilaku kolektif.
- b. Neo Klasik
Aliran ini dihubungkan dengan tradisi utama dalam studi gerakan sosial lama, yang kebanyakan dipublikasikan setelah tahun 1950-an. Tradisi ini dibagi lagi dalam dua model studi gerakan lama yang berbeda, yaitu fungsionalis dan model dialektika Marxis.
- c. Kontemporer atau Gerakan Sosial Baru (GSB)
Tidak sebagaimana gerakan sosial lama (klasik dan neo klasik). Orientasi GSB tidak meliputi diskursus ideologi yang mempertanyakan anti kapitalisme, revolusi kelas dan perjuangan kelas. Pada dasarnya GSB tidak tertarik untuk mempertanyakan ide revolusi. Paradigma ideologi dan orientasi GSB adalah sesuatu yang baru. GSB lebih menonjolkan pluralitas yang ditunjukkan secara beragam melalui isu anti rasis, anti nuklir, pelucutan senjata, feminisme, lingkungan, regionalisme dan etnisitas, kemerdekaan sipil, kebebasan individu dan perdamaian.

Dari pendapat para ahli diatas disimpulkan bahwa gerakan sosial lahir dari situasi dalam masyarakat karena adanya ketidakadilan dan sikap sewenang-wenang terhadap masyarakat. Dengan kata lain, gerakan sosial

lahir dari raksi terhadap sesuatu yang tidak diinginkan rakyat atau menginginkan perubahan kebijakan karena dinilai tidak adil. Gerakan secara ini merupakan gerakan yang lahir dari prakarsa masyarakat dalam menuntut perubahan dalam institusi, kebijakan atau struktur pemerintahan. Disini terlihat tuntutan perubahan itu lahir karena melihat kebijakan yang ada tidak sesuai dengan konteks masyarakat yang ada maupun bertentangan dengan kepentingan masyarakat secara umum.

2. Jenis-jenis Gerakan Sosial

Menurut Putra dkk (2006:3) gerakan sosial memiliki beberapa jenis, yaitu:

- a. Gerakan perpindahan (*migratory movement*), yaitu arus perpindahan ke suatu tempat yang baru. Individu-individu dalam jenis gerakan ini umumnya tidak puas dengan keadaan sekarang dan bermigrasi dengan harapan memperoleh masa depan lebih baik.
- b. Gerakan ekspresif (*expresive movement*), yaitu tindakan penduduk untuk mengubah sikap mereka sendiri dan bukan mengubah masyarakat. Individu-individu dalam jenis gerakan ini sebenarnya hanya merubah persepsi mereka terhadap lingkungan luar yang kurang menyenangkan dari pada mengubah kondisi luar itu sendiri.
- c. Gerakan utopia (*utopian movement*), yaitu gerakan yang bertujuan menciptakan lingkungan sosial ideal yang dihuni atau upaya menciptakan masyarakat sejahtera yang berskala kecil.
- d. Gerakan reformasi (*reform movement*), yaitu gerakan yang berupa memperbaiki beberapa kepincangan atau aspek tertentu dalam masyarakat tanpa memperbarui secara keseluruhan.
- e. Gerakan revolusioner (*revolutionary movement*), yaitu gerakan sosial yang melibatkan masyarakat secara tepat dan drastis dengan tujuan mengganti sistem yang ada dengan sistem baru.
- f. Gerakan regresif (*reaksioner*), yaitu gerakan yang berusaha untuk mengembalikan keadaan kepada kedudukan sebelumnya. Para individu

yang bergabung dalam gerakan ini adalah orang-orang yang kecewa terhadap kecenderungan sosial yang sedang berjalan.

- g. Gerakan Perlawanan (*resistance movement*) yaitu gerakan yang berusaha melawan perubahan sosial tertentu.
- h. Gerakan progresif (*progressive movement*) yaitu gerakan yang bertujuan memperbaiki masyarakat dengan cara mengadakan perubahan-perubahan positif pada lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi.
- i. Gerakan konservatif (*conservative movement*), yaitu gerakan yang berusaha menjaga agar masyarakat tidak berubah. Individu-individu yang mendukung gerakan ini menganggap bahwa kedudukan masyarakat pada saat sekarang sebagai kedudukan yang paling menyenangkan.

Sedangkan dalam pembahasan yang dikemukakan dalam tulisan ini berdasarkan hasil temuan data lapangan yang berhasil peneliti temukan, dari beberapa jenis gerakan sosial diatas dalam gerakan sosial yang dilakukan oleh peneliti adalah termasuk jenis gerakan progresif, yang bertujuan memperbaiki masyarakat dengan cara mengadakan perubahan-perubahan positif pada lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi. Jadi gerakan revolusioner ini melibatkan *stakeholder* secara tepat yakni lembaga-lembaga dan tokoh masyarakat yang kompeten serta memperbaiki sistem yang ada dengan sistem yang baru.

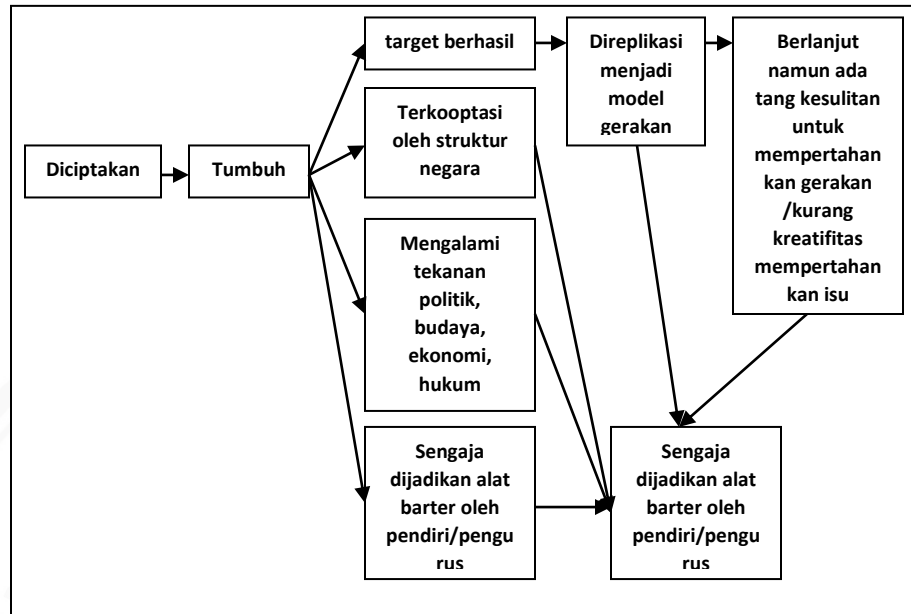
3. Siklus Gerakan Sosial

Gerakan sosial tidak selamanya hidup dan melakukan aktifitas-aktifitas gerakan sosial. Namun, proses gerakan sosial mempunyai siklus tersendiri yaitu adanya upaya-upaya penciptaan gerakan sosial. Upaya penciptaan ini penting dilakukan karena dari sinilah gerakan sosial dimulai. Penciptaan gerakan sosial tidak bisa dilakukan secara serta merta

dengan cara mengajak kelompok masyarakat untuk bergerak. Diperlukan proses pengelaborasi masalah yang dihadapi kepada seluruh anggota atau komunitas yang ada. Dalam sebuah metode pengorganisasian, pengelaborasi masalah diperlukan agar seluruh anggota kelompok atau individu yang tergabung didalamnya mengetahui dan memahami latar belakang gerakan sosial, struktur dampak masalah maupun strategi penanganannya.

Menurut Zuhro (2012:90-91) dalam membangun gerakan sosial poin penting yang perlu diperhatikan antara lain: sebab-sebab munculnya gerakan, tujuan yang ingin dicapai, bentuk-bentuk gerakan dan pelaku gerakan yang akan dipilih. Selain beberapa hal tersebut, hal lain yang tidak kalah penting adalah nilai-nilai yang dianut oleh gerakan sosial. Hal itu penting karena nilai akan menjadi ruh dalam menjalankan agenda gerakan sosial.

Siklus dalam gerakan sosial terutama yang terjadi di Indonesia baik dalam skala besar atau nasional maupun dalam skala kecil atau yang berada di daerah-daerah secara singkat dapat dilihat pada bagan dibawah ini:



Gambar 5. Siklus Gerakan Sosial

Sumber : Siti Zuhro (2012:92)

Melihat dari bagan di atas dapat dijelaskan bahwa proses gerakan dimunculkan atau diciptakan selanjutnya diperlukan pula upaya pembangunan lingkungan sosial yang dapat menumbuhkan gerakan sosial. Pertumbuhan gerakan sosial selalu dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal, untuk tetap menjaga pengorganisasian dan faktor eksternal yaitu pengaruh informasi dari luar kelompok. Jika hal ini tetap terjaga dengan baik maka fase berikutnya adalah melihat efektifitas gerakan sosial. Pada fase ini, gerakan sosial yang telah mampu memenuhi target, disiarkan atau diduplikasikan oleh kelompok-kelompok yang lain.

Meskipun demikian, ada saja kelompok yang terengah-engah dalam menjaga kondisi dan staminanya agar tetap eksis. Biasanya ada pula kelompok mengalami penurunan stamina atau semangat yang kemudian berujung pada kematian gerakan sosial. Pada fase ini ada juga kelompok yang mengalami stagnasi karena terkooptasi oleh struktur-struktur negara atau penguasa negara, politisi maupun pelaku ekonomi. Pada fase ini pula tidak sedikit kelompok yang mati karena mendapat tekanan baik secara politik, sosial-budaya, ekonomi maupun melalui perangkat hukum yaitu peraturan maupun penertipan hukum kerana dianggap tidak sesuai dengan kepentingan negara.

4. Tahap-Tahap Gerakan Sosial

Pola perkembangan gerakan sosial tidaklah sama, namun semua gerakan sosial dimulai dari suatu keadaan krisis, lalu mengalami perkembangan dalam berbagai tingkat dan kemudian lenyap atau melembaga. Menurut Putra (2006:27), kebanyakan gerakan sosial melewati tahap-tahap berikut:

- a. Tahap Kegelisahan
Dalam tahap ini terjadi ketidak puasan akibat pergolakan sistem yang kurang baik. Tahap ini bisa meluas dan berlangsung selama beberapa tahun.
- b. Tahap kegusaran.
Setelah perhatian dipusatkan pada kondisi-kondisi yang menimbulkan kegelisahan, maka terhimpun sebuah kolektivitas.

Kegelisahan yang muncul dalam kolektivitas ini digerakkan oleh para agitator atau pemimpin.

c. Tahap formalisasi.

Dalam tahap ini, tidak tampak adanya struktur formal yang terorganisir yang dilengkapi dengan hierarki petugas-petugas. Salah satu tugas penting adalah menjelaskan ideologi gerakan kepada anggota yang telah bersatu. Sebab-sebab terjadinya ketidakpuasan, rencana aksi dan sasaran-sasaran gerakan.

d. Tahap pelebagaan.

Jika gerakan tersebut berhasil menarik banyak pengikut dan dapat memenangkan dukungan publik, akhirnya akan terjadi pelebagaan. Selama tahap ini, ditetapkan suatu birokrasi dan kepemimpinan yang profesional yang disiplin mengganti figur-figur kharimatik sebelumnya.

Dalam penjelasan diatas dapat disimpulkan mengenai munculnya gerakan sosial pasti tidak muncul begitu saja, akan tetapi ada beberapa tahapan yang melatar belakangi timbulnya gerakan sosial. Dan tahapan gerakan sosial yang dikemukakan oleh Putra yaitu dimulai dengan tahap kegelisahan, tahap kekusaran, tahap formalisasi dan tahap pelebagaan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono (2012) metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian memiliki peranan dalam sebuah penelitian yaitu untuk mendapatkan data dan informasi yang mempunyai relevansi dengan masalah yang diteliti. Oleh karena itu, metode penelitian mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan arah kegiatan dan memudahkan dalam pencapaian tujuan. Jenis-jenis penelitian dapat digolongkan menjadi tiga, yakni:

1. Pertama adalah penelitian eksplanasi, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk menemukan dan mengembangkan teori;
2. Kedua adalah penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk melukiskan atau menggambarkan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti;
3. Ketiga adalah penelitian eksplorasi, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan sebagai upaya eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial.

Berdasarkan pemaparan permasalahan pada latar belakang, maka jenis penelitian yang sesuai untuk dipakai dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dan pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Sesuai dengan yang dinyatakan oleh Mathew B. Miles dan Michael Huberman (2014) bahwa:

“analisis data deskriptif adalah data yang muncul berupa kata-kata dan bukan merupakan rangkaian angka. Data itu mungkin telah

dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari, dokumen, pita rekaman) dan bila diproses kira-kira sebelum digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alat-alat tulis), tetapi kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperlukan”.

Menurut Moleong (2014:6) mengatakan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Maka peneliti beranggapan bahwa penggunaan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif ini merupakan hal yang paling tepat untuk menjangkau permasalahan secara mendalam yang sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian. Pada penelitian ini, peneliti berupaya untuk mengumpulkan informasi, mendiskripsikan analisis tentang program Pemerintah Kabupaten Trenggalek tentang Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan (GERTAK) dalam upaya pengentasan masalah kemiskinan, khususnya implementator tersebut adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek, yang memiliki konsen terhadap permasalahan kemiskinan di daerahnya.

B. Fokus Penelitian

Penentuan fokus penelitian bertujuan untuk menentukan objek perhatian menjadi terpusta dan membatasi objek tujuan untuk diteliti. Spradley dalam Sugiyono (2012:34) mengatakan bahwa fokus merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Pemilihan fokus dalam penelitian kualitatif didasarkan pada tingkat kebaruan

informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan) dalam berupaya untuk memahami secara lebih luas dan mendalam serta timbulnya hipotesis dalam sosial yang diteliti.

Luasnya masalah dalam suatu penelitian kualitatif mengharuskan peneliti untuk menentukan fokus penelitian agar dapat membatasi masalah yang akan diteliti. Fokus penelitian menyatakan pokok permasalahan yang dijadikan sebagai pusat perhatian atau tujuan dalam penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus kajian dalam penelitian adalah :

1. Implementasi program Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan (GERTAK) dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Trenggalek:
 - a. Organisasi Pelaksana
 - b. Sumber Pembiayaan
 - c. Kelompok Sasaran
 - d. Lima Strategi Implementasi Program GERTAK
2. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi program Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan (GERTAK) dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Trenggalek.
 - a. Faktor yang mendukung implementasi Program GERTAK
 - b. Faktor yang menghambat implementasi Program GERTAK

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang akan dijadikan oleh peneliti dalam memperoleh data primer sehingga dengan ditetapkannya lokasi penelitian maka objek penelitian sudah ditetapkan sehingga akan mempermudah peneliti melakukan penelitian. Dalam penelitian ini lokasi penelitian berada di Kabupaten Trenggalek. Sedangkan situs penelitian yang dipilih adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek dan Posko Gertak. Alasan dan pertimbangan dalam pemilihan lokasi dan situs penelitian ini dikarenakan gagasan dari Pemerintah Kabupaten Trenggalek mengenai pengentasan kesejahteraan sosial merupakan gagasan yang telah meraih penghargaan “*Wow Service Excellence*” dari konsultan pemasaran terkemuka Mark Plus besutan pakar *marketing* Hermawan Kertajaya dan mendapat apresiasi khusus dari Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa atas inovasi program gertak ini sebagai upaya optimalisasi pelayanan publik di bidang kesejahteraan sosial. Dari situs inilah peneliti mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan program layanan penanggulangan masalah kemiskinan.

D. Jenis Data dan Sumber Data

Keberadaan suatu jenis sumber data sangat diperlukan penulis dalam penelitiannya, karena sumber data digunakan penulis untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Adapun jenis sumber data dalam penelitian ini diantaranya :

1. Data Primer

Merupakan data asli yang memuat atau data yang langsung diperoleh dari informasi. Dalam penelitian kualitatif, peneliti menggunakan metode wawancara dalam pengumpulan data primer dan sumber data dalam penelitian ini dinamakan sebagai informasi atau melalui kunjungan langsung ke lokasi ataupun situs penelitian. Pada penelitian ini, yang menjadi sumber data primer peneliti adalah :

- 1) Ibu Aris Majeng Wahyu Prasiska selaku bagian operasional Posko GERTAK
- 2) Ibu Welly Cyndy Pritaningrum selaku bagian operasional Posko GERTAK
- 3) Bapak Wildan Akbar Taufiq selaku bagian operasional Posko GERTAK
- 4) Bapak Supriyanto selaku bagian operasional Posko GERTAK
- 5) Ali Mustofa selaku staff dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Trenggalek
- 6) Akbar Novianto selaku Kasi Penanganan Fakir Miskin
- 7) Mas Sofyan selaku *task force* Posko GERTAK
- 8) Mas Riyanto selaku penerima bantuan
- 9) Mas Rohmat selaku penerima bantuan.

2. Data Sekunder

Sedangkan data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh peneliti melalui dokumen, laporan-laporan dan sumber lainnya yang relevan dengan penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah :

- 1) Dokumen Posko GERTAK (Gerakan Tongkuk Bawah Masalah Kemiskinan) Kabupaten Trenggalek
- 2) Surat Keputusan Bupati Trenggalek tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Trenggalek
- 3) Video terkait Program GERTAK
- 4) Data fasilitas yang diberikan BAZNAS Kabupaten Trenggalek
- 5) Jurnal GERTAK edisi 2 (dua)
- 6) Berita-berita tentang GERTAK (Gerakan Tongkuk Bawah Masalah Kemiskinan) Kabupaten Trenggalek

Menurut Arikunto (2010: 45) mengatakan bahwa sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Oleh karena itu, peneliti diharapkan mampu mengumpulkan data keseluruhan, baik apa saja dan siapa saja yang relevan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian hal ini peneliti membagi sumber data sebagai berikut :

1. Informasi, penelitian dalam menentukan informasi pada awalnya dengan melakukan pengamatan atau prariset terlebih dahulu.

Kemudian, peneliti dapat memilih informasi secara *purposive* (bertujuan). Informan dapat dikatakan sebagai pihak yang memiliki informasi yang menguasai informasi serta yang bersedia juga untuk memberikan informasi bagi peneliti. Dalam hal ini, peneliti berperan untuk menentukan kata kunci dalam menemukan serta mengumpulkan informasi yang relevan serta melihat pemahaman informan terhadap apa yang diteliti dalam mendukung penelitian yang dilakukan.

2. Dokumen, merupakan teknik dokumentasi yang digunakan untuk memperoleh dan melalui bahan-bahan tertulis seperti peraturan ataupun kebijakan-kebijakan yang berkaitan atau relevan dengan program pengentasan kemiskinan serta implementasinya dalam mensejahterakan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah maupun pihak lainnya.
3. Tempat dan peristiwa, yaitu segala sesuatu yang dijadikan sebagai sumber tambahan baik melalui observasi langsung yang berkaitan dengan proses implementasi program Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan (GERTAK) di Kabupaten Trenggalek.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang digunakan untuk mengumpulkan berbagai data informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

Menurut Arikunto (2010:135), adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi yaitu peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke tempat penelitian untuk mengamati fenomena guna memperoleh informasi untuk menunjang dan memperoleh data penelitian. Dalam penelitian ini, objek yang di observasi adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek dan posko gertak. Proses observasi ini dilakukan sebanyak 1 kali dalam seminggu dalam waktu 2 bulan, dengan durasi 2-3 jam per observasi. Alat bantu yang digunakan dalam observasi berupa *laptop* yang digunakan untuk mencatat peristiwa-peristiwa yang mungkin menunjang dalam penelitian ini, dan juga *handphone* (HP) untuk menunjang kegiatan-kegiatan observasi.

2. Wawancara

Wawancara yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Wawancara disebut juga sebagai suatu proses interaksi dan komunikasi. Pada proses ini, hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi, yaitu pewawancara, responden, topik penelitian yang ada dalam daftar pertanyaan dan situasi wawancara. Pemilihan informan didasarkan pada subjek yang menguasai permasalahan yang diteliti, memiliki data dan

bersedia memberikan data kepada peneliti. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara di Posko Gertak. Narasumber terdiri dari :

- 1) Ibu Aris Majeng Wahyu Prasiska selaku bagian operasional Posko GERTAK
- 2) Ibu Welly Cyndy Pritaningrum selaku bagian operasional Posko GERTAK
- 3) Bapak Wildan Akbar Taufiq selaku bagian operasional Posko GERTAK
- 4) Bapak Supriyanto selaku bagian operasional Posko GERTAK
- 5) Ali Mustofa selaku staff dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Trenggalek
- 6) Akbar Novianto selaku Kasi Penanganan Fakir Miskin
- 7) Mas Sofyan selaku *task force* Posko GERTAK
- 8) Mas Riyanto selaku penerima bantuan
- 9) Mas Rohmat selaku penerima bantuan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu catatan kejadian atau peristiwa yang telah berlalu. Dokumen bisa berupa Koran, surat, gambar, ataupun tulisan lain. Menurut Creswell (2012:267), kelebihan dari metode dokumentasi antara

lain memungkinkan peneliti memperoleh bahasa dan kata-kata tekstual dari partisipan, dapat diakses kapan saja, sumber informasi yang tidak terlalu menonjol membantu peneliti menyajikan data yang berbobot, sebagai bukti tertulis dan data ini benar-benar dapat menghemat waktu peneliti dalam mentranskrip. Dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Dokumen Posko GERTAK (Gerakan Tongok Bawah Masalah Kemiskinan) Kabupaten Trenggalek
- 2) Surat Keputusan Bupati Trenggalek tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Trenggalek
- 3) Video terkait Program GERTAK
- 4) Data fasilitas yang diberikan BAZNAS Kabupaten Trenggalek
- 5) Jurnal GERTAK edisi 2 (dua)
- 6) Berita-berita tentang GERTAK (Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan) Kabupaten Trenggalek

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian. Terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas data hasil yaitu, kualitas instrumen penelitian, dan kualitas pengumpulan data. Menurut Sugiyono (2012:61) dalam penelitian kualitatif instrument utamanya

adalah peneliti sendiri, namun selanjutnya setelah fokus penelitan menjadi jelas, maka kemungkinan akan dikembangkan instrument penelitian sederhana, yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara. Peneliti akan terjun ke lapangan sendiri, baik pada *grand tour questions*, tahap *focused and selection*, melakukan pengumpulan data, analisis dan membuat kesimpulan.

Selanjutnya Nasution dalam Sugiyono (2012:60-61), menyatakan dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya bahwa, segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan dalam penelitian tersebut. Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas tersebut, tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya.

Menurut Sugiyono (2012:222) yang menjadi salah satu instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Dalam penelitian ini, instrumen penelitian yang digunakan adalah:

1. Peneliti sendiri yaitu instrumen utama dalam menangkap atau melihat fenomena secara langsung melalui wawancara. Menurut Moleong (2014:78), salah satu ciri penelitian kualitatif adalah memasukkan manusia atau peneliti sendiri sebagai alat pengumpul data utama. Hal

tersebut dikarenakan, dalam melakukan penelitian kualitatif, baik observasi maupun wawancara tidak boleh diwakilkan oleh orang lain, sehingga peneliti bisa menangkap fenomena atau kejadian yang terjadi di lapangan serta mampu menguasai data-data yang telah diperoleh di lapangan.

2. Pedoman wawancara (*interview guide*), instrumen ini berguna untuk mengarahkan dan membatasi peneliti dalam melakukan pencarian data yang diperlukan melalui wawancara yang akan dilaksanakan. Pedoman wawancara ini dibuat oleh peneliti sebelum melakukan kegiatan wawancara agar saat melakukan wawancara dengan informan, peneliti sudah mempunyai daftar pertanyaan dan data yang diinginkan serta dapat memperdalam data informasi yang telah didapatkan sebelumnya.
3. Catatan lapangan (*field note*), *voice recorder*, dan foto melalui HP, serta alat tulis. Dalam melakukan penelitian, peneliti membutuhkan catatan lapangan untuk mencatat fenomena dari objek yang diteliti, kemudian fenomena tersebut bisa direkam menggunakan *voice recorder* atau difoto menggunakan *Handphone* (HP) sebagai penunjang dan penguat dalam pengumpulan data informasi.

G. Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan dan bagian yang sangat penting dalam suatu penelitian ilmiah, karena dengan menggunakan analisis data akan memberikan pemaknaan bagi data dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir peneliti. Analisis data untuk data-data yang bersifat kualitatif dilakukan dengan cara menggambarkan data dengan kata atau kalimat yang sesuai dengan hasil data yang diperoleh. Sehingga, peneliti menggunakan model interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana. Model analisis data interaktif ini dipilih karena memberikan sistematika yang sesuai untuk peneliti dalam menganalisis data yang diperoleh. Analisis data dilakukan dengan cara mengorganisasi data yang diperoleh dari penelitian. Kemudian, data yang diperoleh tersebut dijabarkan data kedalam unit-unit, dan dilakukan analisis data untuk data yang berkaitan dengan fokus penelitian. Langkah selanjutnya yaitu menyusun atau menyajikan data yang sesuai dengan masalah penelitian dalam bentuk laporan dan membuat kesimpulan agar data yang diperoleh memiliki makna agar dipahami oleh pembaca. Dengan demikian, analisis data model interaktif menjelaskan tentang pengangkatan dan penempatan bidan secara lebih mendalam.

Menurut model analisis data Miles, Huberman, dan Saldana (2014), untuk menganalisis data hasil penelitian terdiri dari tiga tahapan dalam analisis data, yaitu:

1. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

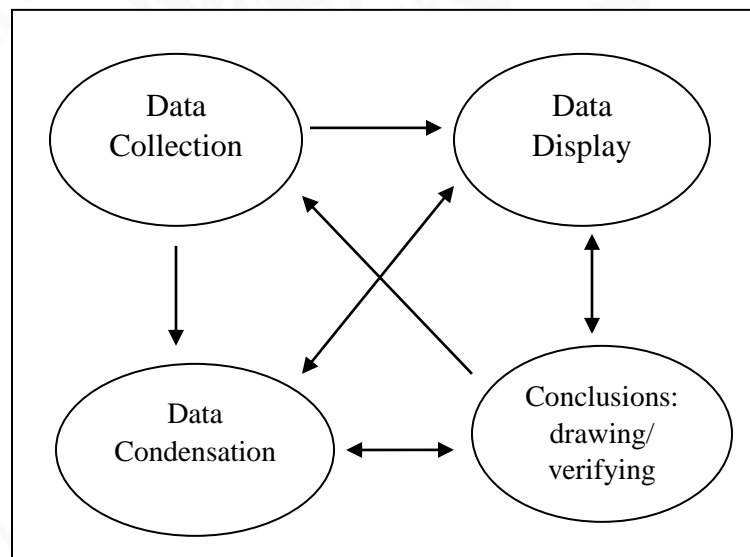
Kondensasi data merupakan proses pemilihan, penyederhaan, dan transformasi data mentah yang didapat dari lapangan. Kondensasi data dilakukan dari data yang diperoleh di lapangan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dituangkan dalam uraian atau laporan secara lengkap dan terinci. Selanjutnya, direduksi dengan cara merangkum, memilih dan memfokuskan data. Pada tahap ini, peneliti melakukan reduksi data dengan cara memilah-milah, mengkategorikan dan membuat abstraksi dari catatan lapangan, wawancara dan dokumentasi.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dilakukan setelah data selesai dikondensasi. Data yang diperoleh dianalisis kemudian disajikan dalam bentuk CW (Catatan Wawancara), CL (Catatan Lapangan) dan CD (Catatan Dokumentasi). Data yang sudah disajikan tersebut, diberi kode data untuk mengorganisasi data, sehingga peneliti dapat menganalisis dengan cepat dan mudah. Penggunaan berbagai jenis matriks, grafik, jaringan, dan bagan untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian, penulis dapat melihat apa yang sedang terjadi dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikiaskan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion Drawing/ Verification*)

Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan dari verifikasi. Berdasarkan data yang telah dikondensasi dan disajikan, peneliti membuat kesimpulan yang didukung dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data. Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah dan pertanyaan yang telah diungkapkan oleh peneliti sejak awal. Berikut ini adalah analisis data model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014):



Gambar 6: Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif

Sumber : Miles, Huberman, dan Saldana (2014: 31-33)

H. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian diperlukan untuk menguji hasil penelitian berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan selama proses penelitian, untuk melihat validitas dan reabilitas data. Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi dipilih karena dalam penelitian ini menggunakan beberapa sumber data yang berasal dari wawancara dan dokumentasi. Denzin dalam Moleong (2014) membedakan triangulasi menjadi 4 macam sebagai teknik pemeriksaan untuk mencapai keabsahan data yaitu :

1. Triangulasi data menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, data kemiskinan dan sumber lain yang mendukung penelitian.
2. Triangulasi teori yakni peneliti menggunakan berbagai teori yang bertujuan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan dalam penelitian sudah memenuhi syarat.
3. Triangulasi metode yakni menggunakan metode seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara untuk mendapatkan informasi dari beberapa informan yang mengetahui permasalahan dalam penelitian yang dilakukan dan bersedia memberikan data upaya pengentasan kemiskinan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Trenggalek

a. Keadaan Geografis

Kabupaten Trenggalek merupakan satu dari 38 (tiga puluh delapan) kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, yang terletak di Kawasan Selatan Jawa Timur (KSJT) yaitu ± 181 km sebelah barat daya dari Kota Surabaya, dengan luas wilayah $1.261,40 \text{ km}^2$ atau 126.140 Ha . Kabupaten Trenggalek merupakan Daerah yang terletak di bagian selatan dari wilayah Provinsi Jawa Timur, yang secara astronomis terletak pada $111^{\circ} 24' - 112^{\circ} 11'$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 53' - 8^{\circ} 34'$ Lintang Selatan dengan luas wilayah $1.205,22 \text{ Km}^2$. Kabupaten Trenggalek secara ketinggian tempat terdiri dari $\frac{2}{3}$ wilayah pegunungan dan $\frac{1}{3}$ lainnya merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0-690 meter diatas permukaan air laut. Dua pertiga wilayah Kabupaten Trenggalek yang merupakan kawasan pegunungan dataran rendah memiliki ketinggian antara 0 hingga diatas 100 meter diatas permukaan laut, dan ketinggian tersebut 53,8% berketinggian 100-500 m.

Kabupaten Trenggalek berada di sekitar garis khatulistiwa, maka seperti kabupaten-kabupaten lainnya di Jawa Timur yang mempunyai perubahan iklim sebanyak 2 jenis setiap tahunnya yakni musim kemarau

dan musim penghujan. Bulan September-April merupakan musim penghujan dan musim kemarau terjadi pada bulan Mei-Agustus. Adapun batas wilayah Kabupaten Trenggalek yakni adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Tulungagung dan Ponorogo
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Tulungagung
- c. Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Ponorogo dan Pacitan

Apabila dilihat pada peta, maka Kabupaten Trenggalek tergambar seperti berikut :



Gambar 7. Peta Kabupaten Trenggalek

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Trenggalek, 2016

Secara administratif Kabupaten Trenggalek dibagi menjadi 14 kecamatan, 152 desa, 5 Kelurahan, 540 dusun/lingkungan. 1.290 Rukun Warga (RW) dan 4.502 Rukun Tetangga. Persebaran kelurahan berada di Pusat Kabupaten Trenggalek. Sedangkan desa tersebar di daerah pinggiran dan perbatasan Kabupaten Trenggalek. Karakteristik geografis di Kabupaten Trenggalek dapat dibagi dalam beberapa tipologi kawasan. Dari 14 kecamatan hanya 4 kecamatan yang mayoritas desanya berupa dataran, yaitu Kecamatan Trenggalek, Kecamatan Pogalan, Kecamatan Tugu dan Kecamatan Durenan. Sedangkan 10 kecamatan lainnya mayoritas desanya berupa pegunungan. Kawasan pegunungan terletak pada kabupaten sebelah utara dan tengah yaitu Kecamatan Bendungan, Kecamatan Pule, Kecamatan Kampak dan Kecamatan Dongko. Kawasan pesisir terletak di Kecamatan Watulimo, Kecamatan Munjungan dan Kecamatan Panggul.

b. Visi dan Misi Kabupaten Trenggalek

Visi merupakan cita-cita Kabupaten Trenggalek yang ingin dicapai melalui usaha dan kinerja. Misi adalah usaha dan kinerja yang dilakukan untuk mewujudkan visi yang ditentukan. Visi Kepala Daerah Kabupaten Trenggalek Periode Tahun 2016-2021 yaitu: **“Terwujudnya Kapubaten Trenggalek yang maju, adil, sejahtera, berkepribadian,**

berlandaskan iman dan takwa". Yang setiap kata perkatanya mempunyai arti sebagai berikut:

"MAJU" berarti terwujudnya masyarakat Trenggalek yang berdaya saing dan mampu mengoptimalkan potensi daerah dengan didasari produktivitas, kreativitas dan inovasi serta menampilkan keunggulan dan prestasi;

"ADIL" berarti terwujudnya kesempatan yang sama bagi setiap masyarakat Trenggalek untuk berpartisipasi dan menikmati hasil-hasil pembangunan sesuai dengan peran dan fungsinya;

"SEJAHTERA" berarti terwujudnya masyarakat Trenggalek yang terpenuhi kebutuhan pokok/dasarnya secara lahir dan batin dalam berbagai aspek dan memiliki rasa aman, damai dan tenteram;

"BERKEPRIBADIAN" berarti terwujudnya masyarakat Trenggalek yang menjunjung identitas dan budaya yang baik, serta prinsip kebersamaan dan gotong-royong sebagai watak masyarakat Trenggalek; dan

"IMAN DAN TAKWA" berarti terwujudnya perilaku masyarakat Trenggalek yang berlandaskan pada pengalaman nilai-nilai agama sebagai karakter manusia yang berakhlak mulia.

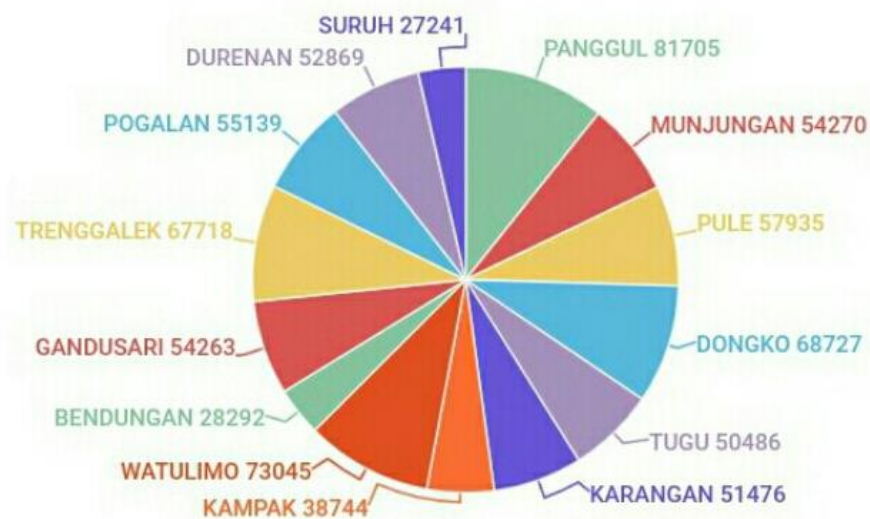
Untuk mencapai Visi yang telah digambarkan diatas maka dilaksanakan dengan 7 (tujuh) Misi yaitu :

- 1) Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, kompeten dan professional dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;
- 2) Meningkatkan pembangunan sektor pertanian serta memberikan perlindungan terhadap masyarakat untuk mewujudkan tata niaga yang adil dan menyejahterakan;
- 3) Mewujudkan peningkatan perluasan layanan infrastruktur, utamanya yang menunjang pengembangan pariwisata dan kawasan strategis;
- 4) Meningkatkan penciptaan lapangan kerja bagi SDM terdidik serta meningkatkan daya tarik investasi industri dengan memperhatikan kelestarian alam, ekonomi kerakyatan dan tatanan sosial masyarakat;
- 5) Meningkatkan pengembangan karakter masyarakat yang berkepribadian sebagai pilar pembangunan dengan berlandaskan iman dan takwa; dan
- 6) Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam masalah kemiskinan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Dari Visi Misi tersebut dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran serta targaet kinerja Kabupaten Trenggalek. Pencapaian suatu tujuan diperlukan sasaran yang tepat dan fokus pada sasaran, yaitu menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Trenggalek.

c. Keadaan Demografi

Data kependudukan sebagaimana data yang lain sangat diperlukan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan, terlebih lagi penduduk sebagai sumberdaya manusia adalah subyek sekaligus obyek pembangunan. Menurut data Dispendukcapil Kabupaten Trenggalek hasil dari registrasi penduduk pada bulan Februari tahun 2018 sebesar 761.910 jiwa. Dari jumlah seluruh penduduk tersebut sebanyak 382.097 jiwa merupakan penduduk laki-laki. Sedangkan jumlah penduduk Trenggalek sebanyak 379.813 jiwa merupakan penduduk perempuan. Hal ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 8. Jumlah Penduduk Tiap Kecamatan Bulan Februari 2018
Sumber : Dispendukcapil,2018

Adapun berdasarkan sebaran penduduk pada tahun 2018 menunjukkan bahwa Kecamatan Panggul merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar, yaitu 81.705 jiwa. Kecamatan panggul terdapat di wilayah Kabupaten Trenggalek bagian Barat, yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Pacitan. Disusul dengan Kecamatan Watulimo sebanyak 73.045 jiwa, Kecamatan Watulimo ada di wilayah selatan Kabupaten Trenggalek perbatasan dengan Samudra Hindia. Sedangkan penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Suruh. Namun jika dilihat dari kepadatannya, kecamatan Pogalan dan Trenggalek memiliki kepadatan penduduk yang tertinggi.

Jumlah penduduk mengandung dua konsekuensi bila dikaitkan dengan pembangunan, yaitu menjadi subyek dan obyek pembangunan. Sehingga dalam banyak hal besarnya penduduk merupakan potensi dan modal dasar pembangunan apabila peranan keduanya bisa diwujudkan. Kabupaten Trenggalek dengan luas wilayah 1.216.40 Km² pada Tahun 2018 menurut hasil registrasi penduduk akhir tahun sebesar 761.910 jiwa. Jumlah penduduk ini turun sebesar 1,04 persen bila dibandingkan dengan keadaan akhir tahun sebelumnya. Dari jumlah seluruh penduduk tersebut sebanyak 50,15 persen merupakan penduduk laki-laki dan 49,85 persen penduduk perempuan.

Secara administratif persebaran kelurahan berada di Pusat kabupaten Trenggalek. Sedangkan desa tersebut tersebar di daerah pinggiran dan perbatasan Kabupaten Trenggalek. Dibawah ini merupakan

data persebaran desa/kelurahan pada setiap kecamatan di Kabupaten Trenggalek.

Tabel 5. Persebaran Desa/Kelurahan, RT dan RW pada tiap Kecamatan di Kabupaten Trenggalek

NO.	KECAMATAN	DESA / KELURAHAN	RUKUN WARGA	RUKUN TETANGGA
1.	Panggul	17	155	521
2.	Tugu	15	99	322
3.	Durenan	14	78	296
4.	Trenggalek	13	72	242
5.	Watulimo	12	80	338
6.	Karangan	12	81	296
7.	Munjungan	11	66	353
8.	Gandusari	11	126	328
9.	Dongko	10	144	469
10.	Pule	10	117	378
11.	Pogalan	10	121	319
12.	Bendungan	8	64	202
13.	Kampak	7	77	249
14.	Suruh	7	40	188
Jumlah / Total		157	1.290	4.502

Sumber : Dispendukcapil,2018

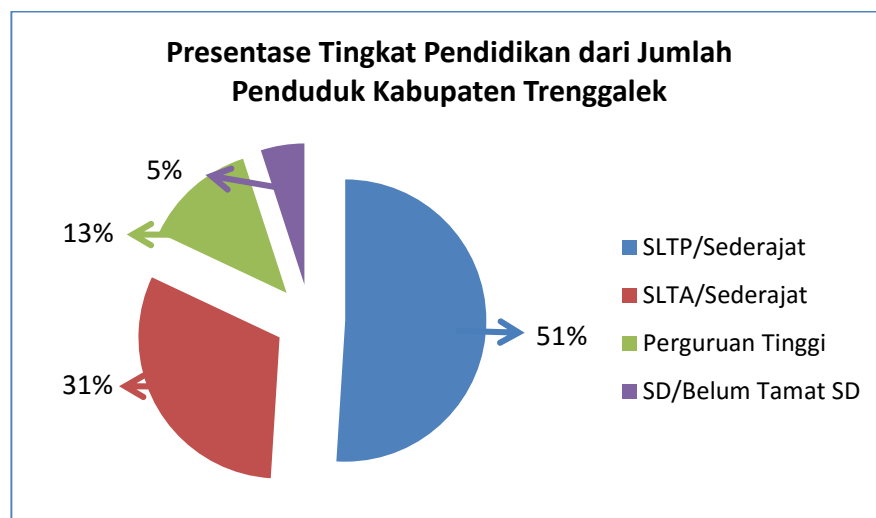
Berdasarkan tabel di atas, wilayah administratif kelurahan hanya berada di Kecamatan Trenggalek yang berada di pusat Kabupaten. Sedangkan wilayah administratif desa tersebar dalam kecamatan-kecamatan lainnya. Kecamatan dengan jumlah desa terbanyak yakni Kecamatan Panggul yaitu sebanyak 17 desa, sedangkan kecamatan dengan jumlah desa paling sedikit yakni Kecamatan Suruh dengan jumlah 7 desa saja.

Selain jumlah kelurahan dan desa, berikut merupakan jumlah Rukun Warga dan Rukun Tetangga yang ada di setiap Kecamatan di

Kabupaten Trenggalek. Berdasarkan tabel diatas terdapat 1.290 Rukun Warga dan 4.502 Rukun Tetangga yang tersebar di setiap Kecamatan di seluruh Kabupaten Trenggalek. Kecamatan dengan jumlah Rukun Warga dan Rukun Tetangga terbanyak adalah Kecamatan Panggul yakni sebanyak 155 RW dan 521 RT. Sedangkan kecamatan dengan jumlah Rukun Warga dan Rukun Tetangga paling sedikit adalah Kecamatan Suruh yakni sebanyak 40 RW dan 188 RT.

d. Tingkat Pendidikan Penduduk

Berdasarkan data dari website Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Trenggalek, pada tahun 2017 dalam dokumen TKPK, sebagian penduduk Kabupaten Trenggalek telah menyelesaikan pendidikan 9 Tahun ada pula yang tidak pernah bersekolah. Diagram dibawah ini memberikan gambaran penduduk Kabupaten Trenggalek berdasarkan tingkat pendidikannya.



Gambar 9. Presentase Tingkat Pendidikan Penduduk Kabupaten Trenggalek Tahun 2017

Sumber : Dispendukcapil, 2018

Dari diagram tersebut, penduduk yang berpendidikan SLTP/Sederajat masih mendominasi yaitu sebanyak 51%. Masih adanya penduduk di Kabupaten Trenggalek yang tidak sekolah perlu mendapatkan perhatian serius dari Pemerintahan Kabupaten Trenggalek. Data tersebut perlu dicermati lagi karena dikhawatirkan masih banyak terdapat penduduk yang tidak bersekolah tersebut tidak semuanya status “belum sekolah”. Ditakutkan dari jumlah tersebut terdapat penduduk yang kesulitan memperoleh akses terhadap dunia pendidikan sehingga memaksanya tidak bersekolah. Hal ini perlu dilakukan agar nantinya kebijakan yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek dapat berjalan dengan efektif, efisien dan tentunya harus tepat sasaran.

e. Mata Pencaharian Penduduk

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek, pada Tahun 2017 penduduk Kabupaten Trenggalek mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan. Tanaman utama pada musim penghujan adalah padi, sedangkan tanaman pada musim kemarau yaitu tembakau, jagung, kedelai, dan singkong. Buah-buahan juga banyak dihasilkan oleh petani dari daerah Trenggalek ini, diantaranya durian, salak, duku, manggis dan rambutan. Pada daerah dataran tinggi seperti Kecamatan Munjungan, Kecamatan Panggul dan Kecamatan Bendungan juga menghasilkan tanaman seperti cengkeh dan kelapa. Hasil-hasil pertanian ini rata-rata belum diolah sendiri menjadi barang yang lebih berharga melainkan di jual ke daerah lain.

Lokasi Kabupaten Trenggalek yang berbatasan langsung dengan laut menyebabkan Masyarakat Trenggalek yang hidup di sekitar perisir yakni di Kecamatan Panggul, Kecamatan Watulimo, dan Kecamatan Munjungan mayoritas berprofesi sebagai nelayan. Musim ikan di Kabupaten Trenggalek jatuh pada bulan April sampai dengan bulan Oktober sedangkan pada bulan November sampai dengan Maret merupakan musim paceklik dengan adanya hujan dan angin kencang. Hasil tangkapan utama nelayan didominasi ikan tuna, tongkol, layang, lemuru, cakalang, peperek, layur, ubur-ubur, teri, tembang, selar, kembung, kwee, dan bambangan. Tak hanya ikan laut, kegiatan perikanan budidaya air tawar juga menjadi unggulan di daerah datar yaitu di

Kecamatan Durenan, Karang, Gandusari, Kampak, Trenggalek, Tugu dan Pogalan. Usaha budidaya ini tetap didominasi oleh komoditas ikan lele, yang kemudian ikan gurame dan ikan nila. Sekitar 2.068 keluarga menggantungkan ekonominya pada perikanan laut dan 3.679 keluarga menggantungkan ekonominya pada perikanan ikan tawar.

Disamping itu mata pencaharian penduduk Kabupaten Trenggalek adalah beternak, kebanyakan dari mereka beternak ayam ras pedaging, ayam buras, dan ayam ras petelur. Selain itu ada yang beternak kambing dan itik. Peternakan sapi perah juga tidak kalah populer. Sebagian besar peternakan sapi perah berlokasi di Kecamatan Bendungan. Total sapi perah berlokasi di Kecamatan Bendungan. Total sapi perah yang ada di Trenggalek adalah sekitar 6.000 ekor. Secara keseluruhan, sebanyak 10.993.500 liter susu sapi dihasilkan setiap tahun. Selain itu sisanya berprofesi sebagai pedagang, pegawai negeri, industri, dan banyak pula yang pergi keluar negeri sebagai TKI atau merantau ke daerah lain di Indonesia untuk mencari nafkah.

2. Gambaran Umum Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)

Selain mengamanatkan pembentukan TNP2K di tingkat pusat, Perpres No. 15 tahun 2010 juga mengamanatkan pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Tim ini merupakan tim lintas sektor dan lintas pemangku-pemangku kepentingan di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan di masing-masing tingkat daerah yang bersangkutan. Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja TKPK kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 42 Tahun 2010.

TKPK memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut : Melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota); dan mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota). Keanggotaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota) terdiri dari unsur pemerintah, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan di tingkat daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota). Dalam pelaksanaannya, TKPKD diharapkan mampu :

- a) Mendorong proses perencanaan dan penganggaran sehingga menghasilkan anggaran yang efektif untuk penanggulangan kemiskinan.

- b) Melakukan koordinasi dan pemantauan program penanggulangan kemiskinan di daerah.
- c) Menyampaikan laporan hasil rapat koordinasi TKPKD, paling sedikit 3 kali setahun (pasal 25 Permendagri No.42 tahun 2010); dan hasil pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di daerah kepada Wakil Presiden selaku Ketua TNP2K (Pasal 27 Permendagri No. 42 tahun 2010)

a. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Tingkat Provinsi

Dasar pembentukan TKPK Provinsi Jawa Timur sudah menggunakan Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010, namun masih berpedoman pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 34 tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota yang merupakan penjabaran dari Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009.

Pembentukan TKPKD Provinsi Jawa Timur ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Jawa Timur, yang setiap tahun dilakukan penyempurnaan berturut-turut sebagai berikut:

- 1) Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/47/KPTS/013/2003 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa timur.
- 2) Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/47/KPTS/013/2004 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa timur.

- 3) Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/47/KPTS/013/2005 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa timur.
- 4) Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/47/KPTS/013/2006 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa timur.
- 5) Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/47/KPTS/013/2007 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa timur;
- 6) Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/47/KPTS/013/2008 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa timur;
- 7) Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/47/KPTS/013/2009 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa timur;
- 8) Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/47/KPTS/013/2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa timur;
- 9) Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/47/KPTS/013/2011 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Timur Tahun 2011;
- 10) Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/47/KPTS/013/2012 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa timur.

Memahami kompleksitas masalah kemiskinan dan kerentanan setiap proses upaya penanggulangan kemiskinan, menyadarkan kita betapa pemecahan masalah ini tidak bisa dilakukan secara sektoral, tetapi multidimensi dalam program lintas pembangunan yang menyangkut sinergitas peran pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Kebijakan penanggulangan di Jawa Timur diarahkan pada “peningkatan upaya dan efektivitas

penanggulangan kemiskinan dan pengangguran” di wilayah pedesaan maupun perkotaan dengan menghormati, melindungi dan memenuhi 11 (sebelas) hak-hak dasar masyarakat miskin yang meliputi antara lain: (1) hak atas pangan; (2) hak atas kesehatan; (3) hak atas pendidikan; (4) hak atas pekerjaan; (5) hak atas perumahan; (6) hak atas air bersih, (7) hak atas tanah; (8) hak atas lingkungan hidup dan sumber daya alam, (9) hak atas rasa aman; (10) hak atas akses partisipasi serta; (11) hak untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan publik. Sedangkan secara spesifik kebijakan penanggulangan kemiskinan diarahkan pada:

- 1) Peningkatan ketersediaan pelayanan kesehatan dan persalinan yang bermutu dan mudah terjangkau oleh keluarga miskin;
- 2) Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap perumahan, permukiman, sanitasi yang layak dan sehat, serta air bersih;
- 3) Peningkatan ketersediaan pelayanan pendidikan, formal maupun non-formal, yang bermutu dan terjangkau, serta bebas biaya bagi masyarakat miskin;
- 4) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat miskin dalam mengembangkan kemampuan kerja dan berusaha, serta melindungi keberlangsungan usaha-usaha mikro dan kecil sektor informal di perkotaan maupaun dipedesaan;
- 5) Peningkatan efisiensi produksi pangan petani dan hasil industri pengolahan dengan memperhatikan mutu produksi, serta menyempurnakan sistem penyediaan, distribusi dan harga pangan;

- 6) Peningkatan ketersediaan sarana air bersih bagi masyarakat miskin; Peningkatan reformasi pelayanan publik dalam pelayanan sertifikasi tanah kepada masyarakat miskin dengan biaya murah dan cepat;
- 7) Pengembangan sistem pengelolaan sumberdaya alam, dan lingkupan hidup yang menjamin dan melindungi akses masyarakat miskin dalam pemanfaatan sumberdaya dan lingkungan hidup secara berkelanjutan;
- 8) Pengembangan sistem perlindungan sosial para kelompok rentan seperti pekerja anak dan anak jalanan, dan mencegah meluasnya perdagangan anak dan perempuan;
- 9) Peningkatan kemampuan dan akses masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam keseluruhan tahapan pembangunan;
- 10) Pengembangan perlindungan terhadap perempuan keluarga miskin dari segala bentuk ketidakadilan gender.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam hal ini Bdan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur selaku Koordinator Kelompok Program Pemberdayaan Masyarakat dengan Dinas/Instansi terkait anggota Kelompok Program Berbasis Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/221/KPTS/013/2012 melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat dimaksudkan agar masyarakat miskin dapat keluar dari kemiskinan dengan menggunakan potensi dan sumberdaya yang dimilikinya.

Program-program pemberdayaan masyarakat di Provinsi Jawa Timur telah di desain untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat agar mereka terlihat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat sehingga dapat meningkatkan pendapatan mereka dan keluar dari garis kemiskinan. Adapun karakteristik program-program berbasis pemberdayaan masyarakat yaitu:

- 1) Menggunakan pendekatan partisipatif;
- 2) Penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat;
- 3) Pelaksanaan berkelompok secara swakelola dan berkelompok;
- 4) Perencanaan pembangunan yang berkelanjutan.

Pencantuman kebutuhan akan adanya kelembagaan koordinasi dan pengendalian penanggulangan kemiskinan dalam dokumen SPKD sangat penting dalam mengoperasionalkan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan melalui sistem birokrasi yang ada. Dengan adanya informasi mengenai kebutuhan kelembagaan dalam SPKD akan memudahkan TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mengimplementasi kebijakan dan program serta pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di daerah. Dalam rangka melaksanakan percepatan penanggulangan kemiskinan Bupati membentuk TKPKD. TKPKD mempunyai 3 (tiga) tingkat, terdiri atas TKPKD Kabupaten; TKPK Kecamatan; dan TPK Desa/Kelurahan. Hubungan antar tingkatan yang dimulai dari Kabupaten, Kecamatan dan Desa bersifat koordinatif. Kelembagaan organisasi TKPKD sebagaimana dimaksud dapat dijabarkan pada sub bab berikut.

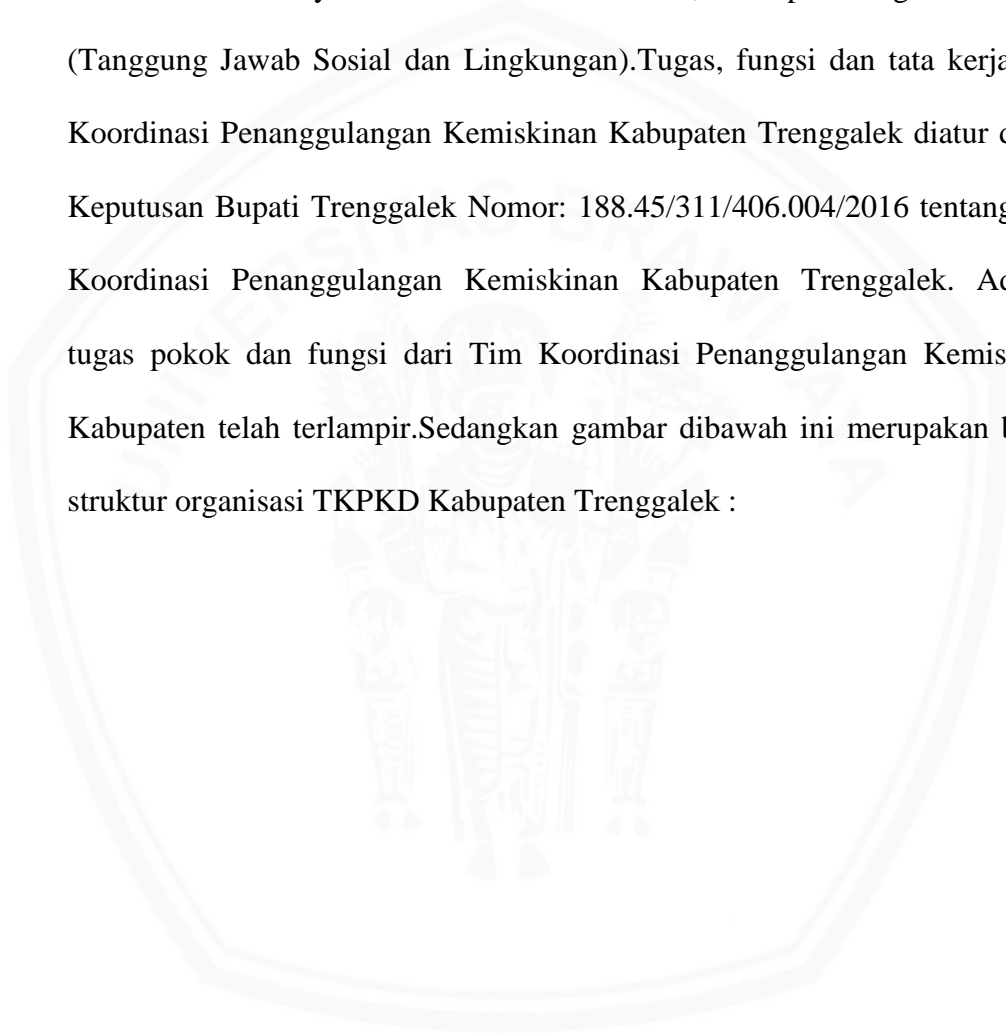
**b. Tim Koordinasi Penanggulangan kemiskinan (TKPK)
Kabupaten/Kota**

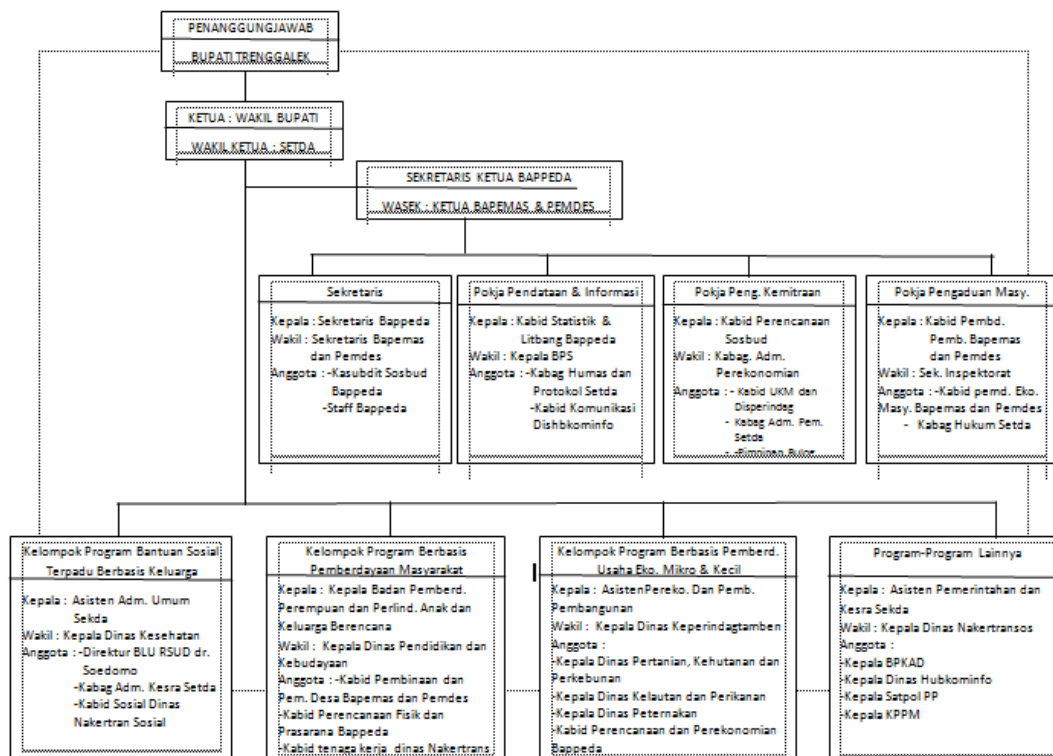
Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kabupaten/Kota Bab I Pasal 1 ayat 2 yang dimaksud dengan program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa timur Kabupaten/Kota Pasal 1 ayat 9, menyatakan bahwa Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/kota yang selanjutnya disebut TKPK Kabupaten/Kota adalah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten/Kota.

Dalam bab II tentang Penanggulangan Kemiskinan Bagian Kesatu yang meliputi tanggung jawab pada pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa Bupati/Walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten/Kota. TKPKD Kabupaten berkedudukan di lingkup Kabupaten yang terdiri atas TKPKD Kabupaten terdiri atas unsur Pimpinan yaitu Pembina, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris. Secara Operasional Posko Gertak memiliki Sekretariat yang bertempat

menjadi satu Sekretariat bersama SDG's. Pada Unit teknis langsung terdiri dari empat kelompok yaitu Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga; Kelompok Program Penanggulangan kemiskinan berbasis Pemberdayaan Masyarakat; Kelompok Program Penanggulangan kemiskinan berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro; Kelompok Program Lainnya (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan). Tugas, fungsi dan tata kerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Trenggalek diatur dalam Keputusan Bupati Trenggalek Nomor: 188.45/311/406.004/2016 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Trenggalek. Adapun tugas pokok dan fungsi dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten telah terlampir. Sedangkan gambar dibawah ini merupakan bagan struktur organisasi TKPKD Kabupaten Trenggalek :





Gambar 10. Bagan Struktur Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kab. Trenggalek

Sumber : Data sekunder diolah peneliti

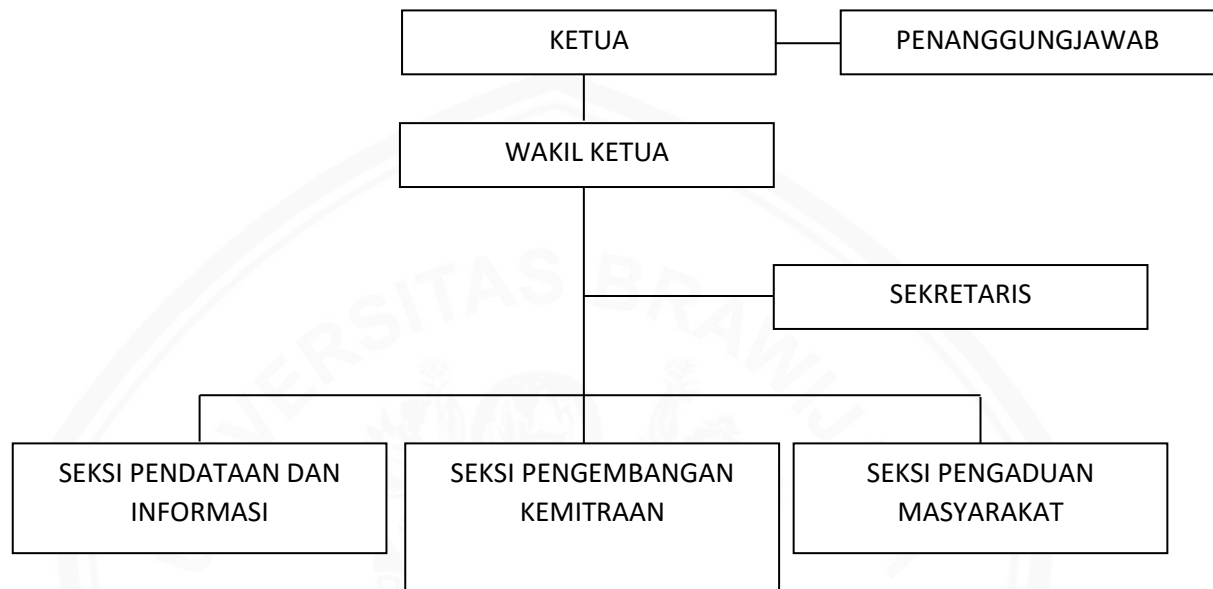
c. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)**Tingkat Kecamatan**

TKPK Kecamatan berkedudukan di Kecamatan dibawah koordinasi langsung TKPKD Kabupaten. Susunan Kelembagaan TKPK Kecamatan terdiri dari Penanggungjawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Seksi Pendataan dan Informasi, Seksi Pengembangan Kemitraan, dan Seksi Pengaduan Masyarakat. TKPK Kecamatan terdiri atas unsur-unsur :

- a. Lembaga Swadaya Masyarakat antara lain forum Badan Koordinasi Masyarakat (BKM), Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), pendamping PKH, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, penggerak PKK, Forum Anak, dan lain-lain;
- b. Lembaga Pendidikan antara lain Perguruan Tinggi, Pesantren, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Lembaga Pendidikan Ketrampilan;
- c. Dunia usaha antara lain pabrik, distributor, toko besar, industri rumah tangga, industri kerajinan/ekonomi kreatif, usaha pertambangan, usaha agribisnis, usaha peternakan, usaha perikanan, bank, koperasi, bengkel, notaris, HIPMI, penyedia jasa konstruksi, dan lain-lain; dan

Unit kerja Perangkat Daerah di wilayah Kecamatan antar lain Seksi Kesejahteraan Rakyat pada Kecamatan, Kantor Urusan Agama, Petugas Penyuluh Lapangan, Puskesmas, Petugas Lapangan Keluarga Berencana, dan

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Dasar. Sedangkan gambar dibawah ini merupakan bagan struktur organisasi TKPKD tingkat kecamatan:



Gambar 11. Bagan Struktur Organisasi TKPKD tingkat kecamatan

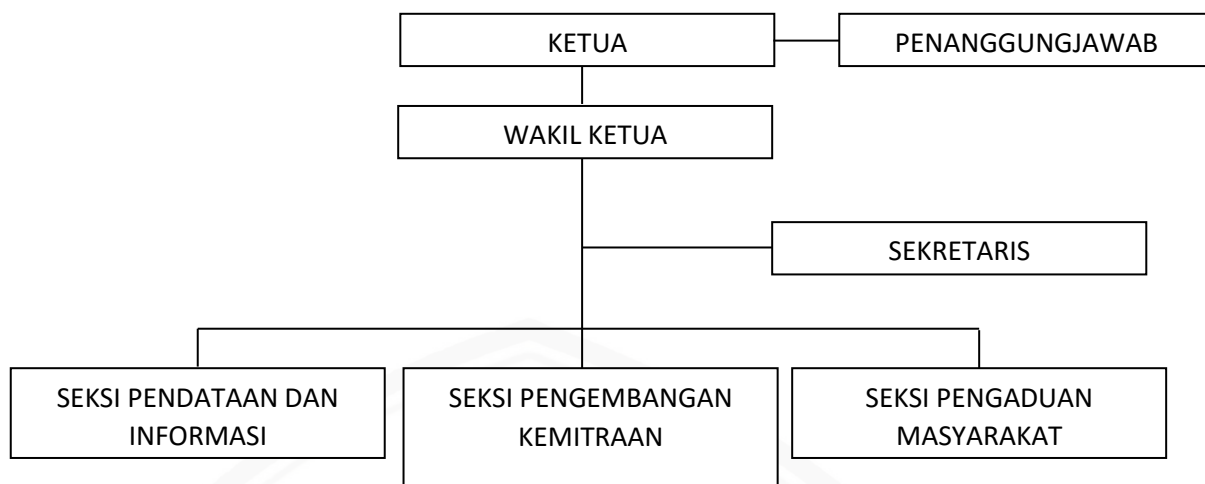
Sumber : Dokumentasi Posko GERTAK

d. Tim Penanggulangan Kemiskinan (TPK) Desa

TPK Desa/Kelurahan berkedudukan di Desa/Kelurahan secara operasional dibawah koordinasi langsung TKPK Kecamatan. Susunan TPK Desa/Kelurahan terdiri dari Penanggungjawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Seksi Pendataan dan Informasi, Seksi Pengembangan Kemitraan, dan Seksi Pengaduan Masyarakat. TPK Desa/Kelurahan terdiri atas unsur - unsur :

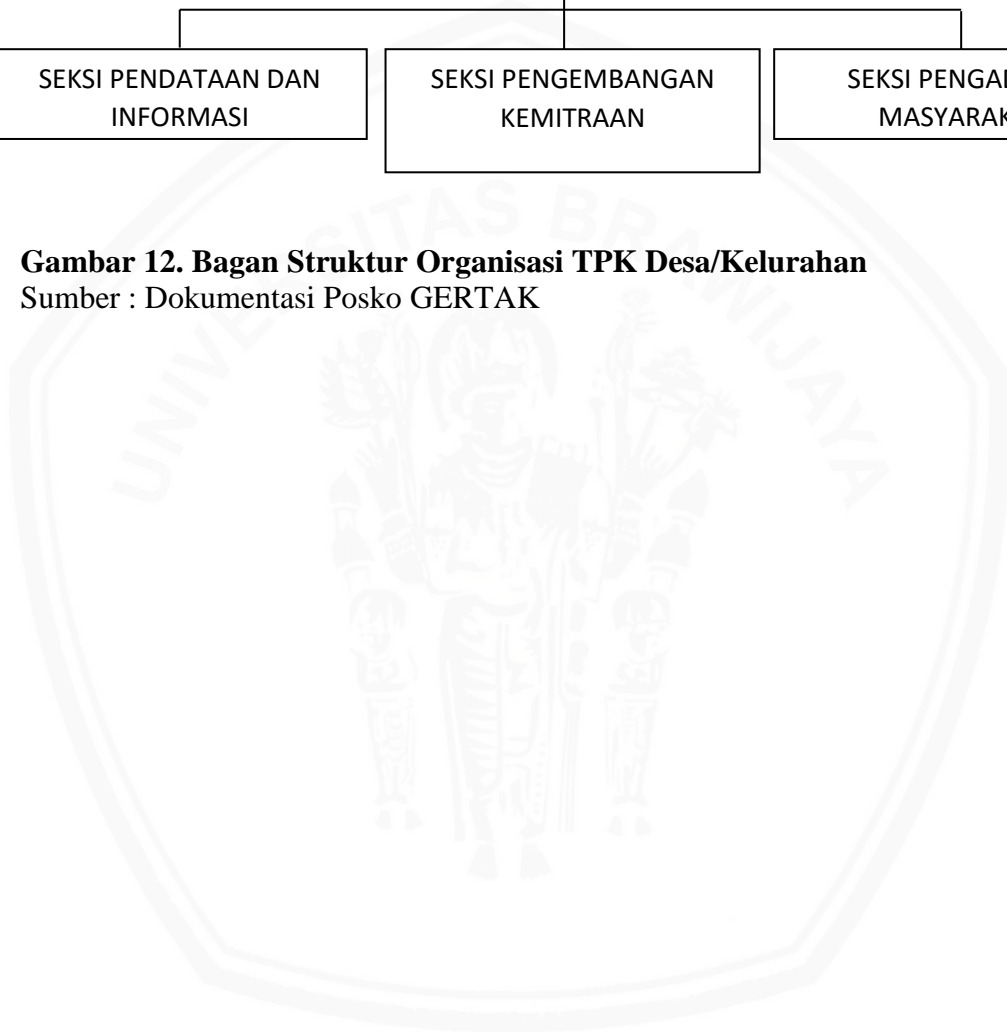
- 1) Lembaga Swadaya Masyarakat antara lain Badan Koordinasi Masyarakat (BKM), gabungan kelompok tani (Gapoktan), organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi pengelola Desa/Kelurahan wisata, organisasi kepemudaan, PKK, Kader Keluarga Berencana, Kader Kesehatan, Forum Anak, dan lain-lain;
- 2) Lembaga Pendidikan atau tokoh masyarakat antara lain Perguruan Tinggi, Pesantren, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Lembaga Pendidikan Keterampilan, dan lain-lain;
- 3) Dunia usaha antara lain distributor, toko besar, industri rumah tangga, industri kerajinan/ekonomi kreatif, usaha pertambangan, usaha agribisnis, usaha peternakan, usaha perikanan, bank, koperasi, bengkel, notaris, HIPMI, penyedia jasa konstruksi, dan lain-lain; dan
- 4) Unsur Pemerintahan Desa/Kelurahan antara lain Pamong Desa/Kelurahan, Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, Badan Permusyawaratan Desa/Kelurahan, dan Dusun.

Sedangkan gambar dibawah ini merupakan bagan struktur organisasi TPK Desa/Kelurahan:



Gambar 12. Bagan Struktur Organisasi TPK Desa/Kelurahan

Sumber : Dokumentasi Posko GERTAK



B. Penyajian Data Fokus Penelitian

1. Program Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan (GERTAK)

Pemerintah Kabupaten Trenggalek

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 2 UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang besar untuk merencanakan, merumuskan melaksanakan, serta mengevaluasi kebijakan dan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Salah satu kewenangan pemerintah daerah dalam upaya pembangunan daerah adalah mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah paling serius yang harus dipecahkan. Upaya untuk mengatasi hal tersebut bisa melalui program-program kemiskinan yang inovatif. Di periode lima tahun ke depan pemerintahan Bupati Trenggalek Dr. Emil Elestianto Dardak dan Wakil Bupati H. Mochammad Nur Arifin, keberhasilan pengentasan kemiskinan menjadi salah satu indikator pencapaian pembangunan, dimana indikator yang ingin dicapai adalah berkurangnya persentase jumlah penduduk miskin. Untuk itu dibuatlah Program GERTAK (Gerakan Tengok Bawah Masalah

Kemiskinan) yaitu sebuah program yang diinisiasi sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Trenggalek.

Program GERTAK ini didukung dengan Peraturan Presiden nomor 15 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, pasal 1 menyebutkan bahwa Penanggulangan Kemiskinan adalah Kebijakan dan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Dari pengertian diatas bisa diketahui bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan program pemerintah namun merupakan tanggung jawab semua pihak mulai dari pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat. Hal itu diupayakan secara bersama dengan tujuan tidak hanya mengurangi persentase atau jumlah penduduk miskin, namun juga dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sedangkan arah kebijakan penanggulangan kemiskinan yang tercantum dalam pasal 2 (ayat 2) menyebutkan arah kebijakan penanggulangan kemiskinan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dari instrumen tersebut bisa diketahui bahwa RPJMD yang memuat arah kebijakan program-program pembangunan 5 tahun kedepan selama masa kepemimpinan kepala daerah, pastinya juga memuat indikator yang ingin dicapai. Termasuk program-program penanggulangan kemiskinan. Untuk itulah Program GERTAK ini dimunculkan pada awalnya dalam Peraturan Daerah Kabupaten

Trenggalek No. 09 Tahun 2016 Tentang RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).

Sebelum adanya program GERTAK, pemerintah hanya menjalankan program kemiskinan dari tingkat pusat maupun provinsi. Namun pada akhirnya terjadi beberapa penyimpangan-penyimpangan seperti banyaknya alokasi program yang tidak sesuai karena basis data yang lemah, munculnya stigma kemiskinan yang membuat masyarakat mempunyai mental miskin. Untuk itulah Program GERTAK dibuat dalam menjawab berbagai permasalahan tersebut. Sehingga latar belakang sosial kemunculan konsep GERTAK adalah upaya merubah cara pandang masyarakat tentang konsep kemiskinan dan bantuan orang miskin. Dimana pesan moral yang ingin disampaikan terutama adalah untuk masyarakat yang mampu tetapi menerima bantuan kemiskinan, untuk sadar bahwa masih banyak masyarakat lain yang lebih kurang mampu dan lebih berhak untuk mendapatkan bantuan. Konsep operasional dari program GERTAK atau yang dikenal sebagai lima strategi program GERTAK adalah :

- 1) Golden Standart Klasifikasi
- 2) Mutasi Data Kemiskinan
- 3) Unit Pelayanan Terpadu
- 4) Bina Ekonomi Rakyat
- 5) Redefinisi dan evaluasi

Lima Strategi Program GERTAK tersebut bersifat tahapan atau alur bagaimana langkah operasional upaya pengentasan kemiskinan bisa

dijalankan bersama dengan *stakeholder* yang ada sekaligus mempersiapkan regulasi dan sarana prasarananya. 5 strategi konsep operasional program Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan (GERTAK) adalah :

- 1) Golden Standart Klasifikasi : Pada tahap ini Pemerintah beserta para *stakeholder*. Berusaha membuat komitmen bersama tentang Standart atau klasifikasi kemiskinan.
- 2) Mekanisme Mutasi : dalam tahap ini Pemerintah membangun *database* dan Manajemen Informasi Kemiskinan Daerah. Melalui *website* dan Aplikasi *Online*.
- 3) Unit Pelayanan Terpadu : Pemerintah membuat sebuah Unit Pelayanan Terpadu. Dimana semua akses pelayanan mengenai kemiskinan dan segala bentuk pengaduan kemiskinan akan ditempatkan dalam satu atap.
- 4) Bina Ekonomi Rakyat : Pemerintah juga memberdayakan masyarakat miskin yang masih produktif dengan membuat usaha yang menjalin kerja sama dengan mitra usaha yang disediakan pemerintah.
- 5) Redefinisi dan Evaluasi : Pemerintah atau dalam tahap ini adalah Bappeda sebagai *Leading Sector* program GERTAK mempunyai peran sebagai koordinator yang mengintegrasikan, mensinkronkan program-program penanggulangan kemiskinan yang tergabung dalam GERTAK.

2. Implementasi Program Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan (GERTAK) dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Trenggalek

Terkait mengenai konsep umum dari Program GERTAK, program ini merupakan program yang dikeluarkan pada awal pemerintahan Dr. Emil Elistianto Dardak, M.Sc dan H. Mochamad Nur Arifin sebagai Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek periode 2016-2021. Program GERTAK merupakan program lintas perangkat daerah yang menjadi barometer percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Trenggalek. Program ini dilaksanakan melalui pendekatan strategi utama penanggulangan kemiskinan, yaitu pengembangan penghidupan masyarakat secara berkelanjutan dengan prinsip “Gotong Royong”. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Bapak Emil E. Dardak sebagai Bupati Kabupaten Trenggalek :

“Semangat yang mendasar dari Program GERTAK ini adalah bagaimana kita membangun semangat dari masyarakat miskin itu sendiri sebagai subyek, sebagai pihak yang ingin mengangkat nasib hidupnya. Disinilah dalam Program GERTAK kita memberikan ruang bagi masyarakat untuk memupuk semangat gotong royong, untuk sama-sama menyadari bahwa kemiskinan bukan tanggungjawab pemerintah semata, ini adalah “gerakan” bukan hanya program pemerintah, ini adalah bagaimana masyarakat benar-benar menjadi bagian dari sebuah *movement* dari sebuah gerakan, disini pemerintah duduk setara dengan masyarakat dan malah kita menempatkan di garda kedepan para relawan, para penggerak komunitas yang memang selama ini sangat sigap dan kreatif dalam mengatasi masalah masalah kemiskinan yang berkembang di Kabupaten Trenggalek”.

Selain itu Bapak M. Nur Arifin selaku Wakil Bupati Trenggalek sebagai Ketua TKPKD Kabupaten Trenggalek juga menambahkan:

“Program GERTAK yang di *launching* adalah bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan. Program ini akan dilaksanakan melalui pendekatan strategi utama penanggulangan kemiskinan, yaitu pengembangan penghidupan masyarakat secara berkelanjutan dengan prinsip Gotong Royong. Sejalan dengan RPJMD yang disusun, sinergitas program kemiskinan akan didokumentasikan dalam Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD)”.

Dari penuturan para informan diatas dikatakan bahwa Program GERTAK memang diperuntukkan bagi keluarga yang kurang mampu dalam hal ini yang tergolong fakir miskin dengan mengutamakan prinsip gotong royong. Dimana tujuan dari program ini secara umum adalah untuk mempercepat penanganan dan menjangkau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan memperoleh data kemiskinan dari bawah dengan melibatkan *stakeholder* di tingkat desa seperti RT/RW dan Kepala Desa dengan harapan diperoleh data yang lebih *valid*, tepat dan terbaru. Dengan data yang akurat diharapkan program ini dapat memutus rantai kemiskinan khususnya di Kabupaten Trenggalek.

a. Organisasi Pelaksana

Organisasi merupakan bagian terpenting dalam menjalankan kegiatan pemerintahan. Tujuan dibentuknya organisasi ini adalah untuk menyediakan pelayanan publik pada seluruh warga negara untuk pemenuhan kebutuhan. Kualitas organisasi pada suatu pemerintahan menentukan pada kepuasan warga negara yang menerima pelayanan publik, maka peningkatan kualitas kinerja organisasi tentu harus dilakukan untuk menunjang pemberian pelayanan publik yang maksimal. Kebijakan publik merupakan akar dari pelayanan publik karena sebelum pelayanan publik sampai kepada warga negara kebijakan publik telah dirancang agar pelayanan publik dapat memuaskan warga negara. Implementasi sebuah program merupakan salah satu bentuk dari pelayanan publik dan yang melaksanakannya adalah organisasi pelaksana. Implementasi sebuah program membutuhkan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*). Peran organisasi pelaksana yang terlibat sangat berpengaruh terhadap jalannya suatu program. Keberhasilan Program GERTAK untuk mencapai tujuan memerlukan dukungan dan koordinasi yang baik antar *stakeholder* yang terlibat. Tujuan pembentukan tim untuk implementasi Program GERTAK ini adalah untuk memantau semua kegiatan yang dijalankan oleh Program GERTAK, serta memastikan komitmen daerah terkait dengan Program GERTAK terpenuhi. Berikut informasi yang diberikan Bapak Wildan selaku bagian operator Posko GERTAK terkait

organisasi pelaksana yang terlibat dalam implementasi Program

GERTAK:

“organisasi yang terlibat dalam implementasi Program GERTAK ini ada banyak mbak, semua aktor tersusun pada struktur organisasi TKPK sesuai dengan kewenangannya masing-masing, untuk aktor yang paling terlibat yaitu Posko Gertak, Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek, Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek dan BAZNAS Kabupaten Trenggalek. Namun misalnya kami akan memberikan bantuan kesehatan kepada penerima bantuan, kami harus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek. Begitupun kalau kami akan memberikan santunan kepada siswa siswi yang kurang mampu maka kami juga berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Trenggalek. Jadi kami harus mengetahui siapa yang penerima bantuannya lalu dikoordinasikan dengan dinas-dinas terkait, gitu mbak.” (hasil wawancara tanggal 21 Februari 2018 pukul 14.35 WIB)

Ibu Aris selaku bagian operator Posko GERTAK menambahkan informasi mengenai organisasi pelaksana yang terlibat dalam implementasi Program GERTAK:

“kalau setahu saya ya mbak, organisasi pelaksana yang terlibat itu ya pasti Posko Gertak sendiri sebagai tempat pengaduan atau istilahnya tempat berkeluh kesah tentang keadaan ekonomi si penerima bantuan itu. Kemudian Bappeda sebagai pelaksana yang bertanggung jawab mengatur jalannya program GERTAK, kemudian Dinas Sosial untuk mencocokkan data pelaporan yang kami dapat agar data itu sesuai bahwa calon penerima bantuan ini benar-benar layak untuk dibantu, kemudian BAZNAS Kabupaten Trenggalek untuk mencairkan dananya.” (hasil wawancara tanggal 21 Februari 2018 pukul 14.05 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi Program GERTAK tidak hanya dari Posko GERTAK, Dinas Sosial, Bappeda, maupun BAZNAS saja, namun melibatkan dinas-dinas lain yang bekerja sama dan berkoordinasi dengan baik. Berikut dijelaskan lebih rinci terkait organisasi pelaksana yang terlibat dalam

Program GERTAK sesuai dengan buku pedoman operasional Program GERTAK Kabupaten Trenggalek:

Tabel 6. Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Trenggalek

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Penanggungjawab	Bupati Trenggalek
2.	Pengarah	1. Kepala Kepolisian Resort Trenggalek 2. Komandan Distrik Militer 0806 Trenggalek
3.	Ketua	Wakil Bupati Kabupaten Trenggalek
4.	Wakil Ketua	Sekretaris Daerah Kab. Trenggalek
5.	Sekretaris	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kab. Trenggalek 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Trenggalek
6.	KELOMPOK PROGRAM	
	1. Bantuan Sosial Terpadu Berbasis keluarga	
	a. Ketua	Staf Ahli Bupati Trenggalek Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia
	b. Wakil Ketua	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Trenggalek
	c. Anggota	1. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Trenggalek
		2. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Trenggalek
		3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Trenggalek
		4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Trenggalek
	2. Berbasis Pemberdayaan Masyarakat	
	a. Ketua	Staf Ahli Bupati Trenggalek Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik
	b. Wakil Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kab. Trenggalek
	c. Anggota	1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Trenggalek

		2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Trenggalek
		3. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Trenggalek
		4. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Trenggalek
	3. Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil	
	a. Ketua	Staf Ahli Bupati Trenggalek Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan
	b. Wakil Ketua	Kepala Dinas Koperasi, Dinas Mikro dan Perdagangan Kab. Trenggalek
	c. Anggota	1. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Trenggalek
		2. Kepala Dinas Perikanan Kab. Trenggalek
		3. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Trenggalek
		4. Kepala BULOG Kab. Trenggalek
	4. Program-Program Lainnya	
	a. Ketua	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kab. Trenggalek
	b. Wakil Ketua	Inspektur Kab. Trenggalek
	c. Anggota	1. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Trenggalek
		2. Kepala Satpol PP dan Kebakaran Kab. Trenggalek
		3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Trenggalek
		4. Kepala Badan Pusat Statistik Kab. Trenggalek
		5. Kepala Badan Narkotika Nasional Kab. Trenggalek
	5. SEKRETARIAT	
	a. Kepala Pelaksana Harian	Sekretaris Badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah Kab. Trenggalek
	b. Wakil Kepala Pelaksana Harian	Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Trenggalek
	c. Anggota	1. Direktur BLU RSUD dr. Soedomo Kab. Trenggalek
		2. Kabag. Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kab. Trenggalek
		3. Kabag. Umum dan perlengkapan Sekretariat Daerah Kab. Trenggalek
		4. Kabag. Hukum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kab. Trenggalek
		5. Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Trenggalek
		6. Sekretaris Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Trenggalek
		7. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Trenggalek
		8. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Trenggalek

		9. Kabid. Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan pengembangan Daerah Kab. Trenggalek
		10. Kabid. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Trenggalek
		11. Kasubid. Sosial dan Kesejahteraan Rakyat pada Badan Perencanaan Pembangunan, penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Trenggalek
		12. Petugas Penunjang Kegiatan Posko GERTAK
	KELOMPOK KERJA	
	6. Pendataan dan Informasi	
	a. Ketua	Kabid. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kab. Trenggalek
	b. Wakil Ketua	Kabid. Penelitian, Pengembangan, Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Trenggalek
	c. Anggota	1. Kabid. Pemberdayaan Pembangunan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kab. Trenggalek
		2. Kabid. Kesehatan Masyarakat pada Dinas kesehatan, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kab. Trenggalek
		3. Kabid. E-Government dan Statistik pada Dinas Komunikasi dan informatika Kab. Trenggalek
		4. Kasi. Penyelenggaraan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak Kab. Trenggalek
		5. Kasubbag. Perencanaan dan evaluasi pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Trenggalek
		6. Kassubag. Perencanaan dan Pelaporan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Trenggalek
		7. Kasubbag. Program dan Informasi pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Trenggalek
		8. Kasubbag. Perencanaan dan Pelaporan pada Dinas Perumahan, kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Trenggalek
		9. Kasi. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Trenggalek
		10. Kasi. Statistik Sosial pada Badan Pusat Statistik Kab. Trenggalek
		11. Staff pada Badan perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kab. Trenggalek
		12. Staff pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Trenggalek

7. Pengembangan Kemitraan		
a. Ketua	Kabag. Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kab. Trenggalek	
b. Wakil Ketua	Kabid. Perencanaan Perekonomian pada Badan Perencanaan Pembangunan, penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Trenggalek	
c. Anggota	1. Kabid. Pelayanan dan rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Trenggalek	
	2. Kabid Pemberdayaan Ekonomi Perdesaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kab. Trenggalek	
	3. Kasubbid. Pemerintahan dan Pemberdayaan masyarakat pada Badan Perencanaan Pembangunan, penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Trenggalek	
	4. Kasubbag. Evaluasi dan Pengembangan Program Perekonomian pada Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kab. Trenggalek	
	5. Pelaksana Kegiatan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Trenggalek	
	6. Kepala Kantor Layanan Operasional KLO BPJS Kesehatan Kab. Trenggalek	
	7. Kepala Satuan Bina Masyarakat Polres Trenggalek	
	8. Perwira Seksi Teritorial 0806 Trenggalek	
	9. Koordinatir Fasilitator Anti Poverty Program (APP) Kab. Trenggalek	
	10. Koordinator Fasilitator Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	
	11. Koordinator Komunitas Info Seputar Trenggalek (IST)	
	12. Staff pada Badan Perencanaan Pembangunan, penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Trenggalek	
	13. Staff pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Trenggalek	
8. Pengaduan Masyarakat		
a. Ketua	Sekretaris Inspektorat Kab. Trenggalek	
b. Wakil Ketua	Kabag. Protokol dan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Kab. Trenggalek	
c. Anggota	1. Kabid. Pelayanan Medis dan Penunjang Medis pada RSUD dr. Soedomo Kab. Trenggalek	
	2. Kabid Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Trenggalek	
	3. Kabid. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Trenggalek	
	4. Kabid. Perencanaan Fisik dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan, penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Trenggalek	
	5. Kabid. Pemberdayaan dan Pengembangan sosial pada	

	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Trenggalek
	6. Kabid. Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Trenggalek
	7. Kasubbag. Kesejahteraan Rakyat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kab. Trenggalek
	8. Kasi. Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Restorasi Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Trenggalek
	9. Kasi Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Trenggalek
	10. Kasubid. Pendidikan, Pariwisata dan Kebudayaan pada Badan Perencanaan Pembangunan, penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Trenggalek
	11. Ketua Paguyuban Kelompok Informasi Masyarakat (IKM)
	12. Staff pada Badan Perencanaan Pembangunan, penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Trenggalek
	13. Staff pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Trenggalek

Sumber : Dokumentasi Posko GERTAK

Sebagai pelaksana kebijakan publik, struktur organisasi juga harus terbentuk efisien agar dapat mengimplementasikan kebijakan publik yang efektif. Organisasi harus mengetahui dengan jelas terkait dengan apa yang harus dilakukannya dan bagaimana cara untuk melakukannya, serta memiliki keinginan untuk melakukannya, serta melakukan apa yang diamanatkan oleh kebijakan publik yang telah dibuat. Aspek penting yang harus ada dalam struktur organisasi yaitu pembagian kewenangan yang jelas serta hubungan antar unit-unit organisasi juga terjaga. Pada program GERTAK pembagian kewenangnya telah dikomunikasikan dengan jelas melalui rapat koordinasi TKPKD, hal ini seperti disampaikan oleh Bapak Teguh Purianto selaku bagian operator Posko GERTAK pembagian kewenangan dalam organisasi pelaksana Program GERTAK:

“Struktur organisasi pelaksana Program GERTAK ini sudah dijelaskan dan saya rasa struktur organisasinya sudah bagus, sedangkan pembagian kewenangan untuk Program GERTAK dijelaskan ketika rapat koordinasi Kabupaten dan TKPK Kecamatan sebagai badan khusus yang dibentuk untuk membantu mengentaskan kemiskinan. TKPK Kabupaten sendiri memiliki kewenangan dalam menangani masalah kemiskinan ini lebih global, sedangkan TKPK Kecamatan lebih fokus menangani secara teknis di lapangan bersama dengan UPTD-UPTD disini kita yang mengkoordinir. Hubungan antar pelaksana Program GERTAK pun karena kewenangannya juga telah dikoordinasikan dan dibagi sesuai dengan tupoksinya masing-masing ketika rapat koordinasi.” (hasil wawancara pada tanggal 19 Februari 2018 pukul 10.15 WIB)

Berdasarkan penjelasan diatas organisasi pelaksana pada Program GERTAK ini sudah baik dengan dibentuknya tim khusus yang melaksanakan program agar tujuan program bisa tercapai. Adanya tim khusus yaitu TKPK ini memudahkan dalam berkomunikasi dan berkoordinasi serta membuat organisai pelaksana bekerja tidak terjadi ketimpangan yang dapat menghambat kinerja organisasi. Selain itu dengan adanya rapat rutin TKPK membuat hubungan antar pelaksana program bisa dibina dengan baik dan lebih efisien.

b. Sumber Pembiayaan

Sumber pembiayaan merupakan salah satu faktor yang penting dalam implementasi Program GERTAK. Ketersediaan dana menjadi penunjang dalam implementasi Program GERTAK tersebut. Besaran dana yang tersedia juga menentukan tercapainya dan terwujudnya tujuan dari Program GERTAK. Dalam implementasinya besaran dana atau bantuan yang diberikan penerima bantuan bervariasi. Setiap penerima bantuan mendapatkan bantuan yang berbeda-beda dan dapat berubah dikemudian hari tergantung komponen yang dimiliki oleh penerima bantuan Program GERTAK. Dana atau bantuan yang diberikan Program GERTAK kepada penerima bantuan berasal dari dana APBD dan dana dari BAZNAS.

Berikut adalah keterangan yang diberikan oleh Ibu Aris Mbajeng Wahyu Prasiska selaku bagian operasional Posko GERTAK terkait sumber pembiayaan Program GERTAK:

“dana untuk Program GERTAK yang diberikan kepada penerima bantuan itu berasal dari APBD dan dari BAZNAS mbak. Dana APBD diberikan setiap satu tahun sekali dan digunakan untuk operasional pelayanan untuk penanggulangan kemiskinan.” (hasil wawancara tanggal 19 Februari 2018 pukul 10.25 WIB)

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa sumber dana dari program GERTAK ini didapat dari dana APBD dan dana dari BAZNAS Kabupaten Trenggalek. Dari wawancara tersebut penulis mendapatkan informasi mengenai anggaran dana APBD dari tahun 2015 sampai tahun 2018 yang digunakan untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Trenggalek.

**Tabel 7. Anggaran Dana Program GERTAK dalam Penanggulangan
Kemiskinan di Kabupaten Trenggalek**

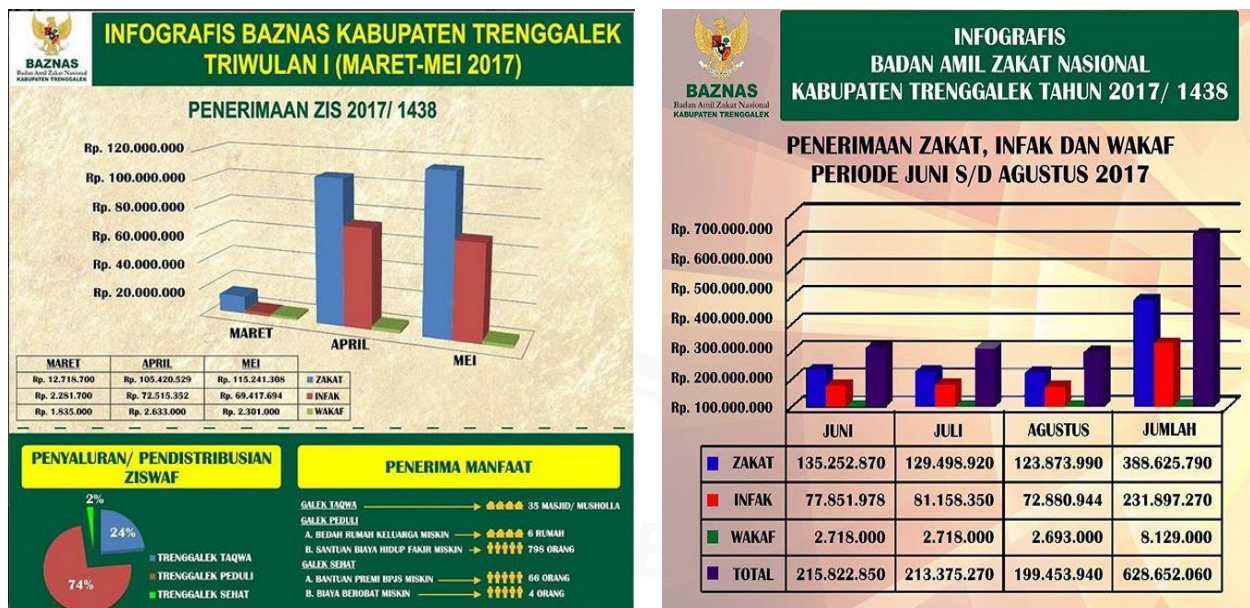
N o.	Program Lintas Perangkat Daerah	Alokasi Anggaran (Rp.)			
		APBD-P 2015	APBD-P 2016	APBD 2017	RKPD 2018
1.	GERTAK (Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan)	6.145.999.000	14.102.180.900	10.921.721.000	15.247.972.000
Jumlah		6.145.999.000	14.102.180.900	10.921.721.000	15.247.972.000

Sumber : Dokumentasi Posko GERTAK

Bapak Masdar Farid Mas'udi selaku pelaksana kegiatan dari BAZNAS Kabupaten Trenggalek juga menambahkan terkait sumber pembiayaan Program GERTAK Kabupaten Trenggalek:

“gini mbak, selain dari dana APBD, Program GERTAK juga menggandeng BAZNAS dalam segi pembiayaan bantuan. BAZNAS merupakan suatu wadah yang paling efektif untuk menolong warga Trenggalek yang membutuhkan dan untuk kepentingan umat. Dan untuk sasaran pertama yang mau mengeluarkan zakatnya adalah PNS di Kabupaten Trenggalek, karena abdi masyarakat harus memberikan contoh agar dapat mengajak masyarakat lainnya untuk mau bergotong-royong mengentaskan kemiskinan caranya ya lewat dana BAZ ini. Para PNS menyumbangkan sebagian gajinya ini dengan sifat suka rela mbak, kami tidak harus mematok berapa persen dari gajinya, cukup hanya keikhlasan dari individu para PNS.”

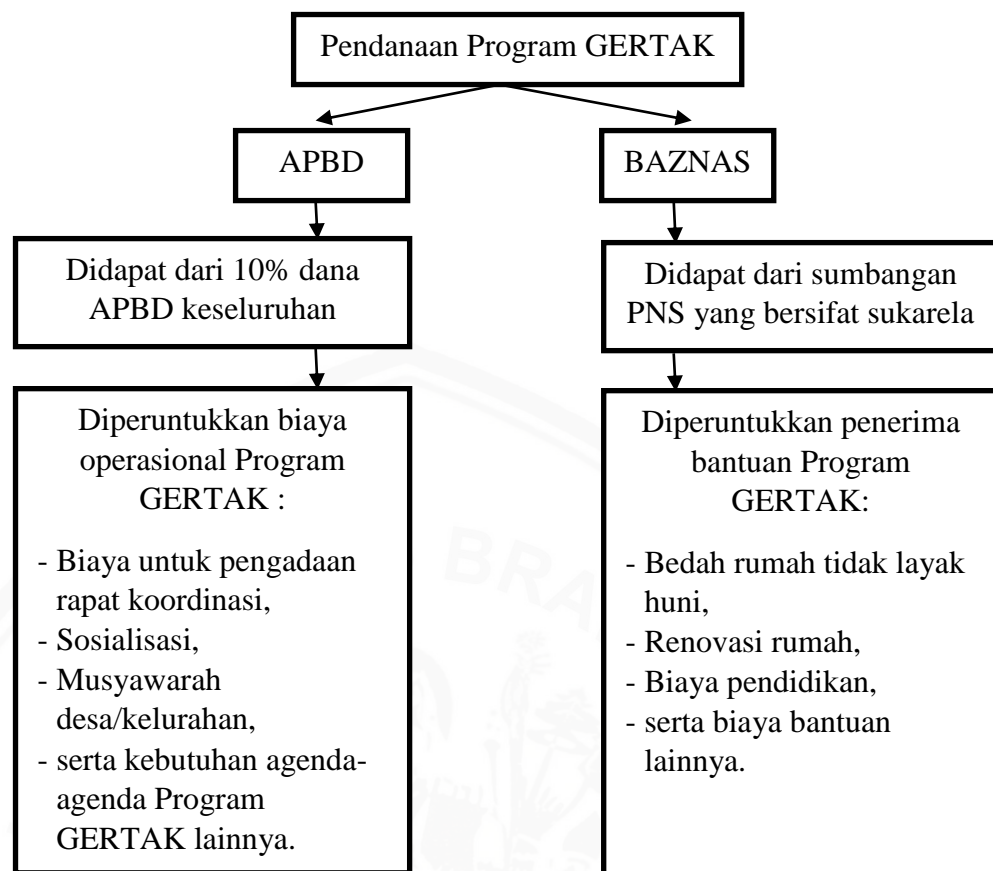
Penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa dana yang digunakan untuk Program GERTAK tidak hanya berasal dari APBD saja tetapi juga dari BAZNAS juga. Dan dana yang dikumpulkan dari BAZNAS ini didapat dari sebagian gaji dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersifat sukarela. Berdasarkan hasil wawancara diatas, berikut adalah data dari BAZNAS Kabupaten Trenggalek selama tahun 2017 :



Gambar 13. Dana BAZNAS Kabupaten Trenggalek

Sumber : Instagram @BAZNASTrenggalek

Gambar diatas adalah besaran dana dari yang dapat dikumpulkan selama tahun 2017. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pendapatan BAZNAS yang dikumpulkan meningkat drastis pada saat Program GERTAK ini di *launching* pada bulan April 2017. Masing-masing penerima bantuan mendapatkan besaran bantuan yang berbeda-beda dalam mendapatkan bantuan berupa uang tunai maupun materi. Hal yang penting dalam pembiayaan penanggulangan kemiskinan adalah cara memanfaatkan biaya tersebut secara efektif dan efisien dari aspek ekonomi dan sosial serta dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Kabupaten Trenggalek yang membutuhkan. Dibawah ini merupakan alur pendanaan Program GERTAK :



Gambar 14 . Alur Pembiayaan Program GERTAK

Sumber : Olahan Penulis

c. Kelompok Sasaran

Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Trenggalek oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang keberadaan tim ini memang dibentuk khusus sesuai PERPRES No. 15 Tahun 2010 sehingga terjadi pengurangan angka kemiskinan di Kabupaten/Kota di Indonesia khususnya di Kabupaten Trenggalek. TKPK bertindak sebagai tim yang mempunyai andil dalam menentukan rumah tangga sasaran dalam kegiatan Program GERTAK di Kabupaten

Trenggalek. Hal ini sesuai dengan wawancara Ibu Aris Mbajeng Wahyu Prasiska selaku bagian operasional Posko GERTAK terkait kelompok sasaran Program GERTAK :

“Jadi begini mbak, untuk menentukan kelompok sasaran kami mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh TKPK. TKPK juga memiliki peta prioritas wilayah untuk menentukan skala prioritas wilayah mana yang harus di intervensi oleh SKPD dalam memberikan atau melaksanakan program-program penanggulangan kemiskinan tidak terkecuali Program GERTAK ini. Jadi TKPK harus bekerja sesuai dengan peta yang telah disusun. (hasil wawancara tanggal 12 Februari 2018 pukul 10.15 WIB)

Dari pernyataan diatas diketahui bahwa sebuah program yang dilaksanakan oleh pemerintah, hendaknya memiliki sasaran yang tepat karena ketepatan sasaran dalam setiap pelaksanaan program menjadi salah satu aspek yang diharapkan. Sasaran dari setiap program hendaknya benar-benar disesuaikan dengan realita yang ada dimasyarakat. Demikian juga halnya dengan program-program yang khusus dibuat oleh pemerintah sebagai upaya penanggulangan kemiskinan untuk keluarga yang kurang mampu. Program penanggulangan kemiskinan seperti Program GERTAK seharusnya diberikan hanya kepada masyarakat yang memang membutuhkan bantuan program ini.

Sesuai dengan kebijakan dari TKPK, yang bisa mendapatkan bantuan dana untuk program ini hanya yang memenuhi persyaratan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Wildan Taufiq Akbar sebagai bagian operasional Posko GERTAK mengenai persyaratan untuk mendapatkan bantuan, antara lain yaitu :

“Jadi TKPK memiliki kriteria sendiri mbak dalam menentukan apakah masyarakat tersebut layak mendapatkan bantuan atau tidak. TKPK mempunyai 40 indikator untuk mengetahui bahwa masyarakat itu termasuk miskin, jadi masyarakat yang mendaftarkan diri harus mengisi Formulir Perubahan/pendaftaran Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (mengasihkan formnya), setelah 40 indikator itu diisi nanti perengkingannya masuk ke TKPK, jadi yang menentukan desil-desil atau persentif itu TKPK. Yang menentukan kemiskinan itu nggak bisa dilihat dengan mata saja mbak, oh itu rumahnya jelek..oh itu pakaiannya jelek.. meskipun jelek bisa jadi kan asetnya banyak seperti luas tanahnya, emas-emasnya, ataupun tabungannya atau juga kendaraannya jadi nggak serta merta *sawang sinawang* untuk menentukan masyarakat itu miskin, tetapi harus dirangking dulu mbak, ada kriterianya sendiri. Jadi, yang pasti kriteria untuk mendapatkan bantuan melalui pogram GERTAK antara lain: (1) berasal dari keluarga miskin yang pendapatannya rendah dan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar, (2) tidak punya pekerjaan tetap dan biasanya banyak anak.” (hasil wawancara tanggal 19 Februari 2018 pukul 11.18 WIB)

Pernyataan tersebut didukung juga oleh Ibu Welly Cyndy Pritaningrum selaku bagian operasional Posko GERTAK yang memberikan pernyataan tentang keiteria mendapatkan bantuan, sebagai berikut :

“Oh untuk kriterianya itu ada beberapa yang di ajukan mbak, kemudian di data oleh pihak Posko GERTAK, setelah itu di usulkan ke TKPK untuk ditentukan orang tersebut termasuk warga miskin atau tidak dan masuk desil berapa. Yang menjadi prioritas utama kami yaitu warga sangat miskin atau desil 1. Adapun kriteria yang ditetapkan TKPK untuk menerima bantuan program GERTAK antara lain: (1) termasuk keluarga miskin berdasarkan hasil perengkingan dari beberapa kriteria tersebut, (2) tidak punya penghasilan tetap/tidak memiliki pekerjaan, (3) memiliki pekerjaan tetapi sangat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar, (4) kondisi rumah tidak layak huni.” (hasil wawancara tanggal 12 Februari 2018 pukul 11.00 WIB)

Dari kedua pernyataan diatas dapat diketahui bahwa TKPK Kabupaten Trenggalek memiliki kriteria sendiri dalam mementukan

kelompok-kelompok yang paling membutuhkan. Dan yang menjadi kelompok sasaran yang paling utama adalah kelompok keluarga yang sangat miskin atau yang masuk kedalam kategori desil 1. Desil 1 maksudnya adalah dengan kriteria jumlah rumah tangga miskin 10% terendah. Setelah adanya kriteria yang harus dipenuhi dalam permohonan bantuan Program GERTAK, yang selanjutnya menjadi perhatian penulis yaitu ketepatan sasaran dari Program GERTAK ini, dalam artian apakah masyarakat yang diberikan bantuan benar-benar keluarga sangat miskin dan layak untuk mendapatkan bantuan tersebut atau tidak. Berdasarkan hasil penelusuran penulis dengan melakukan wawancara terhadap beberapa narasumber ditemukan bahwa Program GERTAK ini sudah tepat sasaran dikarenakan bahwa dalam prosesnya masyarakat yang akan mendapatkan bantuan di survei ke tempat tinggalnya langsung oleh tim *task force*/ relawan GERTAK. Setelah itu tim mendapatkan data, dari data tersebut lalu ditinjau oleh tim pemantau dan dicocokkan apakah data dari lapangan sama dengan data yang ada di Posko GERTAK. Dalam hal ini yang ditinjau apakah masyarakat yang memasukkan data permohonan bantuan sudah memenuhi syarat sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dan dalam proses penyeleksian data dari Dinas Sosial benar-benar sangat ketat, ketika pada saat peninjau yang diutus menemukan sesuatu yang janggal dalam artian tidak sesuai dengan kriteria maka tidak akan disetujui permohonan bantuannya. Yang diutarakan oleh penulis

berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Welly Cyndy Pritaningrum selaku bagian operasional Posko GERTAK yang menyatakan bahwa:

“Dapat dilihat dari proses penyeleksian data sampai pada tahap peninjauan oleh tim, program ini ada beberapa yang belum tepat sasaran. Hal ini dikarenakan sumber data yang di dapat dari PPLS 2011 dan PBDT 2015, kadang-kadang ada yang tidak tepat sasaran mbak, sehingga perlu diadakan musdes dan menyuruh task force posko gertak untuk terjun langsung ke lapangan melihat apakah data tersebut sudah sesuai apa belum.” (hasil wawancara tanggal 12 Februari 2018 pukul 11.08 WIB)

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa proses penyeleksian data dari calon penerima bantuan masih terdapat permasalahan dengan data dan menyebabkan penerimaan bantuan tidak tepat sasaran.

Melalui Program GERTAK, ketidaktepatan data penerima bantuan nantinya akan diminimalisir seminim mungkin. Kategori miskin tidak lagi menjadi kendala pasalnya penentuan nama-nama masyarakat miskin ini ditentukan melalui musyawarah desa. Musyawarah desa/kelurahan ini berfungsi memverifikasi dan memvalidasi data kemiskinan yang ada, sehingga melalui Program GERTAK penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Trenggalek ini dapat terlaksana dengan baik. Pemerintah desa maupun masyarakat desa tentunya akan lebih tahu warga itu benar-benar miskin atau tidak, sesuai kondisi riil dan realita dilapangan. Musyawarah desa/kelurahan merupakan sarana untuk menampung berbagai pengaduan masyarakat yang terkait dengan data masyarakat ini. Selain itu musyawarah ini untuk mencatat terjadinya perubahan status ekonomi/kesejahteraan penduduk miskin yang menjadi sasaran program

kemiskinan. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari M. Nur Arifin selaku ketua TKPK Kabupaten Trenggalek terkait tentang musyawarah desa dalam rangka untuk menentukan keakuratan data dalam kelompok sasaran:

“Musyawarah ini berfungsi sebagai wadah untuk memverifikasi dan memvalidasi data kemiskinan yang ada. Dan sebenarnya kalau data inklusif eror itu lebih terkawal lagi, artinya yang harusnya dapat tapi tidak terdaftar, tapi yang terdaftar tidak seharusnya dapat itu sekarang lebih terkawal. Terus kemudian masih ada data orang meninggal yang masih tercatat, padahal data rilis PBDT yang paling akhir. Orang yang sudah meninggal masih banyak, orang yang pindah masih tercatat dan yang pindah status menjadi mampu, data ganda bahkan disini tadi ada kasus namanya itu ada namun di cari orangnya tidak ketemu”. (hasil wawancara pada tanggal 12 Februari 2018 pukul 12.05 WIB)

Dari pernyataan diatas dapat dijelaskan maksudnya adalah dari permasalahan yang disebutkan oleh narasumber Program GERTAK ini memaksa para *stakeholder* terkait untuk mencari nama-nama masyarakat dan mencari siapa kelompok yang paling membutuhkan untuk dipertingkatkan lagi.

d. Lima Strategi Implementasi Program GERTAK

Dalam upaya menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Trenggalek, maka perubahan/inovasi yang ditawarkan, yaitu melakukan penguatan peran TKPKD dan pengembangan sebuah sistem manajemen penanggulangan kemiskinan terintegrasi melalui *Self Define Poverty System* (SDPS). SDPS ini pada prinsipnya merupakan sistem yang disusun dalam implementasi strategi Program GERTAK. Hal ini juga sesuai

dengan pernyataan dari Bapak Supriyanto selaku bagian operasional Posko

GERTAK tentang strategi Program GERTAK:

“....ada konsep operasional dari Program GERTAK ini mbak, atau yang dikenal dengan lima strategi Program GERTAK, yaitu yang pertama golden standart klasifikasi, yang kedua mutasi data kemiskinan, yang ketiga unit pelayanan terpadu, yang keempat bina ekonomi rakyat, dan yang terakhir redefinisi dan evaluasi. Dari lima strategi inilah tahapan atau alur bagaimana operasional upaya penanggulangan kemiskinan ini dijalankan mbak.” (hasil wawancara tanggal 21 Februari 2018 pukul 14.10 WIB)

Dari pernyataan tersebut dapat dijelaskan bahwa Program GERTAK ini dalam mengimplementasikannya menganut lima strategi konsep operasional Program GERTAK yang penjelasan secara rinci adalah:

1) *Golden Standart* Klasifikasi

Strategi *Golden Standart* dan Klasifikasi Program GERTAK merupakan sebuah strategi pemerintah yang akan memberikan *standart* atau membuat klasifikasi bagi masyarakat miskin yang dianggap menerima bantuan. Tetapi faktanya, terdapat masalah yang sering terjadi di masyarakat yaitu tentang pola pikir di masyarakat yang bersedia diakui dengan status miskin karena ingin mendapatkan bantuan dari Program GERTAK. Pada masyarakat masih terjadi misklasifikasi dalam penentuan data/angka kemiskinan, hal ini dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang mengaku-ngaku miskin agar mendapatkan bantuan padahal masih ada masyarakat yang lebih berhak untuk menerima bantuan. Untuk itu

demi mengatasi permasalahan ini pemerintah memberikan beberapa alternatif yaitu:

- a) Menanamkan Kesadaran Sosial di dalam Musyawarah Desa sebagai *Golden Standart*

Sulitnya usaha penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Trenggalek tentu bukan hanya disebabkan langsung dari sisi manusianya saja, tetapi juga sangat dipengaruhi kondisi geografis, pendidikan, ekonomi, sistem religi dan sosial budaya yang masih kental tumbuh di tengah masyarakat Kabupaten Trenggalek, serta strategi penanggulangan kemiskinan yang ditetapkan di daerah. Tetapi pada Program GERTAK ini masalah yang sering timbul adalah tentang pola pikir masyarakat yang masih mau dianggap miskin, demi mendapatkan bantuan dari pemerintah. Seperti pernyataan dari Bapak M. Nur Arifin sebagai Ketua TKPK Kabupaten Trenggalek terkait dengan pola pikir masyarakat dalam jurnal GERTAK halaman 17 :

“Ada beberapa *thematic issue* yang menjadi tantangan yang harus dijawab dalam upaya pengentasan kemiskinan. Namun satu hambatan klise yang sering terjadi di masyarakat adalah pola pikir masyarakat yang bersedia dicap dengan status miskin ketika digulirkan bantuan ke masyarakat. Masalah kemiskinan ini bukan sekedar masalah program, atau berapa besar dana yang digulirkan, tapi lebih pada masalah moral. Ada *soft campaign* yang harus diberikan pada masyarakat, bahwa ada yang lebih berhak menerima. Program sebegus apapun tapi kalau rasa keadilan itu tidak tercapai akhirnya tetap akan timbul konflik sosial di masyarakat. Maka dengan mendefinisikan sendiri standar dan status kesejahteraannya, maka dengan sendirinya telah terbangun sistem yang menjamin ketepatan sasaran penerima bantuan program kemiskinan.” (jurnal GERTAK halaman 17)

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa banyak masyarakat Kabupaten Trenggalek yang mengaku-ngaku miskin untuk bisa mendapatkan bantuan dari Program GERTAK. Warga miskin yang semestinya berhak untuk mendapatkan bantuan terkadang malah tidak mendapatkan, justru si kaya yang sudah berkecukupan malah mendapatkan.

Selanjutnya untuk mengatasi masalah strategi *Golden Standart* Klasifikasi diatas, maka harus ada upaya merubah cara pandang masyarakat tentang konsep kemiskinan dan bantuan untuk orang miskin. Ada pesan moral bagi masyarakat yang sudah mampu yang tetap ingin menerima bantuan kemiskinan, yaitu agar masyarakat mau sadar bahwa ternyata dibawah masih ada orang atau keluarga yang lebih membutuhkan bantuan serta menyadari ada yang lebih berhak menerima apa yang telah diterimanya. Sehingga program ini diharapkan dapat meminimalkan terjadinya *exclusion error* (warga miskin belum terdata) dan *inclusion error* (yang terdata bukan warga miskin). Apabila pola pikir masyarakat telah dirubah maka ketepatan kelompok sasaran mungkin dapat diminimalisir. Hal ini sesuai dengan pendapat H. Moch. Arifin selaku Ketua TKPKD Kabupaten Trenggalek dalam jurnal GERTAK halaman 40:

“Bagi kami standart emas kemiskinan ini adalah masyarakat sendiri yang mendefinisikan, siapa itu orang-orang yang berhak, siapa yang dianggap kurang berhak dan janganlah merebut kuota yang berhak ataupun segala macam lainnya.” (jurnal GERTAK : 40)

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pola pikir masyarakat ini harus di perbaiki dengan mengajak masyarakat yang mengaku miskin untuk melihat kebawah apakah memang dirinya miskin ataukah masih banyak sanak saudaranya yang lebih miskin. Maka dengan masyarakat mendefinisikan sendiri standar dan status kesejahteraannya, maka dengan sendirinya telah terbangun sistem yang menjamin ketepatan sasaran penerima bantuan program kemiskinan.

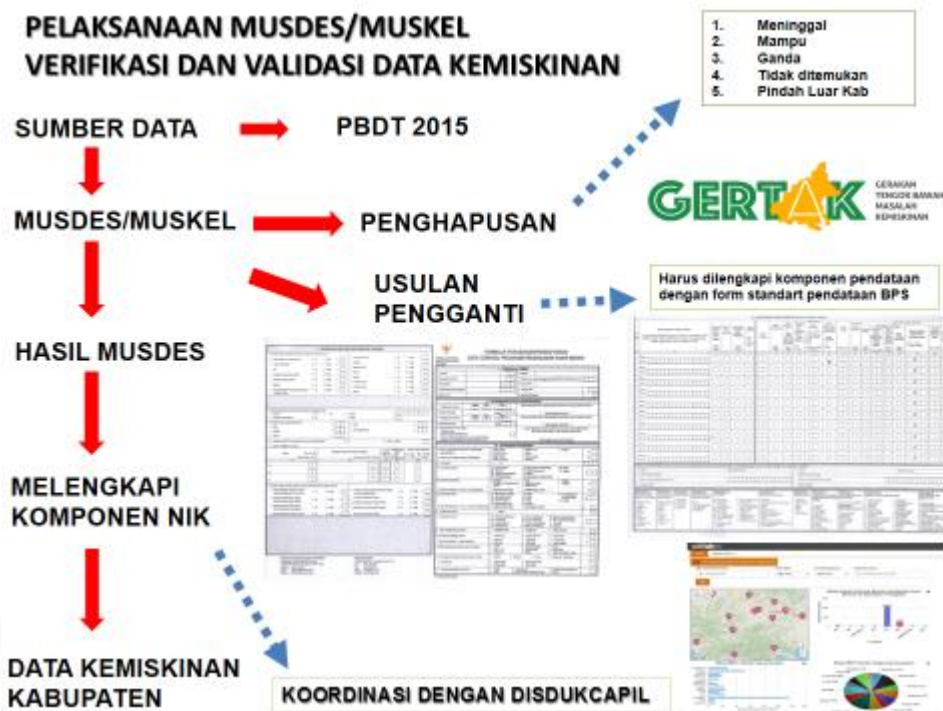
b) Musyawarah Desa : Upaya Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan

Melihat kondisional ini Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan serius melakukan upaya pemecahan, yaitu diadakannya musyawarah desa/kelurahan (musdes/muskel) di setiap kecamatan di Kabupaten Trenggalek. Musyawarah desa ini berfungsi memverifikasi dan memvalidasi data kemiskinan yang ada pada setiap desa, sehingga dapat mewujudkan cita-cita strategi *Golden Standart* Klasifikasi agar dapat terlaksana dengan baik. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bapak H. Moch. Arifin selaku Ketua TKPKD Kabupaten Trenggalek dalam video dokumentasi tentang Program GERTAK :

“Penguatan peran TKPKD harus diawali melalui penguatan peran dan kapasitas pemerintah desa selaku satuan kerja terkecil. Definisi dari kemiskinan dan program kemiskinan disepakati melalui mekanisme musyawarah desa/kelurahan (Musdes/Muskel). Selanjutnya dalam forum tersebut dilakukan juga verifikasi dan validasi Basis Data Terpadu terakhir melalui pengklasifikasian

yang komperhensif. Proses ini diharapkan akan meningkatkan ketepatan sasaran rumah tangga dan individu penerima program perlindungan sosial.” (video dokumentasi Program GERTAK, menit ke 06:33 sampai 07:12)

Berdasarkan pernyataan dari Ketua TKPKD Kabupaten Trenggalek dapat disimpulkan bahwa untuk mengatasi masalah strategi *Golden Standart* klasifikasi ini dimulai dari peran pemerintah desa/kelurahan selaku satuan kerja terkecil. Desa memiliki peran penting juga dalam penanggulangan kemiskinan karena desa merupakan lingkup kecil dibandingkan dengan kecamatan atau kabupaten, sehingga lebih mudah untuk mengetahui masyarakat di desa tersebut yang tergolong kelompok miskin dan perlu dibantu untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Berikut dibawah ini adalah alur atau mekanisme dalam pelaksanaan musyawarah desa/kelurahan verifikasi dan validasi data kemiskinan :



Gambar 15. Pelaksanaan Musdes verifikasi dan validasi data kemiskinan

Sumber : Dokumentasi Posko GERTAK

Berdasarkan gambar diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan musdes untuk memverifikasi dan memvalidasi data kemiskinan Program GERTAK dimulai dengan sumber data yang sudah ada dari PBDT 2015 tersebut dirundingkan pada saat musdes, dengan musyawarah tersebut dapat diketahui nama-nama yang dihapus dikarenakan meninggal, pindah, sudah mampu maupun ganda dan tidak ditemukan, serta melakukan usulan penggantinya. Selanjutnya data dari hasil musdes tersebut, masyarakat yang terdaftar harus melengkapi komponen NIK dan masuk data kemiskinan Kabupaten Trenggalek. Adapun dibawah ini merupakan contoh dokumentasi musyawarah desa (musdes) di Desa Karangturi, Kecamatan Munjungan, Kabupaten

Trenggalek (kiri) dan di Desa Jambu, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek (kanan) :



Gambar 16 : Foto Musyawarah Desa (Musdes)

Sumber : Dokumentasi Posko GERTAK

Dalam kegiatan musyawarah desa/kelurahan, masyarakat selalu diajak untuk memverifikasi serta menentukan data melalui PPLS 2011 atau PBDT 2015 yang sudah ada untuk disesuaikan dengan realita di lapangan. Sehingga data masyarakat miskin yang disahkan dalam musyawarah desa dapat sesuai dengan fakta yang ada. Hal ini sesuai dengan wawancara Bapak Supriyanto selaku bagian operasional posko GERTAK :

“Program GERTAK sendiri digagas oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek, setelah beberapa program pengentasan kemiskinan yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Daerah banyak yang dinilai tidak tepat sasaran. Hal tersebut dikarenakan mengacu pada data dari Kementerian Sosial yang bersumber dari data PPLS 2011 atau PBDT 2015. Untuk itu data yang ada ini kami lakukan musyawarah desa untuk menentukan data yang valid dan terbaru.” (hasil wawancara tanggal 21 Februari 2018 pukul 14.35 WIB)

Dari kutipan *humassetda.trenggalekkab.go.id*, dr. Ratna selaku Kabid Perlindungan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat menambahkan :

“musyawarah desa memiliki tugas berat yaitu mendata, memverifikasi dan menentukan data kemiskinan dengan benar. Pasalnya banyak anggapan bahwa masyarakat berkali-kali mengusulkan namun pada hasilnya penerima program tetap itu-itu saja. Sehingga dengan musyawarah desa ini, permasalahan yang selama ini terjadi dapat terselesaikan dengan baik, karena data yang telah diverifikasi dalam musyawarah ini dapat valid, tepat dan *up to date*.” (online humassetda.trenggalekkab.go.id diakses pada tanggal 25 Mei 2018 pukul 08.08 WIB)

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa musyawarah desa ini tujuannya untuk memverifikasi, validasi dan mendata masyarakat miskin yang tercantum dalam data PPLS 2011 atau PBDT 2015 untuk dimusyawarahkan apakah nama-nama yang tercantum masih mendapatkan bantuan atau mengalami perubahan data. Melalui musyawarah desa, permasalahan data yang selama ini kurang menyasar dapat terselesaikan dengan baik. Pasalnya penentuan penerima bantuan Program GERTAK ditentukan sendiri oleh masyarakat yang benar-benar paham dengan realita yang ada di lingkungan sekitarnya. Seperti pernyataan Bapak H. Moch. Nur Arifin selaku Ketua TKPKD Kabupaten Trenggalek dalam kutipan *humassetda.trenggalekkab.go.id* :

“Mari kita beri kepercayaan kepada masyarakat untuk menentukan siapa-siapa yang benar-benar miskin dan berhak mendapatkan bantuan. Pasalnya warga masyarakat sendiri tahu siapa-siapa warga di lingkungannya yang memang kurang mampu.” (online humassetda.trenggalekkab.go.id diakses tanggal 25 Mei 2018 pukul 08.25 WIB)

Berdasarkan kutipan wawancara diatas, Ketua TKPKD mengajak masyarakat untuk berprasangka baik kedepan. Filosofi dari Program GERTAK ini adalah kita sebagai manusia perlu introspeksi diri, bila masyarakat tercatat sebagai warga miskin bisa merenung apakah masyarakat itu memang berhak dan menengok kebawah apakah masih ada yang lebih berhak. Intinya adalah perlu kita mendahulukan masyarakat yang memang benar-benar harus didahulukan. Dengan musyawarah desa ini juga bertujuan merubah pola pikir masyarakat yang dulunya serakah kalau di beri bantuan dari pemerintah, sekarang masyarakat lebih berbagi dan bersedekah informasi kepada yang lebih membutuhkan bantuan. Adapun dibawah ini adalah rekapitulasi data hasil dari musyawarah desa/kelurahan yang dicapai selama tahun 2017 yang dapat diverifikasi dan validasi data kemiskinan pada tiap kecamatan :

Tabel 8. Rekap Hasil Musdes per Kecamatan tahun 2017**REKAP HASIL MUDES DATA KEMISKINAN KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2017**

NO	KECAMATAN	DATA KEMISKINAN	PENGHAPUSAN					JUMLAH Penghapusan	DATA KEMISKINAN DIKURANGI PENGHAPUSAN	USULAN PENGGAJATI	HASIL MUDES KEMISKINAN
			Meninggal	Mampu	Ganda	Tidak ditemukan	Pinah Luar Kab				
1	BENDUNGAN	15.416	243	1.084	10	24	92	1.453	13.963	1.542	15.505
2	DONGKO	32.030	445	1.785	17	15	170	2.432	29.598	2.622	32.220
3	DURENAN	13.546	412	1.286	2	9	91	1.800	11.746	1.791	13.537
4	GANDUSARI	16.278	381	1.623	19	2	67	2.092	14.186	1.904	16.090
5	KAMPAK	15.428	326	1.194	11	11	21	1.563	13.865	1.420	15.285
6	KARANGAN	12.862	347	1.265	6	8	66	1.692	11.170	1.520	12.690
7	MUNJUNGAN	23.269	284	3.451	12	64	34	3.845	19.424	2882	22306
8	PANGGUL	37.386	449	3.490	12	27	119	4.097	33.289	3.275	36.562
9	POGALAN	15.159	362	892	38	0	131	1.423	13.736	1.488	15.204
10	PULU	26.647	382	2.856	19	9	131	3.397	23.250	1.343	24.593
11	SURUH	11.843	188	793	0	3	66	1.050	10.793	906	11.699
12	TRENGGALEK	11.552	330	853	6	25	35	1.249	10.303	1.199	11.502
13	TUGU	19.252	472	784	17	23	156	1.452	17.800	1.264	19.064
14	WATULIMO	10.926	262	1.369	7	54	27	1.719	9.207	1.740	10.947
JUMLAH		261.594	4.883	22.725	176	274	1.206	29.264	232.330	24.874	257.204

Sumber : Dokumentasi Posko GERTAK

Dari data diatas dapat diketahui bahwa selama tahun 2017, rekap hasil musyawarah desa data kemiskinan Kabupaten Trenggalek ini yang nantinya akan di proses lebih lanjut dan dengan tujuan pemberian bantuan agar lebih tepat sasaran.

c) Aktor Musyawarah Desa Program GERTAK

Penanganan masalah kemiskinan merupakan tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan dan penanganannya dilakukan lintas

sektor, sehingga melahirkan sinergitas dalam pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan. Penanganan masyarakat miskin perlu dilaksanakan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun masyarakat. Program GERTAK ini mengajak seluruh *stakeholder* yang terkait dalam penyelenggaraan Musyawarah Desa/Kelurahan (Musdes/Muskel). Mengutip dari humassetda.trenggalekkab.go.id, Bapak H. Moch. Nur Arifin selaku Ketua TKPKD Kabupaten Trenggalek mengatakan tentang aktor yang terlibat dalam musyawarah desa :

“Kami menggandeng mulai dari Perangkat Desa, Ketua RT, RW, LPM, PKK, Bidan Desa maupun tokoh masyarakat. Semua elemen desa ini diajak berdiskusi dalam forum musyawarah tersebut. Mereka melakukan verifikasi dan memvalidasi ulang nama-nama yang tercatat dalam data kemiskinan yang ada sesuai dengan realita mereka miskin apa sudah mampu. Sehingga data kemiskinan setelah di musyawarahkan sesuai dengan kenyataan dilapangan. Sebelum diselenggarakan musyawarah desa, desa ini sudah mengawali musyawarah melalui pra Musdes atau musyawarah Dusun.” (online humassetda.trenggalekkab.go.id diakses tanggal 25 Mei 2018 pukul 10.55 WIB)

Pernyataan tersebut juga didukung dari pernyataan dr. Ratna selaku Kabid Perlindungan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam kutipan humassetda.trenggalekkab.go.id yang menambahkan :

“Program ini diluncurkan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek, untuk mewujudkan visi misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek demi terwujudnya masyarakat Trenggalek adil, makmur dan sejahtera. Komitmen ini tidak hanya menjadi komitmen pemerintah daerah saja, tiga pilar (Pemerintah, TNI dan Polri) juga sepakat akan ikut mengawal dan mendampingi di lapangan, sehingga program ini dapat sukses dan tepat sasaran.” (online humassetda.trenggalekkab.go.id diakses tanggal 25 Mei 2018 pukul 11:04 WIB)

Berdasarkan kedua pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa yang menghadiri pelaksanaan musyawarah desa antara lain terdiri dari Perangkat Desa, Ketua RT, RW, LPM, PKK, Bidan Desa maupun tokoh masyarakat. Selain itu dalam pelaksanaan musyawarah desa peran pemerintah, TNI, dan Polri diperlukan dalam pendampingan dan mengawal saat musyawarah desa agar berjalan dengan baik.

d) Kendala Implementasi Musyawarah Desa Program GERTAK

Dalam setiap kegiatan tidak lepas dari kendala yang dihadapi, termasuk juga pelaksanaan musyawarah desa/kelurahan pada Program GERTAK ini adalah terkait tentang masyarakat yang tidak termasuk kriteria masyarakat miskin, masyarakat tersebut memaksa perangkat desa untuk dimasukkan data kelompok miskin. Seperti pernyataan Bapak H. Moch. Nur Arifin selaku Ketua TKPKD dalam jurnal GERTAK halaman 39:

“... didesa-desa memang masih ada yang memaksakan Kepala Desa atau perangkatnya agar masyarakat mendapatkan bantuan. Ada desa yang memaksakan dicoret tidak mau, tetapi semua anggota masyarakatnya didaftarkan. Karena masih ada yang berpandangan sedikit sekali seperti itu, namun kebanyakan masyarakat berpendapat bisa mendefinisikan kemiskinan itu sendiri. Masyarakat bukan obyek, melainkan sebagai subyek untuk menentukan data kemiskinan ini.” (jurnal GERTAK : 39)

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat segelintir masyarakat Kabupaten Trenggalek yang masih memaksakan diri untuk memohon kepada aparat desa agar dimasukkan data kelompok miskin,

padahal secara kriteria perekonomiannya sudah tergolong masyarakat yang mampu. Namun hal itu hanya segelintir saja, dalam kenyataannya masih banyak pula masyarakat yang sadar diri dan melihat kebawah ternyata masih banyak masyarakat yang lebih membutuhkan.

2) Mekanisme Mutasi

Pada strategi mekanisme mutasi ini data msyarakat akan di update dalam 3 bulan sekali sehingga pemerintah bisa menyalurkan bantuan secara tepat sasaran. Tetapi pada kenyataannya, mekanisme mutasi ini terdapat kendala yaitu data rilis PBDT yang paling akhir ini tidak sesuai dengan data di lapangan. Seperti pernyataan H. Moch. Nur Arifin selaku Ketua TKPKD Kabupaten Trenggalek dalam jurnal GERTAK halaman 39:

“terus kemudian masih ada data orang meninggal yang masih tercatat, padahal kita mendapatkan data rilis PBDT yang paling akhir. Orang yang sudah meninggal masih banyak, orang pindah masih tercatat dan yang pindah status menjadi mampu, data ganda bahkan disini tadi ada kasus namanya itu ada namun dicari orangnya tidak ketemu.” (jurnal GERTAK : 39)

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pada strategi mekanisme mutasi masih terdapat masalah yaitu manajemen data kemiskinan yang belum valid meskipun data sudah di *update* setiap 3 bulan sekali. Masih terjadi kesalahan data yang seharusnya data itu mengalami perubahan bahkan penghapusan ataupun pergantian, tetapi realitanya masih banyak terjadi ketidakcocokan data saat survey di

lapangan. Keberhasilan dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Trenggalek sangat tergantung pada efektivitas program dan keterpaduan program penanggulangan kemiskinan antara pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah kabupaten. Oleh karena itu dibutuhkan data yang akurat, kemitraan produktif dan partisipasi dari segenap komponen masyarakat. Dibawah ini merupakan solusi yang dijalankan Program GERTAK untuk mengatasi masalah mekanisme mutasi yaitu dengan :

a) Mutasi Data Kemiskinan melalui GERTAK *Online*

Untuk mewujudkan manajemen data kemiskinan yang valid dan *update*, maka dibutuhkan pendekatan teknologi informasi yang terintegrasi dan partisipatif. Hal ini diimplementasikan melalui penyusunan GERTAK *online* sebagai Sistem Manajemen Data Kemiskinan Terintegrasi, sehingga program-program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Trenggalek akan menggunakan satu basis data untuk sasaran penerima programnya. Sementara sistem ini juga ditunjang dengan suatu aplikasi berbasis android yang dinamakan **GERTAK Apps**.



Gambar 17. GERTAK Apps yang berbasis android

Sumber : Dokumentasi Posko GERTAK

GERTAK Apps ini dapat digunakan sebagai media layanan pengaduan dan pelaporan yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat untuk memberikan informasi terkait kemiskinan, kerentanan dan permasalahan sosial lainnya. Seperti dikutip dari

humassetda.trenggalekkab.go.id, Bapak H. Moch. Nur Arifin selaku Ketua TKPKD Kabupaten Trenggalek mengatakan :

“GERTAK Apps merupakan layanan online untuk mendukung kegiatan penentuan kemiskinan secara mandiri (self define Poverty System). Melalui layanan ini, setiap pengguna aplikasi warga Trenggalek dapat berpartisipasi melaporkan mengirim data warga miskin di lingkungan sekitarnya sehingga memungkinkan Posko GERTAK untuk melakukan pemutakhiran data kemiskinan.” (online humassetda.trenggalekkab.go.id diakses tanggal 25 Mei 2018 pukul 12.03 WIB)

Selain itu aplikasi ini juga berfungsi sebagai alat survey rumah tangga miskin yang telah disesuaikan berdasarkan parameter program penanganan fakir miskin yang ditetapkan Kementrian Sosial. GERTAK Apps dan GERTAK *online* ini diharapkan dapat secara optimal digunakan mulai tingkat kabupaten sampai dengan desa, dengan mengacu pada konektivitas dan kesatuan data pada semua unit pelayanan yang terintegrasi.

3) Sistem Rujukan Terpadu (SRT)

a) Posko GERTAK sebagai Alternatif Pemerintah dalam penyediaan Unit Pelayanan Terpadu Kemiskinan

Unit-unit pelayanan terpadu ini nanti diharapkan akan menjadi rujukan segala pelayanan bentuk kemiskinan. Dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat khususnya masyarakat miskin, rentan dan termarginalkan maka dibentuk Posko GERTAK yang merupakan wujud implementasi Sistem Rujukan Terpadu (SRT). Posko GERTAK ini

adalah pusat sedekah informasi terkait kemiskinan, kerentanan dan permasalahan sosial lainnya. Berikut informasi yang diberikan Bapak Wildan selaku bagian operator Posko GERTAK :

“menurut saya sejak adanya posko GERTAK ini, masyarakat miskin di Kabupaten Trenggalek tidak perlu susah-susah untuk mengurus agar mendapat bantuan mbak. Cukup di Posko GERTAK ini, insyaallah semua sudah beres.” (hasil wawancara tanggal 21 Februari 2018 pukul 14.35 WIB)

Selanjutnya Bapak Emil Dardak selaku Bupati Kabupaten Trenggalek, dikutip dari *humassetda.trenggalekkab.go.id* juga menambahkan :

“kalau kita sering dengar pelayanan terpadu satu pintu bagi investor, kini ada pelayanan terpadu bagi warga miskin. Tidak perlu di ping-pong kesana sini, karena setiap unit kerja punya perwakilan yang berkantor di Posko GERTAK.” (online *humassetda.trenggalekkab.go.id* diakses tanggal 25 Mei 2018 pukul 18.37 WIB)

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa Posko GERTAK merupakan sebuah unit yang diperuntukkan masyarakat miskin untuk mendaftarkan diri agar mendapatkan bantuan. Posko GERTAK merupakan unit pelayanan terpadu satu pintu bagi masyarakat miskin. Posko GERTAK ini dirancang dengan *high-tech* mampu mendukung verifikasi data kemiskinan dengan cepat dan memberi dukungan secara sigap karena lengkapnya keterwakilan instansi dan lembaga yang berkompeten. Berikut informasi dari penerima bantuan Mas Riyanto yang rumah neneknya habis kebakaran dan mendaftarkan diri ke Posko GERTAK :

“Alhamdulillah mbak, dengan adanya Program GERTAK ini rumah nenek saya sudah dibangun kembali yang sebelumnya mengalami kebakaran. Prosesnya dari saya mendaftarkan ke Posko GERTAK mengadu kalau rumah nenek kebakaran sampai rumah nenek saya mau dibangun itu tidak lama mbak, mungkin sekitar 2 mingguan, tapi sebelumnya relawan dari GERTAK juga mensurvei lokasi dulu, dan pada saat pembangunannya, mas Ipin (Ketua TKPKD) juga ikut melihat pembangunan rumahnya mbak.” (hasil wawancara tanggal 24 Mei 2018 pukul 18.30 WIB)

Mengutip dari youtube Aiman Kompas TV, Mas Rohmat sebagai calon penerima bantuan juga menambahkan saat di wawancarai oleh Aiman :

“Saya datang kesini mau melapor kalau rumahnya ini kan atapnya bocor dan dindingnya masih menggunakan anyaman dari bambu. Tidak layak dan dirumah juga belum punya jamban. Saya datang ke Posko GERTAK bermaksud untuk bedah rumah. Saya sangat senang Trenggalek punya Program GERTAK sehingga masyarakat miskin seperti saya punya harapan untuk hidup yang lebih baik.” (online youtube Aiman Kompas TV, menit ke 02:53 sampai 03:33)

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan dengan adanya Program GERTAK dan Posko GERTAK sangat membantu kelayakan hidup bagi masyarakat miskin di Kabupaten Trenggalek. Masyarakat yang datang melapor ke Posko GERTAK tentunya harus melengkapi persyaratan administrasi dahulu, selanjutnya masuk *database* dan dilakukan survey lapangan oleh *taskforce* Posko GERTAK. Dibawah ini adalah dokumentasi Posko GERTAK pada saat diresmikan oleh Menteri Sosial Republik Indonesia Ibu Khofifah Indar Parawansa :



Gambar 18. Posko GERTAK Kabupaten Trenggalek
Sumber : Dokumentasi Posko GERTAK

Dalam Posko GERTAK ini, selain menjadi Sekretariat TKPKD dan Sekretariat SDGs, terdapat pelayanan pengaduan yang melibatkan beberapa OPD terkait, BAZNAS, BPJS, Forum CSR, TKSK dan pengelola program-program penanggulangan kemiskinan yang ada di Kabupaten Trenggalek. Selain itu untuk mendukung pelayanan Posko GERTAK juga telah dikukuhkan *Task Force* Posko GERTAK (Pasukan Pink) bertepatan pada hari lahir Pancasila 1 Juni 2017. Pasukan pink terdiri dari komunitas peduli sosial yang secara sukarela membantu Pemerintah Daerah untuk memastikan bantuan program penanggulangan kemiskinan agar tepat sasaran. Berikut informasi dari Mas Sofyan selaku taskforce Posko GERTAK :

“kami *taskforce* Posko GERTAK tugasnya mencari dan menampung informasi terkait kemiskinan, melakukan cek lapangan, mendampingi, dan membantu menjembatani persoalan masyarakat miskin Kabupaten Trenggalek untuk dilaporkan ke Pemerintah agar secepatnya dicarikan solusi dan penanganan lebih lanjut.” (hasil wawancara tanggal 5 Maret 2018 pukul 10.15 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan agar kinerja Program GERTAK lebih maksimal maka dibentuklah *taskforce* Posko GERTAK untuk pengembangan kemitraan salah satunya menggandeng relawan peduli sosial yang sewaktu-waktu dapat diturunkan ke lapangan agar persoalan bisa segera diatasi dan ditemukan solusinya. Berikut dokumentasi saat pembentukan taskforce Posko GERTAK :



Gambar 19. Task force Posko GERTAK (Pasukan Pink)
Sumber : Dokumentasi Posko GERTAK

4) Bina Ekonomi Rakyat

Strategi Bina Ekonomi Rakyat ini maksudnya adalah masyarakat yang masih produktif akan dibina dengan program berkelanjutan, unit usaha untuk masyarakat kurang mampu. Dalam upaya meningkatkan sektor ekonomi kerakyatan, masyarakat miskin perlu mendapat kesempatan dan akses terhadap berbagai sumber permodalan dan peluang usaha tanpa dibebani dengan persyaratan yang menyulitkan. Sedangkan peluang-peluang sosial adalah upaya untuk meningkatkan kesempatan

masyarakat miskin melakukan mobilitas sosial-ekonomi secara vertikal melalui pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, serta akses sanitasi dan air bersih. Anty Poverty Program (APP), JAPRI (Jadi pengusaha mandiri), KEPEL (kelompok peningkatan ekonomi lokal), Kredit Gangsar, Trenggalek Gemilang, Pengembangan Pertanian Terpadu, Program Bedah Rumah Layak Huni (RTLH) dan Program Padat Karya lainnya adalah beberapa program yang diharapkan dapat berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Trenggalek. Dibawah ini informasi dari Bapak Wildan selaku bagian operasional Posko GERTAK :

“untuk mewujudkan strategi Bina Ekonomi Rakyat, Program GERTAK dibantu oleh SKPD terkait di Kabupaten Trenggalek serta berkolaborasi dengan mitra usaha yang dipilih pemerintah. Jadi masyarakat miskin yang masih usia produktif diberikan pemberdayaan ekonomi kreatif melalui program-program yang bekerja sama dengan Program GERTAK. Diantaranya adalah APP, JAPRI, Pengembangan Pertanian Terpadu, KUBE, Jalin Matra dan Program Padat Karya lainnya. Masyarakat miskin ini diberikan permodalan, didampingi, dibina sampai masyarakat dirasa cukup mandiri untuk melanjutkan usahanya. Strategi ini diharapkan mampu untuk menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Trenggalek.” (hasil wawancara tanggal 19 Februari 2018 pukul 14:49 WIB)

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat miskin yang dalam usia produktif, diberikan permodalan, pendampingan dan pembinaan sampai masyarakat tersebut dirasa sudah cukup mandiri untuk bisa mengembangkan usaha yang di kerjakannya. Strategi ini diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat sehingga masyarakat dapat lebih produktif.

5) Evaluasi dan Redefinisi

Pada tahun 2017 telah dilaksanakan restrukturisasi kelembagaan TKPKD yang menyesuaikan dengan penyelenggaraan dan kebutuhan Program GERTAK dan sekaligus pembentukan Sekretariat SDGs dimana upaya pengentasan kemiskinan merupakan agenda utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

a) Tujuan diadakan Forum KISS ME dalam Program GERTAK

Proses evaluasi Program GERTAK ini dikemas dalam forum diskusi Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, Sinergitas, serta Monitoring dan Evaluasi (KISS ME). Forum KISS ME ini bertujuan untuk mengevaluasi dan meredefinisi implementasi Program GERTAK agar program penanggulangan kemiskinan serta program pemberdayaan masyarakat dapat berjalan lebih baik lagi. Hal ini sesuai dengan wawancara Bapak Wildan selaku bagian operasional Posko GERTAK :

“jadi Forum KISS ME ini sebagai salah satu usaha yang dilakukan oleh Program GERTAK mbak, dimana forum ini nantinya menghadirkan beberapa *stakeholder* yang terlibat untuk membahas masalah atau kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi Program GERTAK. Baik itu masalah internal misalnya koordinasi, komunikasi dan peran *stakeholder* yang terkait, maupun masalah eksternal misalnya kendala yang dihadapi di lapangan. Forum ini sangat diperlukan agar Program GERTAK semakin baik lagi.”
(hasil wawancara tanggal 21 Februari 2018 pukul 15.08 WIB)

Berdasarkan wawancara diatas diketahui bahwa Forum KISS ME merupakan usaha dalam mengevaluasi yang dilakukan antar *stakeholder* yang membahas berbagai permasalahan yang dialami pada saat

implementasi Program GERTAK. Dengan berjalannya forum ini diharapkan agar ketepatan sasaran, dan permasalahan lainnya segera dituntaskan. Dibawah ini dokumentasi Forum KISS ME :



Gambar 20. Forum KISS ME

Sumber : Dokumentasi Posko GERTAK

3. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi program Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan (GERTAK) dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Trenggalek.

a. Faktor yang mendukung implementasi program Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan (GERTAK) di Kabupaten Trenggalek.

Faktor pendukung merupakan faktor yang membuat implementasi Program GERTAK dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat bisa berjalan dengan baik dan lancar. Faktor-faktor yang mendukung dalam implementasi Program GERTAK diharapkan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Faktor pendukung dalam implementasi Program GERTAK berdasarkan fakta dilapangan mengungkapkan bahwa ada 3 hal yang membuat implementasi Program GERTAK menjadi lebih baik, yaitu: 1) Dana yang mencukupi baik dari dana APBD maupun dana dari BAZNAS; 2) Koordinasi dan komunikasi yang baik antar *stakeholder* yang terlibat; 3) Keakuratan data, sehingga program GERTAK lebih tepat sasaran. Penjelasan secara rinci adalah sebagai berikut:

- 1) Dana yang mencukupi baik dari dana APBD dan dana dari BAZNAS Kabupaten Trenggalek.

Program GERTAK diharapkan dapat berjalan dengan baik dan lancar dikarenakan dana yang dikeluarkan untuk seluruh kegiatan Program GERTAK sangat mencukupi. Dana yang diperoleh untuk Program GERTAK ini berasal dari APBD dan dana dari BAZNAS, hal ini sesuai

dengan pernyataan Bapak Supriyanto selaku bagian operasional Posko GERTAK terkait tentang faktor pendukung Program GERTAK :

“salah satu faktor yang paling mendukung itu dari dananya mbak. Dana yang tersedia untuk program GERTAK ini mendukung banget. Apalagi dana yang diturunkan dari APBD itu cukup besar juga mbak. Selain itu juga dana yang didapat dari BAZNAS juga sangat membantu untuk sumber pendanaan Program GERTAK ini. Jadi ya Alhamdulillah sangat memperlancar kegiatan Program GERTAK.” (hasil wawancara 28 Februari 2018 pukul 14.10 WIB)

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dana merupakan faktor pendukung yang sangat penting dalam implementasi Program GERTAK. Dana yang tersedia sangat mempengaruhi kelancaran dari kegiatan Program GERTAK.

2) Koordinasi, Komunikasi dan Peran antar *Stakeholder* yang terlibat

Koordinasi dan komunikasi yang baik merupakan faktor pendukung yang juga penting dalam kelancaran implementasi program GERTAK dalam mencapai tujuannya. Dalam implementasi program GERTAK, koordinasi dan komunikasi yang baik harus terjalin antar *stakeholder* yang terlibat. Koordinasi rutin juga dilakukan agar implementasi program GERTAK dapat berjalan dengan baik. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Welly Cyndy Pritaningrum selaku bagian operasional Program GERTAK:

“Pada Program GERTAK ini dilakukan rapat koordinasi dari TKPK secara rutin mbak, biasanya dilakukan 3 bulan sekali dan dalam rapat itu dibahas beberapa permasalahan yang ditemukan di lapangan. Selain itu juga membahas tentang evaluasi maupun

strategi untuk menjadikan Program GERTAK ini semakin lebih baik lagi.” (hasil wawancara tanggal 19 Februari 2018 pukul 11.12 WIB)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa koordinasi rutin antar *stakeholder* sangat penting dilakukan agar program GERTAK tetap berjalan dengan baik. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan program GERTAK tetap terkontrol dan apabila terdapat masalah bisa segera diatasi karena selalu dilakukan koordinasi rutin yang dilakukan oleh antar stakeholder. Tanpa adanya koordinasi yang rutin dan komunikasi yang baik, mustahil jika program GERTAK dapat berjalan dengan baik dalam mencapai tujuannya.



Gambar 21. Foto Rapat Koordinasi TKPK Kabupaten Trenggalek Tahun 2017

Sumber: Dokumentasi Posko GERTAK

Selain koordinasi dan komunikasi yang baik antar *stakeholder*, peran masing-masing stakeholder juga sangat mempengaruhi kelancaran

dari implementasi Program GERTAK. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Supriyanto selaku bagian operasional Posko GERTAK

“kalau menurut saya peran *stakeholder* sangat mendukung implementasi Program GERTAK ini mbak. Seperti peran *taskforce*, guru, bidan dan juga kepala desa yang mendukung dan sudah tersosialisasi dengan baik dapat membuat jalannya program ini lancar juga. Kalau masing-masing *stakeholder* tidak melaksanakan tugasnya sesuai perannya, Program GERTAK juga nggak bisa jalan mbak.” (hasil wawancara tanggal 19 Februari 2018 pukul 10.56 WIB)

Dari hasil wawancara tersebut peneliti mengambil kesimpulan bahwa peran masing-masing stakeholder sangat mendukung pelaksanaan Program GERTAK. Mulai peran *taskforce*, guru, bidan dan kepala desa juga sangat mendukung jalannya Program GERTAK. Masing-masing *stakeholder* sudah mempunyai tugasnya masing-masing sesuai dengan bidangnya dan harus dijalankan sesuai fungsinya agar Program GERTAK ini dapat mencapai tujuannya.

b. Faktor yang menghambat implementasi program Gerakan tengok Bawah Masalah Kemiskinan (GERTAK) di Kabupaten Trenggalek.

Dalam melaksanakan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Trenggalek sendiri tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat beberapa permasalahan diantaranya:

1. Pola Pikir Masyarakat

Pola pikir atau *mindset* dari masyarakat merupakan juga faktor yang penting dalam implementasi Program GERTAK. Persoalan pola pikir masyarakat menentukan sejauh mana bantuan yang diterima oleh kelompok sasaran tersebut dimaksimalkan pemanfaatannya. Dalam pengamatan di lapangan ditemui beberapa persoalan dimana bantuan yang diterima oleh kelompok sasaran kurang tepat sasaran dalam pemanfaatannya. Hal ini dijelaskan oleh Ibu Aris Mbajeng Wahyu Prasiska selaku bagian operator Posko GERTAK :

“salah satu faktor penghambatnya yaitu pola pikir masyarakat mbak, kemarin banyak kasus yang ditemui pada saat dilapangan. Jadi masyarakat sangat senang jika mendapatkan bantuan dari pemerintah meskipun mereka dianggap miskin. Apalagi ada kata “gratis” masyarakat dengan sigap langsung mendaftar padahal secara ekonomi mereka sudah tercukupi.” (hasil wawancara tanggal 19 Februari 2018 pukul 15:57 WIB)

Dari keterangan diatas dapat diketahui bahwa dalam implementasinya Program GERTAK itu sendiri belum sepenuhnya tepat dalam pemanfaatannya. Dalam pemanfaatan bantuan masih ada ditemukan ketidaksesuaian-ketidaksesuaian yang terjadi di lapangan. Ketidaksesuaian ini dikarenakan salah satunya adalah masyarakat mengaku-ngaku miskin padahal secara ekonomi mereka tercukupi, sehingga menyebabkan yang terdata bukan warga miskin.

2. Ketidakakuratan Data dalam Menentukan Kelompok Sasaran

Ketidakakuratan data merupakan faktor penghambat Program GERTAK dalam mencapai tujuannya. Ketidakakuratan data ini

berkaitan dengan data sasaran dari Program GERTAK yang akan mendapatkan bantuan. Ibu Aris Mbajeng Wahyu Prasiska selaku bagian operasional Posko GERTAK memberikan pendapatnya terkait dengan faktor penghambat ini:

“kalau menurutku faktor penghambat pelaksanaan Program GERTAK secara global itu ketidakakuratan data mbak. Artinya jika data itu tidak sesuai dengan sasaran, mau melangkah selanjutnya itu jadi kebingungan mbak, takut kalau tidak tepat sasaran. Kalau datanya tidak akurat kan jadi perlu dicek kembali agar tidak terjadi kesalahan juga mbak.” (hasil wawancara tanggal 12 Februari 2018 pukul 10.21 WIB)

Dari hasil wawancara tersebut peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa ketidakakuratan data terkait sasaran Program GERTAK sangat menghambat pelaksanaan dari Program GERTAK ini. Apabila data sasaran Program GERTAK tidak akurat, untuk melangkah ke tahap selanjutnya tidak dapat berjalan dengan baik karena perlu dilakukan pengecekan ulang agar data sesuai dengan kenyataan di lapangan.

C. Analisis Data

1. Implementasi Program Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan (GERTAK) dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Trenggalek

Program GERTAK merupakan salah satu dari program-program penanggulangan dan pengentasan kemiskinan yang dicanangkan sebagai program oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Trenggalek. Berdasarkan Keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 188.45//35.03.001.3/2017 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Trenggalek ini bahwa Program GERTAK ini di implementasikan sebagai upaya memberikan jaminan sosial yaitu menjamin fakir miskin yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi. Pada program ini kebutuhan yang akan dipenuhi berbeda-beda pada setiap penerima bantuan tergantung apa yang di butuhkan oleh penerima bantuan.

Program GERTAK berangkat dari sebuah gerakan sosial yang tujuannya untuk menanggulangi kemiskinan terhadap warga miskin di Kabupaten Trenggalek yang sesuai dengan kriteria penerima bantuan. Menurut Putra dkk (2006:3) bahwa gerakan sosial memiliki beberapa jenis, diantaranya gerakan perpindahan, ekspansif, utopia, reformasi, revolusioner, regresif, perlawanan, progresif, dan konservatif. Dari beberapa jenis gerakan diatas, Program GERTAK merupakan jenis gerakan sosial progresif. Putra dkk mengemukakan bahwa gerakan sosial

progresif merupakan gerakan yang bertujuan memperbaiki masyarakat dengan cara mengadakan perubahan-perubahan positif lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi. Program GERTAK menjadi terobosan baru dalam pemecahan permasalahan kemiskinan di era sekarang. Program GERTAK disebut sebagai gerakan sosial progresif dikarenakan program ini memperbaiki sistem penanggulangan kemiskinan yang sebelumnya dirasa belum mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Trenggalek secara efektif, maka dengan didukung gagasan yang inovatif dan peran *stakeholder* yang baik program ini membawa perubahan-perubahan yang positif untuk menanggulangi kemiskinan dan kerentanan di Kabupaten Trenggalek.

Dalam pengimplementasiannya sebelum menjadi sebuah program yang unggul, Program GERTAK melewati beberapa tahapan-tahapan tertentu agar program GERTAK ini dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuannya dari proses awal hingga bantuan turun ke penerima bantuan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Putra (2006:27) bahwa gerakan sosial melewati tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Tahap Kegelisahan
Dalam tahap ini terjadi ketidak puasan akibat pergolakan sistem yang kurang baik. Tahap ini bisa meluas dan berlangsung selama beberapa tahun.
- b. Tahap kegusaran.
Setelah perhatian dipusatkan pada kondisi-kondisi yang menimbulkan kegelisahan, maka terhimpun sebuah kolektivitas. Kegelisahan yang muncul dalam kolektivitas ini digerakkan oleh para agitator atau pemimpin.

- c. Tahap formalisasi.
Dalam tahap ini, tidak tampak adanya struktur formal yang terorganisir yang dilengkapi dengan hierarki petugas-petugas. Salah satu tugas penting adalah menjelaskan ideologi gerakan kepada anggota yang telah bersatu. Sebab-sebab terjadinya ketidakpuasan, rencana aksi dan sasaran-sasaran gerakan.
- d. Tahap pelebagaan.
Jika gerakan tersebut berhasil menarik banyak pengikut dan dapat memenangkan dukungan publik, akhirnya akan terjadi pelebagaan. Selama tahap ini, ditetapkan suatu birokrasi dan kepemimpinan yang profesional yang disiplin mengganti figur-figur kharimatik sebelumnya.

Berdasarkan pendapat Putra diatas, terdapat beberapa tahapan yang harus dilewati agar dapat dikatakan menjadi sebuah gerakan. Program GERTAK pula melewati beberapa tahapan diatas dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Tahap Kegelisahan, tahap ini ditandai dengan Pemerintahan Kabupaten Trenggalek yang terpilih (baru), dengan berbagai analisis dan penggalian informasi menganggap program pengentasan kemiskinan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang ada dirasa masih kurang efektif dalam mengatasi pengentasan kemiskinan serta pemberdayaan masyarakat, sehingga merasa perlu upaya baru untuk mengatasinya.
- b. Tahap Kegusaran, pada tahap ini ditandai dengan kolektivitas Pemerintah Kabupaten Trenggalek menyusun dan merancang program pemberdayaan masyarakat serta pengentasan kemiskinan.
- c. Tahap Formalisasi, di tahap ini program pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan tersebut, hasil rancangan Pemerintah

Kabupaten Trenggalek mulai dibahas di internal mereka sehingga melahirkan klausul (kesepakatan) serta rancangan taktis sistematis.

- d. Tahap Pelembagaan, rancangan taktis sistematis mengenai program pemberdayaan masyarakat serta pengentasan kemiskinan yang sebelumnya melalui tahap formalisasi mulai dilembagakan dengan adanya struktur formal, terorganisir, yang dilengkapi dengan hierarki petugas.

Sedangkan menurut Zuhro (2012:90-91) dalam membangun gerakan sosial poin penting yang perlu diperhatikan antara lain: sebab-sebab munculnya gerakan, tujuan yang ingin dicapai, bentuk-bentuk gerakan dan pelaku gerakan yang akan dipilih. Dari tersebut juga menambahkan siklus dalam gerakan sosial terutama terjadi di Indonesia baik skala besar atau skala kecil. Siklus gerakan sosial ini jika dikaitkan dengan Program GERTAK, bahwa program ini berada pada fase tumbuh dan sedang menghadapi fase selanjutnya, apakah target berhasil atau fase lainnya.

Dalam mengimplementasikan suatu program harus mengikuti beberapa aspek yang ditentukan agar dapat berjalan dengan baik. Hal ini sesuai dengan pendapat Abdullah (1987:17) dalam proses implementasi program sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlak yaitu: 1) adanya program yang dilaksanakan 2) *target group* 3) unsur pelaksana baik organisai maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan dari proses program tersebut.

Berdasarkan pendapat Abdullah tersebut, apabila dikaitkan dengan implementasi Program GERTAK maka program ini dikatakan belum berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan Program GERTAK terdapat kendala terkait kelompok sasaran (*target group*). Kendala yang utama yaitu dikarenakan ketidakakuratan sumber data yang diperoleh dari PPLS 2011 dan PBDT 2015 tersebut tidak sesuai dengan realita di lapangan. Dengan adanya permasalahan tersebut, pemerintah harus bekerja lebih maksimal untuk memverifikasi dan memvalidasi ulang data tersebut dalam kegiatan musyawarah desa/kelurahan (musdes) agar data yang di dapat lebih akurat dan valid. Sehingga bantuan yang diberikan kepada kelompok sasaran lebih tepat sasaran karena permasalahan tersebut dikelola dengan baik.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Program GERTAK merupakan program terobosan baru dalam pemecahan permasalahan kemiskinan di Kabupaten Trenggalek. Program ini masih berjalan kurang lebih 1 tahun, tentunya dalam usia program yang relatif muda ini tidak lepas dari beberapa hambatan yang menyebabkan program ini berjalan kurang baik. Tetapi dari beberapa faktor penghambat yang ditemukan pada saat implementasi Program GERTAK, pemerintah dengan sigap mengatasi permasalahan tersebut dengan melibatkan *stakeholder* yang terkait. Dibawah ini adalah penjelasan analisis data dari fokus penelitian:

a. Organisasi Pelaksana

Dalam sebuah implementasi program, organisasi pelaksana merupakan salah satu faktor yang sangat penting. Hal ini sesuai dengan pendapat Abdullah (1987:17) bahwa hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses implementasi program sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlak, salah satu diantaranya adalah unsur pelaksanaan, baik organisasi maupun perorangan yang bertanggungjawab dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan dari proses pelaksanaan program tersebut. Program GERTAK dijalankan atas campur tangan dari organisasi pelaksana tertentu yang bertanggung jawab dalam bidangnya masing-masing. Organisasi pelaksana yang terlibat implementasi program GERTAK meliputi:

- 1) TKPKD Kabupaten Trenggalek
- 2) Bappeda Kabupaten Trenggalek
- 3) Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek
- 4) BAZNAS Kabupaten Trenggalek
- 5) Posko GERTAK
- 6) BPS
- 7) *Task force* GERTAK
- 8) Tokoh-tokoh masyarakat

Masing-masing organisasi pelaksana yang terlibat dalam implementasi Program GERTAK memiliki peran dan tanggungjawab

masing-masing. Selain itu dalam implementasi Program GERTAK dibutuhkan kerjasama yang baik antar organisasi pelaksana. Dengan adanya kerjasama yang baik, pelaksanaan Program GERTAK akan berjalan dengan lancar dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Menurut hasil penelitian bahwa semua organisasi pelaksana yang terlibat dalam implementasi Program GERTAK di Kabupaten Trenggalek memiliki peranan yang penting untuk kelancaran program tersebut. Semua organisasi pelaksana memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan bidangnya. Masing-masing organisasi pelaksana serta dibantu dengan peran *stakeholder* lainnya tersebut dalam implementasi Program GERTAK sudah berkoordinasi dengan baik dari pembentukan Program GERTAK hingga sekarang ini.

b. Sumber Pembiayaan

Sumber pembiayaan juga merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam implementasi suatu program. Wahab (2012:91) mengatakan bahwa ada 5 hal terpenting dalam implementasi program yaitu:

- a) Struktur organisasi, yang berkaitan dengan interaksi, hierarki, tujuan dan sifat-sifat.
- b) Sumber daya manusia, yaitu berkaitan dengan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
- c) Sumber sarana dan prasarana, berkaitan dengan fasilitas yang mendukung agar pekerjaan yang dihasilkan berkualitas dan bermanfaat secara efisien dan efektif.

- d) Metode kerja/prosedur kerja, yaitu berhubungan atau berkoordinasi dengan system dan prosedur kerja yang sudah baku sehingga dapat bekerjasama secara terpadu dan tidak tumpang tindih serta sudah memahami tugas dan tanggungjawab masing-masing, sehingga memudahkan untuk melaksanakan tugas masing-masing dengan efektif.
- e) Perangkat hukum, yaitu berkaitan dengan suatu undang-undang, peraturan-peraturan yang mendukung suatu organisasi menjalankan aktivitasnya secara formal. Dalam hal ini organisasi harus memiliki kekuatan hukum.
- f) Anggaran dana

Berdasarkan pendapat dari Wahab diatas, salah satu yang terpenting dalam implementasi program adalah anggaran dana. Besaran dana yang dipersiapkan sangat mempengaruhi jalannya suatu program untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dari awal. Perencanaan dana ini bertujuan agar dalam proses pengimplementaannya tidak memakan biaya lebih dari yang sudah ditetapkan. Hal ini juga dijelaskan dalam Undang-undang No. 13 tahun 2011 tentang penanganan Fakir Miskin bahwa sumber daya yang dibutuhkan dalam mengimplementasikan suatu program adalah sumberdaya manusia dan sumber pendanaan. Pada implementasi Program GERTAK dana yang keluar untuk program ini berasal dari dana APBD dan BAZNAS. Dana Program GERTAK ini diberikan keluarga yang sangat miskin yang menjadi peserta Program GERTAK yang telah ditetapkan oleh pusat. Besaran bantuan yang diberikan kepada keluarga sangat miskin memiliki jumlah yang berbeda-beda dan dapat berubah dikemudian hari tergantung komponen apa yang dimiliki masing-masing keluarga sangat miskin. Masing-masing

komponen Program GERTAK mendapatkan bantuan yang berbeda pula dari pusat.

Dana yang dikeluarkan untuk kepentingan Program GERTAK ini berasal dari daerah melalui dana APBD yang merupakan dana perimbangan daerah dari pusat dan juga dari BAZNAS Kabupaten Trenggalek. Dana APBD ini dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Trenggalek sebesar 10% dari dana pusat yang diberikan setiap satu tahun sekali. Dana dari APBD biasanya lebih digunakan untuk biaya operasional Program GERTAK, misalnya biaya untuk pengadaan rapat koordinasi, sosialisasi, musyawarah desa/kelurahan, serta kebutuhan agenda-agenda Program GERTAK lainnya. Sedangkan dana dari BAZNAS lebih digunakan untuk penerima bantuan Program GERTAK sesuai dengan kriterianya masing-masing keluarga sangat miskin.

Dari hasil penelitian dilapangan bahwa dana yang diperlukan untuk Program GERTAK tidak hanya berasal dari APBD saja, melainkan BAZNAS Kabupaten Trenggalek juga ikut berkontribusi dalam urusan pendanaan. Dana BAZNAS ini didapat melalui sumbangan yang bersifat sukarela dari para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menyisihkan sebagian penghasilannya dan dikumpulkan melalui BAZNAS. Dan dana APBD digunakan untuk operasional Program GERTAK, sedangkan dana BAZNAS digunakan untuk penerima bantuan.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bantuan yang diberikan kepada keluarga sangat miskin sudah sesuai dengan aturan yang

telah ditetapkan. Bantuan yang diterima masyarakat sangat membantu kehidupan mereka terutama dalam hal kesejahteraan masyarakat. Proses penyaluran Program GERTAK di Kabupaten Trenggalek hingga saat ini sudah berjalan dengan baik. Bantuan yang telah diterima oleh keluarga sangat miskin sudah digunakan sesuai dengan fungsinya.

c. Kelompok Sasaran

Suatu program dijalankan tidak pernah lepas dari kelompok sasaran dari dibentuknya program tersebut. Sasaran suatu program berhubungan dengan siapa yang akan menerima dari bantuan tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Abdullah (1987:17) yang menyatakan dalam proses program sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlak yaitu:

- a. Adanya program yang dilaksanakan, jadi ada tujuan yang ingin dicapai dari program tersebut.
- b. *Target group*, yaitu kelompok yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut dalam bentuk perubahan dan peningkatan. Jadi dari pelaksanaan program yang telah dibuat tersebut diharuskan memberi dampak positif pada masyarakat yang menjadi target program tersebut.
- c. Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang bertanggungjawab dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan dari proses pelaksanaan tersebut.

Berdasarkan pernyataan Abdullah diatas salah satu yang terpenting kelompok sasaran (*target group*), yaitu kelompok yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut dalam bentuk perubahan dan peningkatan. Berdasarkan pendapat yang

dikemukakan Abdullah, kelompok sasaran menjadi unsur terpenting dalam implementasi suatu program. Realitanya pada implementasi Program GERTAK, dalam menentukan kelompok sasaran menjadi salah satu kendala yang dikarenakan terjadi ketidaksesuaian data yang ada dengan fakta dilapangan. Jadi sumber data yang di dapat dari data PPLS 2011 dan PBDT 2015 masih ditemukan ketidakakuratan data. Tentunya pemerintah telah mengupayakan permasalahan tersebut dengan mengadakan musyawarah desa/kelurahan (musdes) guna memverifikasi/memvalidasi data tersebut agar lebih akurat dan valid. Sehingga kinerja Program GERTAK akan berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan.

Penetapan sasaran Program GERTAK berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, pada Bab III Pasal 6 dituliskan bahwa sasaran dari penanganan fakir miskin ditujukan kepada keluarga. Berdasarkan kebijakan tersebut, maka sasaran utama dari program GERTAK adalah keluarga sangat miskin terpilih yang telah ditetapkan oleh BPS sesuai dengan kriteria. Kriteria tersebut antara lain:

- 1) Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m² per orang;
- 2) Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan;
- 3) Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester;
- 4) Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain;
- 5) Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik;
- 6) Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/ air hujan;
- 7) Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah;

- 8) Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam dalam satu kali seminggu;
- 9) Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun
- 10) Hanya sanggup makan sebanyak satu atau dua kali dalam sehari;
- 11) Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik;
- 12) Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 500m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan tau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan;
- 13) Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga tidak bersekolah/tidak tamat SD/tamat/SD;
- 14) Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Sasaran utama dari Program GERTAK adalah dari keluarga yang sangat miskin. Untuk kriteria keluarga sangat miskin yang ditentukan BPS ketika turun masih perlu dilakukan pengecekan kembali oleh para *stakeholder* dari tingkat desa seperti RT/RW serta *taskforce* GERTAK. Hal ini dikarenakan ketika turun, bantuan yang diberikan beberapa ada yang tidak tepat sasaran. Pernyataan ini sesuai dengan keterangan Ibu Welly Cyndy Pritaningrum selaku bagian oprasional Posko GERTAK.

d. Implementasi Lima Strategi Program GERTAK

1. *Golden Standart* Klasifikasi

Untuk mencapai tujuan dari *Golden Standart* Klasifikasi, yaitu bahwa peran dari pemerintah sangat dibutuhkan dalam memberikan standar atau membuat klasifikasi bagi masyarakat miskin yang dianggap berhak menerima bantuan. Pemerintah dalam hal ini adalah unsur

terpenting dalam menentukan standar klasifikasi. Sesuai dengan pendapat Abdullah (1987:17) bahwa unsur pelaksana baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan dari proses pelaksanaan tersebut. Jadi unsur pelaksana itu yang menentukan implementasi program tersebut dapat berjalan sesuai tujuannya atau tidak.

Dalam strategi *Golden Standart* Klasifikasi ini masih terdapat masalah yaitu masyarakat Kabupaten Trenggalek mengaku-ngaku miskin hanya karena agar mendapatkan bantuan dari Program GERTAK. Hal ini berarti pemerintah belum sepenuhnya berhasil dalam membuat klasifikasi bagi masyarakat miskin, mana yang berhak atau tidak untuk masyarakat miskin. Masyarakat Trenggalek tidak melihat kebawah bahwa masih ada sanak saudara kita yang masih membutuhkan, hal ini menjadikan bantuan kemiskinan pemerintah tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, demi mengatasi permasalahan pada strategi *golden standart* klasifikasi, Pemerintah Kabupaten Trenggalek memberikan solusi dengan diadakan musyawarah desa yang tujuannya untuk memverifikasi dan memvalidasi data kemiskinan agar tepat sasaran. Serta tujuan lainnya yaitu merubah pola pikir masyarakat dengan mengajak masyarakat yang mengaku miskin untuk melihat kebawah apakah memang dirinya miskin, ataukah masih banyak masyarakat lain yang lebih miskin.

2. Mekanisme Mutasi

Sumber data menjadi salah satu poin terpenting dalam menentukan nama-nama yang menjadi kelompok sasaran. Apabila tidak didukung dengan sumber data yang baik, maka yang ada malah pemberian bantuan kepada calon penerima bantuan tidak tepat sasaran. Menurut Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gun dalam Wahab (2012:71-78) bahwa ada syarat-syarat untuk dapat melaksanakan program secara sempurna yaitu:

- a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan mengalami gangguan atau kendala yang serius. Hambatan-hambatan tersebut mungkin sifatnya fisik, politis dan sebagainya.
- b. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai.
- c. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia.
- d. Program yang akan dilaksanakan didasarkan oleh suatu hubungan kausalitas yang handal.
- e. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya.
- f. Hubungan saling ketergantungan kecil.
- g. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
- h. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.
- i. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
- j. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

Berdasarkan pernyataan yang dikemukakan oleh Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gun tersebut terdapat beberapa syarat yang dapat melaksanakan program secara sempurna, jika dikaitkan dengan pendapat Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gun maka sumber data yang baik masuk dalam syarat ke 2 (dua) dan 3 (tiga) dimana dalam teori tersebut disebutkan bahwa untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-

sumber yang cukup memadai, serta perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia. Permasalahannya, sumber data Program GERTAK yang mengacu pada data kemiskinan PPLS 2011 dan PBDT 2015 masih ditemukan ketidaksesuaian data saat dilapangan. Ketidakakuratan data ini disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya apabila nama yang bersangkutan tersebut meninggal dunia, berganti status menjadi mampu, ditemukan data ganda, pindah luar kabupaten/provinsi, serta namanya tidak ditemukan di lapangan.

Berdasarkan pernyataan dari Bapak Wildan selaku bagian operasional Posko GERTAK menyarakan bahwa masih ditemukan sumber data yang tidak akurat dikarenakan mutasi status yang berubah dengan sangat cepat, atau kekeliruan pendataan maupun kesalahan *entry* data. Dalam mengatasi permasalahan mengenai Basis Data Terpadu tersebut, pemerintah sudah memberikan inovasi baru yang tujuannya menyelesaikan permasalahan data yang tidak akurat, valid dan tidak *update*. Untuk mewujudkan manajemen data kemiskinan yang valid dan *update*, maka dibutuhkan pendekatan teknologi informasi yang terintegrasi dan partisipatif. Hal ini diimplementasikan melalui penyusunan GERTAK *online* sebagai Sistem Manajemen Data Kemiskinan Terintegrasi, sehingga program-program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Trenggalek akan menggunakan satu basis data untuk sasaran penerima programnya. Sementara sistem ini juga ditunjang dengan suatu aplikasi berbasis android yang dinamakan GERTAK Apps.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa GERTAK *online* ini sudah dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Masyarakat dapat mengadakan sanak saudaranya yang membutuhkan dengan cara mendaftarkan dengan GERTAK Apps ini, selain dengan cara pengaduan lewat Posko GERTAK. GERTAK *online* ini sebagai upaya permasalahan terkait ketidakakuratan data yang diharapkan tidak ditemukan lagi ketidaksesuaian-ketidaksesuaian yang terjadi di lapangan.

3. Sistem Rujukan Terpadu

Dalam rangka mengimplementasikan Program GERTAK perlu mendapatkan dukungan secara materi maupun *support*, dukungan tersebut didapat dari berbagai pihak baik pemerintah maupun dari pihak masyarakat. Apabila tidak mendapatkan dukungan yang baik program yang dijalankan pemerintah tidak dapat berjalan dengan baik dan bahkan menjadi suatu kendala yang menghambat kinerja program tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sunggono (1994:149-153) yaitu :

a. Isi Program

Pertama, pelaksanaan program gagal karena masih samanya isi program, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program terlalu umum atau sama sekali tidak ada. Kedua, karena kurangnya ketepatan intern maupun ekstern dari program yang akan dilaksanakan. Ketiga, program yang akan dilaksanakan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. Keempat, penyebab lain dari timbulnya kegagalan pelaksanaan suatu program dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang

menyangkut sumberdaya-sumberdaya pembantu, misalnya yang menyangku waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.

b. Informasi

Pelaksanaan program mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.

c. Dukungan

Pelaksanaan suatu program akan sangat sulit apabila pada pelaksanaannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan program tersebut.

d. Pembagian Potensi

Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya pelaksanaan suatu program juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggungjawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas.

Berdasarkan pernyataan yang di kemukakan oleh Sunggono tersebut terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan agar tidak menjadi penghambat dalam implementasi program. Apabila dikaitkan dengan pendapat Sunggono maka dukungan masuk dalam faktor nomor ke 3 (tiga) dimana dalam teori tersebut dijelaskan bahwa pelaksanaan program akan sangat sulit apabila pada pelaksanaannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan program tersebut. Dalam implementasi Program GERTAK dukungan yang dimaksud adalah wadah yang menampung pengaduan dan aspirasi dari masyarakat serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat khususnya masyarakat miskin, rentan dan termarginalkan maka dibentuk Posko GERTAK yang merupakan wujud implementasi

Sistem Rujukan Terpadu (SRT). Posko GERTAK ini adalah pusat sedekah informasi terkait kemiskinan, kerentanan dan permasalahan sosial lainnya. Posko GERTAK ini dirancang dengan *high-tech* mampu mendukung verifikasi data kemiskinan dengan cepat dan memberi dukungan secara sigap karena lengkapnya keterwakilan instansi dan lembaga yang berkompeten.

Berdasarkan hasil penelitian Posko GERTAK dalam menjalankan implementasinya sudah berjalan dengan baik. Masyarakat juga merasa terbantu dengan adanya Posko GERTAK ini. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Mas Riyanto dan Mas Rohmat selaku penerima bantuan bahwa dengan adanya Posko GERTAK ini memudahkan masyarakat untuk melapor dan mengajukan apabila membutuhkan bantuan dari Program GERTAK maupun bantuan penanggulangan kemiskinan yang lain.

4. Bina Ekonomi Rakyat

Program ini juga menggunakan metode pemberdayaan masyarakat sebagai upaya membantu masyarakat keluar dari kemiskinan melalui strategi bina ekonomi rakyat. Dalam hal ini Program GERTAK tidak dapat berdiri sendiri dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Trenggalek, tentunya harus adanya pihak-pihak lain yang membantu mensukseskan program ini. Menurut United Nations dalam Zauhar

(1993:16) bahwa suatu program dapat terlaksana dengan baik apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Tujuan yang dirumuskan jelas.
- b. Penentuan dari peralatan yang terbaik untuk mencapai tujuan.
- c. Suatu kerangka kebijaksanaan yang konsisten dan atau proyek-proyek yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan program secara selektif.
- d. Pengukuran dengan ongkos-ongkos yang diperkirakan dan keuntungan-keuntungan yang diharapkan akan hasil dari program tersebut.
- e. Hubungan dengan kegiatan lain dalam usaha pembangunan tidak berdiri sendiri.
- f. Berbagai upaya di bidang manajemen termasuk penyediaan tenaga, pembiayaan dan lain-lain untuk melaksanakan program tersebut.

Berdasarkan pernyataan United Nations dalam Zauhar tersebut terdapat beberapa faktor agar suatu program dapat berjalan dengan baik. Jika dikaitkan dengan pendapat yang dikemukakan oleh United Nations maka faktor bina ekonomi rakyat masuk dalam faktor ke 5 (lima) dimana dalam teori tersebut disebutkan bahwa hubungan dengan kegiatan lain dalam usaha pembangunan tidak berdiri sendiri. Hubungan dalam strategi bina ekonomi rakyat yang dimaksud yaitu dalam upaya meningkatkan sektor ekonomi kerakyatan, masyarakat miskin perlu mendapat kesempatan dan akses terhadap berbagai sumber permodalan dan peluang usaha tanpa dibebani dengan persyaratan yang menyulitkan. Sedangkan peluang-peluang sosial adalah upaya untuk meningkatkan kesempatan masyarakat miskin melakukan mobilitas sosial-ekonomi secara vertikal melalui pemenuhan kebutuhan dasar.

Berdasarkan pernyataan dari Bapak Wildan selaku bagian operasional Posko GERTAK, menjelaskan bahwa bina ekonomi rakyat ini merupakan strategi dimana pemerintah mengajak masyarakat miskin yang masih usia produktif untuk dibina dengan program berkelanjutan, diberikan permodalan pendampingan dan pelatihan sampai masyarakat tersebut dirasa mampu untuk melanjutkan usahanya. Menurut penulis strategi ini sudah berjalan baik ditandai dengan banyaknya masyarakat miskin yang dibina sudah mampu menjalankan usahanya secara mandiri. Secara otomatis strategi bina ekonomi rakyat ini mengentaskan masyarakat miskin dalam lingkaran kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan hidup bagi keluarganya.

5. Redefinisi dan Evaluasi

Berdasarkan dari hasil wawancara dan observasi serta dokumentasi yang dilakukan pada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Trenggalek, maka implementasi Program GERTAK dapat diukur dengan menggunakan teori penilaian program. Menurut Arikunto (1998:10), dimana penilaian program memiliki fungsi untuk mengukur keberhasilan program. Keberhasilan program tersebut bukan hanya tampak dalam bentuk hasil tetapi juga diukur dari segi waktu, kelancaran, dana, tenaga dan sebagainya. Apabila dihubungkan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Arikunto, maka strategi redefinisi dan evaluasi ini memiliki fungsi yang sama dengan teori yang dikemukakan

bahwa fungsi strategi ini adalah untuk mengevaluasi dan mengukur sejauh mana keberhasilan dari Program GERTAK.

Proses evaluasi untuk mengukur keberhasilan Program GERTAK ini dikemas dalam forum diskusi Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, Sinergitas, serta Monitoring dan Evaluasi (KISS ME). Forum KISS ME ini bertujuan untuk mengevaluasi dan meredefinisi implementasi Program GERTAK agar program penanggulangan kemiskinan serta program pemberdayaan masyarakat dapat berjalan lebih baik lagi. Berdasarkan pernyataan dari Bapak Wildan selaku bagian operator Posko GERTAK, dalam pelaksanaan evaluasi ini sudah berjalan dengan cukup baik karena rapat evaluasi program dilakukan rutin setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan menghadirkan *stakeholder* terkait untuk membahas permasalahan atau kendala apa saja yang ditemukan saat implementasi Program GERTAK. Peran *stakeholder* juga sudah baik karena masing-masing memiliki peran yang jelas dalam penanggulangan kemiskinan. Dengan demikian maka evaluasi Program GERTAK ini berfungsi sebagai pembantu, pengontrol pelaksana program agar dapat diketahui tindak lanjut dari pelaksanaan Program GERTAK tersebut.

2. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi program Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan (GERTAK) dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Trenggalek.

a. Faktor yang mendukung implementasi program Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan (GERTAK) di Kabupaten Trenggalek.

Dalam penelitian ini ada 3 faktor pendukung dalam implementasi Program GERTAK, yaitu 1) Dana yang mencukupi baik dari APBD maupun dari BAZNAS Kabupaten Trenggalek; 2) Koordinasi dan komunikasi yang baik antar *stakeholder* yang terlibat; 3) Keakuratan data.

Dana merupakan faktor pendukung yang sangat penting dalam sebuah implementasi. Seperti yang dinyatakan Wahab (2012:91) bahwa suatu program dapat terlaksana dengan baik dapat dilihat dari: 1) Struktur organisasi; 2) Sumber Daya Manusia; 3) Sumber sarana dan prasarana; 4) Prosedur kerja; 5) Perangkat hukum 6) Anggaran dana. Dana yang digunakan untuk Program GERTAK yang mencukupi dapat membuat pelaksanaan Program GERTAK berjalan dengan baik dan lancar. Dana yang digunakan untuk Program GERTAK berasal dari dana APBD dan dana dari BAZNAS Kabupaten Trenggalek.

Dana yang turun dari APBD digunakan langsung untuk kepentingan implementor Program GERTAK yang berada di Kabupaten Trenggalek. Misalnya untuk kegiatan rapat koordinasi, sosialisasi dan

digunakan untuk membeli kebutuhan berhubungan dengan Program GERTAK. Sedangkan dana yang turun dari BAZNAS langsung digunakan untuk kepentingan masyarakat penerima bantuan Program GERTAK. Dana yang mencukupi sangat membantu dalam pelaksanaan Program GERTAK di Kabupaten Trenggalek sehingga pelaksanaan program ini masih berjalan dengan baik hingga saat ini.

Faktor selanjutnya adalah koordinasi, koordinasi dan peran antar *stakeholder* yang terlibat. Wahab (2012:91) menyebutkan salah satu faktor penting agar sebuah program dapat berjalan dengan efektif adalah berkoordinasi/berhubungan dengan sistem dan prosedur kerja yang sudah baku sehingga dapat bekerja sama secara terpadu dan tidak tumpang tindih serta sudah memahami tugas dan tanggungjawab masing-masing, sehingga memudahkan untuk melaksanakan tugas masing-masing dengan efektif. Berkoordinasi ini berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikoordinasikan pada organisasi publik, ketersediaan sumberdaya untuk melaksanakan sebuah program, sikap dan tanggap dari pihak yang terlibat, dan bagaimana struktur organisasi pelaksana program.

Dalam hal ini *taskforce* tetap menjaga koordinasi dan komunikasi dengan keluarga sangat miskin dan dengan *taskforce* yang lainnya. Selain itu rapat koordinasi antar *stakeholder* juga rutin dilakukan setiap 3 bulan sekali untuk mengevaluasi implementasi Program GERTAK. Agar apabila terdapat masalah dapat segera diselesaikan sehingga implementasi Program GERTAK berjalan dengan lancar. Selain itu, peran antar

stakeholder juga diperlukan dalam implementasi Program GERTAK. Seperti peran dari guru, kepala sekolah dan kepala desa juga sangat dibutuhkan. Tanpa adanya peran dari masing-masing pihak yang terlibat, implementasi Program GERTAK tidak dapat berjalan dengan baik.

Faktor pendukung selanjutnya adalah keakuratan data. Keakuratan data berkaitan dengan sasaran dari penerima bantuan Program GERTAK. Apabila data yang tersedia akurat, maka langkah selanjutnya akan lebih mudah dan implementasi Program GERTAK dapat berjalan lancar. Tanpa data yang akurat, langkah yang akan dijalankan selanjutnya akan terhambat.

b. Faktor yang menghambat implementasi program Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan (GERTAK) di Kabupaten Trenggalek.

TKPK Kabupaten Trenggalek tidak terlepas dari faktor penghambat yang menghambat proses penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Trenggalek diantaranya:

1. Pola Pikir Masyarakat

Pola pikir atau *mindset* dari masyarakat juga faktor yang penting dalam implementasi Program GERTAK. Persoalan pola pikir dari masyarakat menentukan sejauh mana bantuan yang diterima oleh kelompok sasaran tersebut dimaksimalkan pemanfaatannya. James

Anderson dalam Sunggono (1994:23) mengemukakan program yang dibuat oleh pemerintah tidak hanya ditujukan untuk intern pemerintah saja, akan tetapi ditujukan dan dilaksanakan pula oleh seluruh masyarakat yang berada di lingkungannya. Masyarakat mengetahui dan melaksanakan suatu program dikarenakan :

- e. Respek anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan-keputusan badan-badan pemerintah;
- f. Adanya kesadaran masyarakat untuk menerima program pemerintah;
- g. Adanya keyakinan bahwa program tersebut dibuat secara sah, konstitusional dan dibuat oleh para pejabat pemerintah yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan;
- h. Sikap menerima dan melaksanakan program karena program itu lebih sesuai dengan kepentingan pribadi;
- i. Adanya sanksi-sanksi tertentu yang akan dikenakan apabila tidak melaksanakan suatu program.

Berdasarkan pernyataan James Anderson dalam Sunggono diatas terdapat beberapa aspek agar suatu program dapat berjalan dengan baik. Implementasi program seharusnya perlu didukung dan diterima oleh masyarakat, apabila anggota masyarakat mengikuti dan mentaati sebuah program maka sebuah implementasi program akan berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Tetapi pada implementasinya Program GERTAK ini belum sepenuhnya berhasil karena terhambat oleh pola pikir masyarakat yang rela dicap sebagai masyarakat miskin supaya mendapatkan bantuan dari Program GERTAK. Jika dikaitkan dengan pendapat yang dikemukakan oleh James maka aspek pola pikir masyarakat masuk dalam aspek ke 2 (dua) dimana dalam teori tersebut disebutkan bahwa untuk mencapai keberhasilan suatu program salah satunya harus

adanya kesadaran masyarakat untuk menerima program pemerintah. Permasalahannya, masyarakat Kabupaten Trenggalek masih banyak yang belum sadar bahwa ternyata dibawah masih ada orang atau keluarga yang lebih membutuhkan bantuan, dan belum menyadari ada yang lebih berhak menerima apa yang telah diterimanya. Sehingga dengan masih ditemukannya masalah tentang pola pikir masyarakat ini, mengakibatkan terjadinya *exclusion error* (warga miskin belum terdata) dan *inclusion error* (yang terdata bukan warga miskin). Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Ibu Aris Mbajeng Wahyu Prasiska selaku bagian operator Posko GERTAK, bahwa pola pikir masyarakat menjadi salah satu faktor penghambat berjalannya Program GERTAK sesuai dengan yang ditetapkan sebelumnya.

2. Ketidakakuratan Data dalam Menentukan Kelompok Sasaran

Salah satu yang menjadi tolok ukur terpenting kualitas program penanggulangan kemiskinan adalah hasil penentuan sasaran atau *targeting* yang baik, sedangkan untuk memperoleh hasil *targeting* yang baik diperlukan dukungan sistem data kemiskinan yang baik pula. Menurut Sunggono (1994:149-153) mengemukakan bahwa implementasi program mempunyai beberapa faktor penghambat diantaranya: 1) Isi program; 2) Informasi; 3) Dukungan; 4) Pembagian potensi. Jika dikaitkan dengan pendapat Sunggono maka ketidakakuratan data dalam menentukan kelompok sasaran ini masuk faktor ke 3 (tiga) dimana dukungan ini berarti implementasi suatu program akan sangat sulit apabila pada

pelaksanaannya tidak cukup dukungan untuk implementasi program tersebut. Tidak cukup dukungan disini artinya adalah dukungan sistem data kemiskinan Program GERTAK yang masih menjadi penghambat. Ketidakakuratan data yang berdasarkan PPLS 2011 dan PBDT 2015 ini masih ditemukan ketidaksesuaian data di lapangan yang karena mutasi data yang terlalu cepat, misalnya kematian, masyarakat yang pindah, masyarakat yang berubah status menjadi mampu, dll.

Berdasarkan pernyataan dari Ibu Aris Mbajeng Wahyu Prasiska selaku bagian operasional Posko GERTAK menyatakan bahwa ketidakakuratan data ini juga mengakibatkan lebih berhati-hati dalam melangkah untuk memberikan bantuan kepada calon penerima bantuan. Ketidakakuratan data menimbulkan ketakutan apabila bantuan yang diberikan tidak tepat sasaran. Maka dengan begitu, dalam implementasi Program GERTAK itu sendiri belum sepenuhnya tepat dalam pemanfaatannya. Dalam pemanfaatan bantuan masih ada ditemukan ketidaksesuaian-ketidaksesuaian data yang ditemukan di lapangan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada rumusan masalah, hasil penelitian beserta pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti di bab sebelumnya, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan pada penelitian yang berjudul “Implementasi Program Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan (GERTAK) dalam Upaya Penanggulanga Kemiskinan (Studi pada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Trenggalek) sebagai berikut:

1. Strategi-strategi tertentu juga dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi Program GERTAK di Kabupaten Trenggalek agar proses implementasi Program GERTAK dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan yaitu memutus rantai kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Strategi itu diantaranya 1) Golden Standart Klasifikasi 2) Mekanisme Mutasi 3) Unit Pelayanan Terpadu 4) Bina Ekonomi Rakyat 5) Redefinisi dan Evaluasi. Namun masih terdapat strategi yang belum sepenuhnya dapat mendukung tercapainya tujuan dari program GERTAK.
2. Berbagai organisasi pelaksana terlibat dalam implementasi Program GERTAK ini, baik organisasi pelaksana dari pemerintah daerah maupun dari tingkat kecamatan dan desa. Organisasi pelaksana pemerintah daerah

yaitu OPD-OPD yang terkait pada kewenangannya masing-masing. Dari peran *stakeholder* yang terlibat sudah cukup baik dalam mengimplementasikan program GERTAK, karena mereka memiliki peran yang sudah ditentukan untuk menjalankan implementasi Program GERTAK.

3. Kelompok sasaran yang paling utama dari Program GERTAK ini adalah keluarga yang sangat miskin atau Desil 1 (Rumah tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 10% terendah di Indonesia)
4. Terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam pencapaian tujuan implementasi Program GERTAK di Kabupaten Trenggalek. Faktor yang mendukung keberhasilan implementasi Program GERTAK di Kabupaten Trenggalek antara lain 1) Dana yang mencukupi baik dari APBD maupun dana dari BAZNAS Kabupaten Trenggalek; 2) Koordinasi dan komunikasi yang baik antar *stakeholder* yang terlibat. Sedangkan faktor penghambat keberhasilan implementasi Program GERTAK di Kabupaten Trenggalek antara lain yaitu: 1) Pola Pikir Masyarakat atau *mindset* 2) Ketidakkakuratan data.

B. SARAN

1. Perlunya merubah pola pikir (*mindset*) masyarakat, dengan memberikan edukasi seluas-luasnya bagi masyarakat tentang kesadaran, kepekaan dan kepedulian sosial misalnya lewat lembaga resmi sosial masyarakat, forum-forum kemasyarakatan serta keagamaan, sanksi sosial dll. Selain

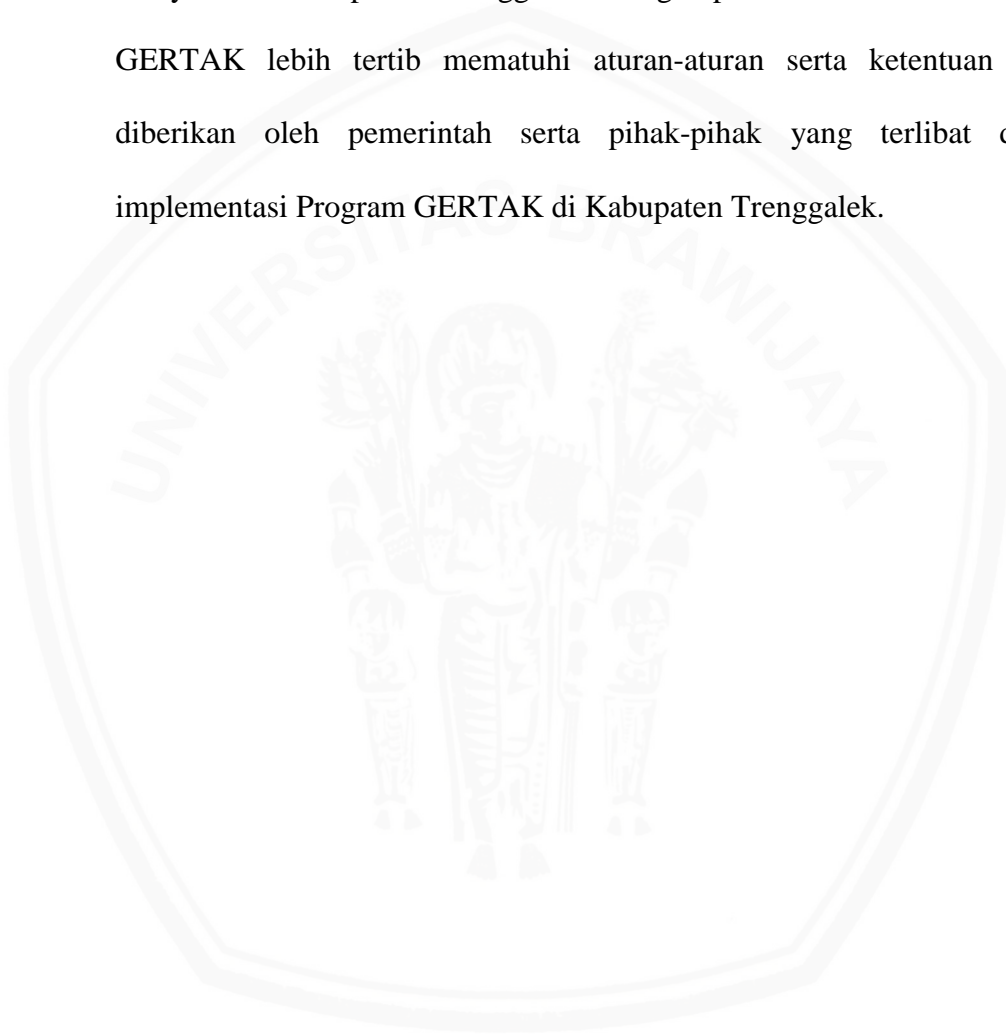
pemerintah yang terjun langsung untuk memberikan sosialisasi di tiap desa pada saat musdes, sebaiknya penyadaran moral masyarakat juga ditingkatkan dalam meningkatkan kepedulian sosial yang bisa ditanamkan lewat pengajian atau ceramah keagamaan. Peran tokoh masyarakat, peran tokoh agama dalam menanamkan kepedulian sosial kepada masyarakat seperti mengajak masyarakat mendukung dan membantu sesama untuk lebih peduli, berpartisipasi dalam program kepedulian sosial, meningkatkan kepekaan terhadap keadilan dan harmonisasi sosial, mempertimbangkan kebutuhan individu dan kelompok, serta mendukung pemerintah untuk mewujudkan cita-cita Program GERTAK dalam penanggulangan kemiskinan.

2. Dalam implementasi Program GERTAK masih banyak ditemukan data calon penerima bantuan yang belum akurat. Hal ini bisa disebabkan karena mutasi status yang berubah dengan sangat cepat, atau kekeliruan pendataan maupun kesalahan *entry* data. Supaya data yang didapat lebih valid salah satunya dengan cara menjaga keakuratan data dan validasi berkala. Menjaga keakuratan data tidak jauh dari beberapa aspek yaitu sumber data, bagaimana mekanisme memperoleh data tersebut, prosedur pengolahan data dll. Sinkronisasi data dari lembaga penyedia data misalnya BPS, Dinsos, PPLS dan PBDT. Menempatkan tenaga ahli berintegritas yang terjun kelapangan secara langsung untuk survey pemetaan, serta pendataan. Validasi rutin memanfaatkan pemerintahan level terbawah seperti tataran RW hingga RT, mekanisme laporan

masyarakat secara langsung lewat call center, aplikasi mobile dsb.

Memanfaatkan chanel serta seluruh sumberdaya masyarakat yang ada.

3. Ketepatan sasaran dengan mekanisme pengawasan dan pemberian program bantuan yang terkontrol, sistematis serta berkelanjutan.
4. Masyarakat Kabupaten Trenggalek sebagai penerima bantuan Program GERTAK lebih tertib mematuhi aturan-aturan serta ketentuan yang diberikan oleh pemerintah serta pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi Program GERTAK di Kabupaten Trenggalek.



DAFTAR PUSTAKA

- . *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Online). Melalui: <http://kbbi.kata.web.id/gerakan-sosial/>. Diakses pada 9 Desember 2017
- Abdullah, Syukur. 1987. *Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya dalam Pembangunan*. Makassar: Persadi.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Penilaian Program Pendidikan*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Assegaf, Nurhayati Ali. 2015. *Konsep Kesejahteraan dan Problematika Kemiskinan*. LIPI Press
- Azwar, Azrul. 1996. *Menjaga Mutu Pelayanan*. Jakarta : Sinar Harapan.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. 2017. *Data dan Informasi Kemiskinan Tahun 2017*. Jakarta : BPS (diakses pada 18 Oktober 2017).
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Trenggalek. *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten Trenggalek*. Trenggalek: BPS (diakses pada 18 Oktober 2017).
- Baldock, John et.al. 2007. *Social Policy*. USA: Oxford University Press
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 2006. *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Haughton, Jonathan. Kandker, Shahidur R. *Handbook of Poverty and Inequality*. World Bank, Washington DC, USA.
- Jarnasy, Owin. 2004. *Pemberdayaan dan Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta: Kompas
- Maipita, Indra. 2014. *Mengukur Kemiskinan & Distribusi Pendapatan*. Yogyakarta: UPP Stim YKPN
- Miles, M.B, Huberman, A.M, Saldana, J. 2013. *Qualitative Data Analisis: Methods Source Book*. SAGE Publication.
- Mirsel, Robert. 2004. *Teori Pergerakan Sosial*. Yogyakarta: INSISTPress

- Moleong, Lexy J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nogi, Hessel. 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi*. Yogyakarta: YPAPI dan Lukman Offset.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
- Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- Putra, Fadillah. 2003. *Paradigma Kritis dalam studi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Putra, Fadillah., dkk. 2006. *Gerakan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Robbins, Stephen P. 1994. *Essentials of Organizational Behavior*. Englewood Cliffs
- Rohman, Arif. 2009. *Politik Ideologi Pendidikan*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Soemardjan, Selo. 1980. *Kemiskinan Struktural*. Yogyakarta: Komunitas Bambu.
- Sugiyono. 2012. *Metedologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunggono, Bambang. 1994. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Jakarta : PT. Sinar Grafika.
- Suryawati, Chriswardani. 2005. *Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional*. <http://www.jmpk-online.net>.
- Suryono, Agus. 2004. *Pengantar Teori Pembangunan*. Malang: Universitas Negeri Malang
- Suyanto, Bagong. 2013. *Anatomi Kemiskinan dan Strategi Penanganannya*. Malang: Instrans Publishing.
- Tachjan, H. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Truen RTH.
- Undang-undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanganan Fakir Miskin.
- Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

- Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wholey, Joseph S., Hatry, Harry P., Newcomer, Kathryn E., 2010. *Handbook of Practical Program Evaluation*. San Frasco: John Wiley & Sons.
- Zastrow, H.C. 2007. *Introduction of Social Work*. USA: Thomson Books/Cole.
- Zauhar, Soesilo. 1993. *Administrasi Program dan Proyek Pembangunan*. Malang: IKIP Malang.
- Zuhro, Siti. 2012. *Negara, Civil Society & Demokratisasi*. Malang: Intrans Publishing.

